



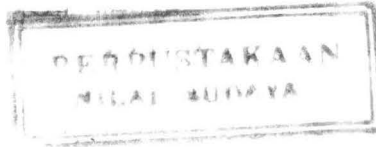
SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SULAWESI TENGAH

KEPEMIMPINAN
DALAM BUDAYA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1986

**SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SULAWESI TENGAH**



Peneliti/Penulis :

1. Drs. Ramli Sahala
2. Drs. Abd. Gani Hado M.
3. Drs. Aminuddin Kadir
4. Drs. Abd. Gani Hali

Penyempurna/Editor :

Dra. Fajria N. Manan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1986**

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah di antaranya ialah naskah Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1983/1984.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Mei 1986

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Ahmad Yunus

NIP. 130 146 112

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1983/1984 telah berhasil menyusun naskah Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Tengah.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Mei 1986

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Subadio
NIP. 130 119 123

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	iii
Sambutan	v
Daftar Isi	vi
Bab. I. Pendahuluan	1
Masalah	1
T u j u a n	3
Ruang Lingkup	3
Pertanggung jawab ilmiah	5
Bab. II Identifikasi	12
1. Lokasi	12
2. Penduduk	19
3. Sejarah Pemerintah Desa	20
4. Latar Belakang Sosial	26
Bab. III. Gambaran Umum kepemimpinan di dalam ma- syarakat pedesaan	35
1. Organisasi Pemerintahan Desa	35
2. Sistim Kepemimpinan	38
Bab. IV. Pola Kepemimpinan dalam masyarakat Pedesa- an di bidang sosial	48
1. Organisasi dalam kegiatan sosial	48
2. Sistim Kepemimpinan	58
3. Pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang sosial dalam masyarakat	65
Bab. V. Pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesa- an di bidang Ekonomi	71
1. Organisasi dalam kegiatan ekonomi	71
2. Sistim kepemimpinan	80
3. Pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang ekonomi dalam masyarakat	87

Bab. VI. Pola Kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang Agama	90
1. Organisasi dalam bidang keagamaan	90
2. Sistem Kepemimpinan	99
3. Pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang agama dalam masyarakat	102
 Bab. VII. Pola Kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pendidikan	 105
1. Organisasi dalam kegiatan pendidikan	105
2. Sistem kepemimpinan	109
3. Pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang pendidikan dalam masyarakat	115
 Bab. VIII. Beberapa Analisa	 123
1. Pengaruh Kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan di pedesaan	123
2. Sistem Kepemimpinan pedesaan sehubungan dengan sistem Administrasi Politik Nasional ..	124
3. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional	126
– Bibliografi	
– Lampiran	
– Indeks.	

BAB I

PENDAHULUAN

Didalam bab pendahuluan ini akan digambarkan tentang Proyek penelitian ini mulai dari awal kegiatan sampai dengan adanya naskah laporan akhir dari penelitian ini. Mengenai pokok-pokok yang dibahas dalam bab pendahuluan ini adalah terdiri dari : Masalah, tujuan, ruang lingkup dan pertanggung jawaban ilmiah penelitian.

Berdasarkan pada keempat pokok dari pembahasan tersebut, maka sesuai dengan TOR dan pedoman yang ada tulisan ini berusaha memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan seperti apa tujuan dari penelitian tentang sistim Kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan, apa yang ingin dicapai, bagaimana penelitian ini dilakukan serta bagaimana pula hasilnya.

Untuk maksud tersebut maka berikut ini akan digambarkan secara sekilas lintas tentang keempat dari pokok pembahasan tersebut sebagai berikut :

Masalah :

Masalah dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu masalah Umum dan masalah Khusus.

Masalah Umum yang dimaksud adalah masalah pada umumnya yang menyangkut tentang pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia khususnya yang berhubungan dengan sistim Kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil dari inventarisasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan Thema Penelitian ini, maka masalah umum di sini adalah merupakan beberapa gambaran dari komponen pokok yang diteliti yang berkaitan dengan sistim Kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan antara lain :

1. Identifikasi masyarakat desa di lokasi Penelitian yang mencakup : Lokasi, penduduk, sejarah Pemerintahan desa dan Latar belakang sosial.
2. Gambaran Umum Kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan yang meliputi organisasi pemerintahan desa, dan sistim kepeimpinannya.

3. Pola kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan di bidang Sosial yang mencakup organisasi dalam kegiatan sosial, sistim kepemimpinan serta pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang sosial dalam masyarakat.
4. Pola Kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan di bidang Ekonomi yang meliputi organisasi dalam kegiatan Ekonomi, sistim kepemimpinan serta pengaruh dan fungsi kepemimpinan ekonomi masyarakat.
5. Pola kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan di bidang Agama yang meliputi organisasi dalam kegiatan agama sistim kepeimpinannya serta pengaruh dan fungsi kepemimpinan pendidikan dalam masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan sistim kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah adalah merupakan bagian dari sistim budaya dari masyarakat di desa lokasi penelitian dan menjadi masalah umum dalam tulisan ini :

Sedangkan yang menjadi masalah khusus dalam tulisan ini adalah :

1. Bahwa sejauh mana wujud dari sistim kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat desa setempat dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh para pemimpin di desa itu, sesuai dengan jabatan-jabatan yang mereka pegang dalam suatu struktur kepemimpinan yang berlaku serta peranan-peranan apa yang mereka laksanakan dalam mengatur tata kehidupan dari masyarakat desa Kotarindau dan desa Bangga.
2. Bahwa sejauh mana sistim kepemimpinan yang ada di dalam masyarakat desa Kotarindau dan desa Bangga berjalan secara efektif dan lancar tanpa mendapat dukungan dari struktur sosial yang ada serta kekuatan-kekuatan lainnya dari masyarakat yang bersangkutan. Namun di samping itu bahwa dalam kenyataan struktur suatu kepemimpinan hanya dapat berjalan serta efektif apabila didukung dengan berbagai sarana yang ada dalam masyarakat desa yang bersangkutan, sebab bagaimanapun kepemimpinan membutuhkan kekuatan sosial, ekonomi, politik bahkan fisik yang kesemuanya itu secara bersama-sama dapat kemampuan atau kesanggupan dan kekuatan untuk mempengaruhi serta menyuruh orang lain untuk berbuat dan melaksana-

kan sesuatu dengan apa yang dikehendaki oleh sipemimpin itu.

3. Bahwa sejauh mana sistim kepemimpinan yang ada di desa Kotarindau dan desa Bangga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan mempergunakan atau meminjam kekuatan-kekuatan yang ada dalam kedua desa tersebut ataupun kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar desa itu, seperti dari Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten.

Tujuan :

Penelitian mengenai inventarisasi dan dokumentasi di daerah yang berhubungan dengan sistim kepemimpinan dalam masyarakat di pedesaan adalah bertujuan untuk :

1. Secara Umum adalah agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan pada umumnya khususnya mengenai sistim budaya yang berhubungan dengan sistim kepemimpinan dalam pedesaan di daerah Sulawesi Tengah, guna disumbangkan sebagai bahan-bahan untuk menentukan kebijaksanaan dalam pembangunan di segala bidang.
2. Secara khusus penelitian sistim kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan adalah berusaha mengumpulkan data-data sebagai bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun buku Adat-istiadat (sistim Budaya) daerah Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan sistim kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan.

Dengan sistim budaya ini dapat diharapkan memberi informasi terutama tentang Pola Kepemimpinan dalam bidang sosial, bidang pemerintahan, Ekonomi, agama dan pendidikan yang terdapat di daerah Sulawesi Tengah. Selanjutnya bahwa tujuan khusus ini akan terungkap melalui uraian-uraian dari lokasi penelitian yang telah ditetapkan di Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.

Ruang Lingkup

Memperhatikan judul dari penelitian ini yaitu sistim kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan, maka yang menjadi ruang lingkup dari sistim kepemimpinan adalah hubungan yang terjalin dan berkembang dalam suatu masyarakat pedesaan yang diteliti di daerah Sulawesi Tengah.

Oleh karena daerah Sulawesi terdiri dari 62 Wilayah Kecamatan dan 1271 desa yang tersebar pada 4 Kabupaten masing-masing

Kabupaten Donggala, Buol Toli-toli, Poso dan Luwuk Banggai, maka berdasarkan TOR telah ditetapkan dalam satu wilayah Kecamatan hanya dua desa yaitu satu desa di ibu Kota Kecamatan pada satu wilayah Kecamatan, dalam satu daerah Propinsi.

Penentuan kedua desa dalam satu Wilayah Kecamatan tersebut merupakan upaya batasan kerja dalam pelaksanaan dari tugas penelitian ini. Hal ini dilakukan oleh karena jalinan hubungan dalam suatu struktur sosial prosesnya akan berjalan secara terus-menerus diantara sesama warganya sehingga akan nampak dengan jelas corak atau tipe kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat pedesaan dimana tipe-tipe kepemimpinan tersebut antara lain :

1. Sistem kepemimpinan tradisionalnya kuat dan mendominasi berbagai struktur dan kegiatan politik yang berlaku dalam masyarakat desa.
2. Sistem kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan yang berasal dari sistem administrasi politik nasional sama-sama kuatnya dan secara bersama-sama merupakan suatu kesatuan yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat desa.
3. Sistem kepemimpinan yang bersumber pada administrasi politik nasional kuat dan mendominasi bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan politik dalam kehidupan masyarakat desa, sehingga sistem kepemimpinan tradisional terkesampingkan dan tak berfungsi lagi.

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan di atas maka jelas bahwa ruang lingkup dalam penelitian di sini adalah meliputi seluruh wilayah Sulawesi Tengah dengan menentukan dua desa dalam satu Kecamatan dimana pada kedua desa tersebut terdapat suatu interaksi sosial yang prosesnya berjalan secara terus-menerus dan merupakan suatu sistem kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat itu. Dari pengertian ruang lingkup tersebut, maka dalam kehidupan masyarakat desa itu tergambar beberapa hal yang mempunyai kaitan erat dengan sistem kepemimpinan yang berlaku pada kedua desa itu dan merupakan materi yang akan diteliti secara tajam dalam penelitian. Materi-materi tersebut antara lain : Gambaran umum kepemimpinan didalam masyarakat pedesaan yang terdiri dari organisasi pemerintahannya dan sistem kepemimpinannya, Pola kepemimpinan dalam bidang-bidang, sosial, Ekonomi, Agama dan Pendidikan yang pada dasarnya te-

lah hidup dan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga hal-hal tersebut merupakan materi pokok dari pada ruang lingkup dalam suatu masyarakat pedesaan.

Di samping telah dikatakan materi pokok daripada ruang lingkup ini, maka untuk menentukan ruang lingkup operasionalnya juga tidak kalah pentingnya. Dalam ruang lingkup operasional di sini dimaksudkan adalah suku bangsa yang mendiami daerah Sulawesi Tengah. Dalam hal ini telah ditetapkan bahwa suku bangsa yang menjadi sasaran dalam melaksanakan tugas operasional adalah suku bangsa Kaili yang paling banyak mendiami Kabupaten Donggala termasuk dalam Wilayah Kecamatan Dolo. Berdasarkan petunjuk yang ada, maka dalam suatu Kecamatan diam bil dua desa yaitu satu desa di ibu kota Kecamatan dan satu desa jauh dari ibu kota Kecamatan. Kedua desa itulah yang merupakan ruang lingkup operasional dalam penelitian ini.

Berdasarkan informasi dan peninjauan yang telah dilakukan terlebih dahulu, maka telah ditetapkan bahwa lokasi yang merupakan sasaran operasional dalam tugas penelitian ini adalah Desa Kotarindau dan Desa Bangga yang terletak dalam Wilayah Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala. Kedua desa yang menjadi sasaran operasional dalam tugas penelitian ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa kedua desa dalam Kecamatan tersebut, disamping sebagai Desa yang cukup tua juga pada kedua desa tersebut adalah merupakan bekas Wilayah kerajaan dahulu dimana para warganya terikat dalam suatu ikatan yang erat dengan kehidupannya yang selalu melaksanakan kegotong-royongan, mencintai tempat kediamannya, taat menjalankan agamanya. Rasa persatuannya terhadap sesamanya, sehingga tidak nampak hal-hal yang beraneka ragam dalam kehidupan sosialnya. Jadi sosialnya nampak secara utuh dan bulat diantara sesama warga masyarakatnya.

Prosedur dan Pertanggung jawaban Ilmiah.

Prosedur dan pertanggung jawaban penelitian adalah menggambarkan bagaimana penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan. Mulai disiapkan, direncanakan dan operasionalnya serta sampai kepada naskah laporan akhir dari penelitian ini.

Karena itulah maka dalam hal ini akan dikemukakan dan digambarkan secara terperinci tentang tiga aspek pokok yang benar-

benar dilakukan dalam mencapai naskah laporan akhir dari penelitian ini.

Ketiga aspek pokok tersebut adalah :

Aspek penelitian, aspek penulisan naskah laporan dan aspek hasil akhir yang dicapai dalam penelitian ini.

Aspek Penelitian.

Dalam aspek ini dikemukakan antara lain meliputi organisasi penelitian, tenaga-tenaga peneliti, metode yang dipergunakan, lokasi penelitian, jadwal penelitian, pengalaman dalam pelaksanaan penelitian serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama penelitian ini berlangsung.

Mengenai organisasi dalam penelitian dapat dikemukakan bahwa dengan berpedoman kepada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka sebagai langkah pertama dan utama adalah menetapkan terlebih dahulu organisasi penelitian yang lengkap dengan mekanisme kerjanya. Penetapan organisasi dan mekanisme kerja dari penelitian ini ialah harus diperhitungkan pula ruang lingkup dari lokasi penelitian.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan organisasi penelitian yang merupakan tumpuan utama dan diharapkan akan memberikan sumbangan besar bagi terselenggaranya tugas-tugas penelitian baik yang bersifat teknis administratif maupun yang bersifat teknis operasional. Atas dasar dan pegangan inilah maka organisasi pelaksanaan penelitian di daerah Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Komponen-komponen pokoknya adalah sebagai berikut :

Penentuan tim peneliti serta merencanakan lokasi penelitian sesuai dengan pedoman yang ada. Setiap anggota peneliti diwajibkan mendalami materi Pokok Term of Reference (TOR) yang telah ditetapkan pada pengarahannya tenaga-tenaga Peneliti baik oleh Team Penanggung jawab aspek Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Pusat, maupun yang diarahkan oleh Ketua Proyek yang ada di daerah.

Menetapkan mekanisme kerja dan pembagian tugas yang diatur sebagai berikut :

Semua anggota peneliti diwajibkan mengadakan orientasi dan peninjauan baik terhadap lokasi penelitian maupun dalam menentukan responden, informan dan pemimpin dari setiap bidang yang

diteliti, serta dokumentasi dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan erat dengan tugas penelitian dan pengumpulan data di lapangan. Di samping itu maka yang tidak kurang pentingnya adalah mempelajari kepustakaan yang relevan dan sangat menunjang terlaksanakannya penelitian ini seluruh anggota tim secara bersama-sama mengembangkan dan menyusun angket/pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian yang telah ada dan selanjutnya diolah dan dijadikan sebagai pedoman dalam wawancara serta angket yang digunakan pada penelitian di lapangan.

Tim peneliti secara bersama-sama menuju kepada lokasi penelitian dan setiap anggota tim peneliti bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kepada setiap tenaga peneliti ditugaskan kepadanya untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, dan diharapkan dapat berkomunikasi dengan lancar baik dengan pejabat yang berada di tingkat propinsi maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lokasi penelitian, oleh karena hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan hal-hal yang bertalian dengan materi pokok dari penelitian ini sehingga dapat ditentukan informan yang sesuai dengan data yang diharapkan. Tim peneliti yang terdiri dari 4 orang masing-masing Drs. Ramli Sahala, Drs. Abdul Gani Hali, Drs. Aminuddin Kadir, Drs. Abd. Gani Hado M. ditugaskan sebagai pengolah data dan sekaligus sebagai Team penulis naskah laporan.

Dalam hal ini maka setiap anggota peneliti berkewajiban mengolah data lapangan dan sekaligus menyusun laporannya yang merupakan tanggung jawabnya (setiap Pola Kepemimpinan pada kedua desa penelitian) yang kemudian secara bersama-sama menyusun naskah laporan yang siap untuk dijadikan sebagai naskah laporan akhir.

Mengenai keempat tenaga peneliti yang disebutkan di atas diharapkan mampu mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan komposisi sebagai berikut :

Drs. Ramli Sahala sebagai Ketua, Drs. Abd. Gani Hali, Drs. Aminuddin Kadir dan Drs. Abd. Gani Hado M masing-masing anggota.

Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, angket, dan observasi. Penggunaan dari metode-metode tersebut adalah didasarkan pada hasil orientasi dan

penjajakan kepustakaan serta segala komponen yang berhubungan dengan situasi yang hidup dan terhubung dilokasi penelitian serta informasi yang diperoleh sebelum penelitian ini dilakukan.

Mengenai metode wawancara dan angket sebelumnya telah disiapkan instrumennya oleh pimpinan proyek Pusat kemudian oleh tenaga peneliti di daerah dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan yang hidup di lapangan, sehingga instrumen tersebut merupakan pegangan bagi peneliti dalam usaha mengumpulkan data primer. Adapun prosedur pelaksanaan metode ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendapatkan data primer yang lebih banyak dan dapat dipertanggung jawabkan, maka pedoman wawancara dan angket disebarkan jauh sebelum peneliti turun ke lapangan. Hal ini dilakukan adalah hasil kerja sama antara tenaga peneliti Camat/Kepala Desa dan sekaligus dengan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kecamatan setempat dan selanjutnya disebarkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, serta informan yang dianggap mengetahui benar tentang **materi-materi** pokok dari sistim kepemimpinan dalam masyarakat desa yang ditanyakan. Selanjutnya kepada mereka yang telah menerima daftar wawancara dan angket kemudian didatangi kerumahnya untuk tatap muka dan memintakan penjelasan serta membicarakan hal-hal yang ingin untuk diungkapkan sehubungan dengan materi pokok dalam penelitian ini.

Di samping itu para informan atas anjuran Kepala di desa diundang ke Balai Desa dan disanalah diadakan diskusi panel dimana para informan dari setiap bidang kepemimpinan yang diteliti ditanyakan secara mendalam tentang hal-hal yang ingin diungkapkan, sehingga dengan demikian data-data yang diperoleh lebih lengkap oleh karena dijalin dari beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi panel tersebut.

Mengenai lokasi dari pada penelitian ini adalah meliputi daerah Sulawesi Tengah, akan tetapi dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan TOR maka yang dipilih adalah dua desa di kecamatan Dolo Daerah Tingkat II Donggala. Untuk memperoleh gambaran tentang desa-desa yang ada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah perlu dikemukakan jumlah desa yang ada pada setiap daerah Tingkat II (Kabupaten Donggala, Buol Toli-Toli, Poso dan Luwuk Banggai).

Untuk jelasnya mengenai 62 Wilayah Kecamatan dari 1271 desa yang tersebar dalam daerah Tingkat I Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Donggala	17	371
2.	Buol Toli-toli	11	135
3.	P o s o	20	414
4.	Luwuk Banggai	14	351
J u m l a h :		62	1.271

Sumber : Registrasi Penduduk Propinsi Sulawesi Tengah Akhir tahun 1982. Kantor Statistik Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk lebih memperjelas lokasi penelitian yang telah dikemukakan di atas di bawah akan digambarkan Wilayah Kabupaten Donggala sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Suku bangsa yang dipergunakan
1.	Palu Barat	17	Kaili
2.	Palu Timur	11	Kaili
3.	Soremja	11	Kaili
4.	Sindue	15	Kaili
5.	Tawaeli	15	Kaili
6.	Biromaru	41	Kaili
7.	D o l o	33	Kaili
8.	Marawola	38	Kaili
9.	Banawa	29	Kaili
10.	Parigi	36	Kaili
11.	Kulawi	37	Kulawi / Pipikoro
12.	Balaesang		Balaesang
13.	Damsol	18	Damso
14.	Tinombo	13	Tomini

15.	Mautong	14	Tomini
16.	Ampibabo	19	Kaili
17.	Tomini	12	Tomini

Sumber : Registrasi Penduduk Propinsi Sulawesi Tengah Akhir Tahun 1982. Kantor Statistik Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Observasi dan hasil study pendahuluan yang ada hubungan dengan bahan-bahan dan potensi dari setiap Kecamatan dan desa-desa yang ada dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Donggala, khususnya mengenai keadaan Kecamatan dan desa itu sendiri dikaitkan dengan materi pokok dari ruang lingkup penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka ruang lingkup operasional dalam hubungan dengan sistim kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan adalah sistim kepemimpinan di desa Kotarindau dan di desa Bangga yang ada dalam Kecamatan Dolo.

Sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan sampel penelitian terhadap kedua desa tersebut, antara lain adalah : Bahwa pada kedua desa tersebut yaitu desa Kotarindau mempunyai orbitasi yang lebih kurang 10 km dari Kota Palu dan dalam kehidupan sosialnya telah terjadi jaringan sosial yang kompleks sedang pada desa Bangga disamping jauhnya \pm 40 km dari ibu kota Propinsi Kota Palu, juga dalam kehidupan sosialnya masih nampak suatu sistim kesatuan hidup yang erat aneka warna antara kelompok-kelompok masyarakatnya.

Jadwal Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahap pertama adalah mengadakan persiapan-persiapan penelitian yang dimulai sejak awal bulan Mei sampai dengan bulan Juli dimana dipersiapkan antara lain mempelajari keputusan yang relevan, mendalami materi TOR, pembuatan pedoman wawancara/angket, penentuan lokasi, penentuan informan/responden, Surat izin/rekomendasi, dan menyebarkan angket kepada responden informan.

Tahap kedua adalah tahap penelitian di lapangan dimana tim peneliti telah terjun ke lapangan/lokasi penelitian yang telah ditetapkan waktu pelaksanaan tersebut dimulai dari bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Oktober.

Team peneliti secara bersama-sama terjun ke desa lokasi dan disanalah masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Disamping itu setiap anggota peneliti ditugaskan pula untuk mengkategorisasi data lapangan sehingga dalam pengolahan data nanti tidak mendapatkan kesulitan.

Pada tahap ketiga yaitu tahap pengolahan data. Dalam tahap ini setelah tim peneliti kembali dari lapangan dengan membawa seluruh data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan. Tahap ketiga ini dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember dimana setiap anggota peneliti disamping mengolah data secara bersama-sama, ditugaskan pula menyusun laporan yang merupakan tanggung jawabnya sesuai dengan data-data yang diperolehnya dari lapangan. Setelah masing-masing anggota Tim siap dengan konsepnya, maka diadakanlah pembahasan bersama untuk mendapatkan konsep naskah laporan akhir untuk diketik dan digandakan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Tahap keempat adalah tahap pengetikan dan penjilidan yang dimulai pada awal Desember sampai dengan akhir Januari.

BAB. II

IDENTIFIKASI

Desa Kotarindau dan Desa Bangga

1. Lokasi.

Desa Kotarindau dan desa Bangga terletak di Wilayah Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala. Kecamatan Dolo terdiri dari 36 Desa dan pada umumnya desa-desa tersebut didiami oleh mayoritas suku bangsa Kaili.

Dari sejumlah desa tersebut dipilih 2 desa yang menjadi sampel penelitian yaitu kedua desa yang disebutkan di atas. Kedua desa itu masing-masing desa Kotarindau sebagai Desa Ibu Kota Kecamatan Dolo di mana jaringan komunikasinya sudah terbuka dan lancar. Sedang desa Bangga jaringan komunikasinya masih sederhana dan merupakan desa yang terletak paling ujung Selatan Kecamatan Dolo dan jauhnya dari Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 30 km.

Letak dan Keadaan Geografis :

Mengenai letak dari kedua desa Kotarindau dan Desa Bangga dapat dilihat pada peta yang terlampir.

Pada peta itu tergambar batas-batas geografis desa Kotarindau dan desa Bangga yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah 2 desa di kecamatan Dolo Kabupaten Donggala yang letaknya (Desa Kotarindau kurang lebih 10 km dan desa Bangga kurang lebih 42 km) dari Kota Palu atau ibu kota Kabupaten Donggala dan Ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah.

Geografis desa Kotarindau pada sebelah baratnya terdapat aliran sungai Palu yang merupakan batas dari Kecamatan Dolo yang selanjutnya menyusuri ke sebelah Selatan menyeberangi sungai sungai sampai ke Desa Bangga yang jauhnya kurang lebih 30 km dari Kotarindau. Desa Kotarindau itu terletak pada bagian sebelah Utara Kecamatan Dolo yang merupakan pintu gerbang masuk dari Kota Palu.

Selain dari itu bagian sebelah barat Desa Kotarindau akan diketemukan kebun kelapa yang memanjang dari sebelah Utara – ke Selatan di sepanjang aliran Sungai Palu, sedangkan di

bagian Timurnya nampak dengan jelas tanah persawahan yang luas serta masih nampak pula kebun-kebun pohon kelapa diantara tanah persawahan itu.

Selain dari keadaan yang disebutkan di atas, desa Kotarindau adalah salah satu desa yang juga terletak di daerah garis khatulistiwa sehingga desa lokasi penelitian ini mempunyai iklim tropis . mempunyai 2 musim yaitu musim angin Timur dan musim angin Barat. Pergantian musim di daerah penelitian ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan mengenai geografis desa Bangga dapat dijelaskan sebagai berikut :

Desa Bangga sebagaimana dikatakan di atas jaraknya kurang lebih 30 km dari Desa Kotarindau (ibu Kota Kecamatan Dolo) Desa Bangga pada bagian sebelah Barat dan Selatan adalah daerah pegunungan atau masih merupakan bagian dari pegunungan Verbih/Gawalise yang memanjang dari utara ke selatan. Pada bagian sebelah barat itu pula mengalir sungai dan air dari sungai dijadikan tempat mandi masyarakatnya dan sekaligus dapat mengairi daerah persawahan/perkebunan yang berada di bagian Timur desa Bangga. Mulai kita memasuki desa Bangga dari sebelah Utara, di kiri kanan jalan nampak hanya pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon pisang baik pohon-pohon tersebut merupakan kebun, juga dapat kita lihat tumbuh dengan suburnya di halaman rumah-rumah penduduk.

Desa Bangga terdiri dari dataran Rendah 110 ha, Pegunungan 219 ha dan perbukitan kurang lebih 1 ha. Berdasarkan penggunaannya maka tanah persawahan 24½ ha, perkebunan kelapa 69 ha, pekarangan 24 ha.

Keadaan Alam.

Keadaan alam fauna pada kedua desa dilokasi penelitian pada umumnya sama dengan desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala.

Di desa Kotarindau kita tidak lagi mempunyai binatang-binatang buruan seperti babi, rusa, ayam hutan dan lain-lain, apalagi binatang buas, namun kalau di desa Bangga alam faunanya masih kita menemukan binatang-binatang buruan seperti disebutkan di atas, kecuali binatang buas juga tidak ada di desa Bangga berdekatan dengan gunung dan hutan-hutan belukar

yang dihuni banyak ular berbisa. Mengenai binatang ternak cukup banyak dipelihara pada kedua desa lokasi penelitian ini baik di Desa Kotarindau maupun desa Bangga. Binatang ternak itu seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, domba selain sebagai konsumsi untuk dijual, juga dipergunakan sebagai alat tenaga kerja di sawah dan di kebun, disamping itu dipakai pula untuk menarik gerobak dan dokar sebagai alat transportasi.

Selain dari itu di desa Kotarindau jenis burung seperti burung Kakatua dan Burung Nuri sudah kurang diketemukan dipelihara penduduk. Namun kalau kita ke desa Bangga jenis-jenis burung-burung tersebut masih banyak kita ketemukan tetapi bukan dalam pemeliharaan di rumah-rumah penduduk, melainkan masih bebas dalam alam margasatwa. Sedangkan mengenai alam Flora pada kedua desa lokasi penelitian itu juga hampir sama dengan desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Dolo. Hanya saja pada desa Bangga masih dijumpai rotan yang merupakan salah satu komoditi export dari Kabupaten Donggala. Di desa Kotarindau hasil hutan tersebut tidak akan dijumpai. Tetapi kebun-kebun kelapa baik di desa Kotarindau dan Desa Bangga bahkan pada hampir semua desa yang ada di Wilayah Kecamatan Dolo pada umumnya tumbuh dengan subur-nya di dataran rendah maupun di lereng-lereng gunung di daerah pedalaman.

Kopra merupakan juga komoditi yang cukup besar khususnya dari kedua desa lokasi penelitian itu dan dari seluruh desa yang ada di Wilayah Kecamatan Dolo pada umumnya. Selain dari itu di desa Kotarindau tanaman kopi tidak diketemukan, tetapi kalau di desa Bangga kita akan menemukan tanaman kopi itu berada di halaman rumah-rumah penduduk, namun hasilnya tidak diperdagangkan tetapi cukup untuk kebutuhan sendiri bagi masyarakatnya.

Pola Perkampungan

Telah dikatakan di atas bahwa pada umumnya yang mendiami Kecamatan Dolo adalah suku Bangsa Kaili. Justru karena itu, maka yang mendiami desa lokasi penelitian ini yaitu desa Kotarindau dan desa Bangga juga suku bangsa Kaili. Untuk itu Pola Perkampungan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini adalah pola perkampungan suku bangsa Kaili pada umumnya

dan pola perkampungan di desa Kotarindau dan desa Bangga sebagai lokasi penelitian.

Mengenai pola perkampungan suku bangsa Kaili pada umumnya sejak dahulu kala telah dikenal yaitu :

- Pola Perkampungan mengelompok padat.
- Pola Perkampungan secara menyebar.
- Pola perkampungan di antara kedua pola tersebut di atas.

Pola Perkampungan yang mengelompok padat umumnya merupakan terbesar dari yang lainnya dan disebut *ngata*. Mengenai pola perkampungan secara menyebar yaitu pola perkampungan yang mengelompok kecil dan menyebar pada beberapa tempat sehingga merupakan lokasi perkampungan yang kecil dan pada umumnya lokasi itu terdapat pada pusat-pusat pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Kelompok perkampungan kecil itu disebut *Boya*. Biasanya *Boya* mempunyai nama-anama tersendiri yang diberikan dengan mempunyai latar belakang dari peristiwa-peristiwa sosial seperti *Boya Ntanga* (perkampungan yang berpenduduk setengah dari desa induk).

Boya itu semakin lama semakin banyak penduduknya karena sebagai pertambahan penduduk dari *Boya* itu sendiri dan perpindahan penduduk dari tempat-tempat lain. Oleh karena *Boya* ini semakin lama semakin berkembang penduduknya menjadi *Kinta*. Dan di kalangan suku bangsa Kaili *Kinta* itu ditambah dengan satu kata yaitu "Baru" dan dinamakanlah *Boya tadi Kinta "Baru"*.

Kinta dalam perkembangannya yang sekarang ini berubah statusnya atau dimekarkan menjadi kampung dengan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Istilah kampung dikenal setelah penjajahan Belanda yang sampai kini masih tetap dipakai istilah kampung, walaupun dalam sistim pemerintahan sekarang ini oleh pemerintah telah dipopulerkan sebutan desa.

Pada umumnya letak kampung/desa berada pada tempat-tempat yang strategis di tepi atau disepanjang jalan, sungai, pantai dan berada pada dataran-dataran rendah. Biasanya salah satu ciri dari letak perkampungan yang mengelompok padat adalah pada daerah-daerah yang mempunyai sumber mata air atau sungai (*matauve atau buvu*).

Mengenai batas desa dengan desa lainnya ditandai dengan sungai atau kuala dan ada kalanya dengan jembatan. Sedangkan batas desa dengan kecamatan lainnya pada umumnya didasarkan pada batas-batas kerajaan yang pernah ada dalam sejarah itu.

Untuk bangunan-bangunan atau tempat-tempat tertentu untuk kepentingan umum seperti tanah lapang, mesjid, rumah adat, sekolah dan sebagainya pada umumnya di adakan dan ditempatkan di lokasi yang strategis dimana penduduknya cukup padat, dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk dalam waktu yang relatif pendek.

Lokasi pekuburan pada umumnya terletak tidak jauh dari pusat perkampungan bahkan ada sebagian besar berada di tengah-tengah perkampungan atau di belakang rumah-rumah penduduk baik di dataran yang berbukit ataupun di dataran rendah. Kuburan-kuburan tersebut ada yang sudah tua maupun kuburan yang masih baru.

Selanjutnya mengenai pola perkampungan pada kedua desa yaitu Desa Kotarindau dan desa Bangga yang menjadi lokasi Penelitian sistim Kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan, sebenarnya hampir sama saja keadaannya seperti apa yang telah diuraikan di atas. Namun untuk jelasnya secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pada desa Kotarindau : Berdasarkan pengamatan secara langsung pada desa Kotarindau terdapat pola perkampungan dimana rumah-rumah penduduk berderet dan memanjang dari sebelah utara ke selatan sepanjang tepi jalan. Rumah-rumah tersebut saling berhadapan dari sebelah timur dan sebelah barat, sedangkan jalan raya melintang di tengah-tengah. Kemudian di belakang perumahan penduduk pada bahagian sebelah baratnya yang jauhnya kurang lebih 300 m terdapat aliran sungai Palu.

Pada desa Bangga : Di desa Bangga pola perkampungannya juga berderet-deret di sepanjang tepi jalan yang memanjang dari sebelah utara – ke selatan. Rumah-rumah tersebut saling berhadapan dari sebelah barat dan sebelah timur, sedangkan jalan raya melintang di tengah-tengah. Pada ujung jalan sebelah selatan dan juga merupakan ujung perumahan penduduk terdapat batas jalan raya (jalan buntu), sedangkan seterusnya ke selatan

adalah tanah sawah dan di sebelahnya lagi adalah hutan dan daerah pegunungan.

Selanjutnya di desa Kotarindau ini masih diketemukan bangunan kerajaan yang merupakan satu-satunya bangunan yang tertua di desa itu yang menurut informasi kami peroleh bahwa bangunan itu pernah diusulkan untuk dipugar kembali, namun pemiliknya tidak mengizinkan.

Mengenai tempat-tempat seperti tanah lapang atau lapangan bola kaki dan lapangan olah raga lainnya berada di tengah-tengah perkampungan. Tempat-tempat tersebut disamping untuk kegiatan olah raga juga digunakan sebagai tempat mengadakan keramaian-keramaian yang diadakan oleh masyarakat desa Kotarindau. Tempat-tempat ibadah seperti mesjid dan musholla selain sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, juga digunakan sebagai tempat da'wah dan syiar Agama Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Halal bihalal dan yang jelas menurut pengamatan kami adalah merupakan pusat pengajian terutama bagi Remaja Mesjid yang ada di desa Kotarindau itu. Di desa Kotarindau terdapat 3 buah mesjid.

Mengenai tempat-tempat kuburan pada umumnya terletak di pingiran desa atau di belakang Rumah penduduk. Sedangkan mengenai jalan yang ada di desa Kotarindau pada umumnya sudah baik dan sudah merupakan jaringan jalan yang menghubungkan Kota Palu dengan Ibu kota Kecamatan Dolo yang memanjang dari Utara ke Selatan yang disebut dengan jalan negara (Propinsi). Selain dari itu maka jalan yang menghubungkan dengan desa-desa lainnya seperti desa Langaleso, desa Karawanan juga sudah diperkeras dengan jalan kerja bakti/gotong-royong masyarakat desa yang bersangkutan.

Setelah mengamati perumahan yang ada di desa Kotarindau hampir semuanya diberi pagar. Apalagi kalau menjelang perayaan Hari Nasional seperti 17 Agustus atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun Propinsi Sulawesi Tengah 13 April, pagar-pegar dari rumah penduduk diwajibkan untuk diperbaiki dan sekaligus dicat menurut ketentuan dari pemerintah setempat.

Tempat-tempat mandi pada umumnya berada pada sumber mata air. Sumber mata air itu juga digunakan untuk minum

dan memasak. Sumber mata air tempat mandi di desa Kotarindau ada di beberapa tempat sehingga dipisahkanlah untuk tempat mandi wanita dan laki-laki. Selain dari itu di desa Kotarindau sudah banyak rakyatnya memakai sumur pompa tangan baik itu sebagai bantuan dari pemerintah maupun dibeli atau dipasang sendiri oleh keluarga yang memakainya/membutuhkannya.

Selanjutnya mengenai desa Bangga yang menurut sejarah adalah desa yang tertua dan konon dahulu juga merupakan suatu kerajaan. Namun menurut pengamatan nampaknya di desa Bangga tidak adalagi bangunan-bangunan yang merupakan peninggalan kerajaan baik itu *Baruga*, *Bantaya* atau bangunan perumahan dari kerajaan yang dapat dianggap sebagai peninggalan sejarah dari kerajaan Bangga. Namun dalam tulisan ahli sejarah Sulawesi Tengah dikenal adanya kerajaan Bangga. Menurut informasi yang diketemukan di lokasi penelitian tersebut sekitar tahun lima puluhan rumah-rumah penduduk masih menyebar di sana-sini berupa pondok-pondok di pusat perkebunan. Pusat desa Bangga pada waktu itu hanya terdiri dari beberapa rumah penduduk yang dibuat dari tiang batang kelapa, atau rumbia dan dinding dari gaba-gaba atau anyaman dari bambu.

Mengenai tempat-tempat mandi di desa Bangga hampir semuanya mandi *dibinangga* (sungai) yang mengalir membagi dua desa itu sebelah utara dengan sebelah selatan. Dari sungai (*binangga*) itu baik air minum/masak diambil disamping juga dipakai tempat mencuci. Khusus untuk air minum/masak dibuat pinggir sungai secara tradisional sehingga pada tempat itu air ditimba pakai tempurung kelapa (*bobo*) kemudian diantar ke rumah. Di sungai itu susah untuk menentukan tempat mandi khusus untuk wanita dan laki-laki, sebab ini hari kita mandi ditempat itu, mungkin tengah hari, petang atau besoknya kita menemukan ada wanita yang mencuci pakaian dan sekaligus mandi di tempat itu.

Jadi kalau kita tidak hati-hati pergi mandi ke sungai bisa-bisa kita dikenakan sanksi adat, oleh karena sengaja atau tidak kita telah dianggap melanggar adat kebiasaan yaitu mau memasuki tempat mandi wanita.

Pagar-pagar rumah penduduk belum teratur sebagaimana di desa Kotarindau. Banyak rumah penduduk yang belum ter-

atur pagarnya, bahkan ada yang tidak ada pagarnya.

2. Penduduk

Telah diketahui bahwa 11 dari 16 Kecamatan yang ada dalam daerah Kabupaten Tingkat II Donggala pada umumnya berpenduduk suku bangsa Kaili.

Dari 11 Kecamatan yang berpenduduk suku bangsa Kaili itu salah satu diantaranya adalah Kecamatan Dolo. Asal usul penduduk bangsa Kaili menurut bakti sejarah yang ada, di ketahui bahwa adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat adalah *Ada nasibolai* (Adat perkawinan antar Keluarga bangsawan). *Ada nasibolai* ini mempunyai peran bahwa hampir semua suku bangsa Kaili mempunyai Keluarga erat dan merupakan "keluarga luas" dimana sistim kekerabatannya adalah keluarga inti. Oleh karena itu merupakan suatu kesatuan sosial yang erat sehingga dimana pun merka berada selalu menunjukkan unsur-unsur persamaan.

Suatu hal yang dapat diamati pada suku bangsa Kaili adalah adat istiadatnya yang makin lama semakin menghilang. Hal tersebut adalah karena pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, seperti akibat pergaulan dengan suku bangsa Bugis dari Selatan dan suku bangsa Gorontalo dan Minahasa dari Utara Pulau Sulawesi ini. Di samping itu maka pengaruh dari dalam sendiri seperti telah banyak memasuki pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan di bidang Agama Islam.

Selanjutnya sebagaimana dikatakan di atas Kecamatan Dolo termasuk berpendudukan suku bangsa Kaili Kecamatan Dolo terdiri dari 36 Desa dan 2 desa diantaranya menjadi lokasi Penelitian ini yaitu masing-masing Desa Kotarindau dan desa Bangga. Untuk jelasnya penduduk dari kedua desa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Demografi Desa Kotarindau.

Jumlah penduduk desa Kotarindau adalah 1980 jiwa terdiri dari 396 Kepala Keluarga.

Dari jumlah penduduk itu dibagi menjadi 5 rukun Keluarga dan 19 rukun tetangga.

Kurang lebih 98% penduduknya adalah suku bangsa Kaili dan

selebihnya adalah suku-suku bangsa pendatang (hasil registasi/sensus tahun 1980).

Jumlah penduduk desa Lokasi Penelitian berdasarkan
Golongan Umur

No.	D e s a	Kelompok Umur					50 ke atas	Juml. Jiwa
		0-4	5-9	10-14	15-24	25-49		
1.	Kotarindau	188	176	146	282	381	129	1302
2.	B a n g g a	199	156	144	160	312	88	1059
J u m l a h		387	332	290	442	693	217	2361

Sumber : Sensus Penduduk Kecamatan
Dolo Kab. Donggala tahun 1980.

Mobilitas Sosial

Di desa Bangga banyak pendatang yang berasal dari desa-desa lain di sekitar kota Palu. Mereka tertarik akan kesuburan perladangan/persawahan yang ada di desa Bangga. Sedangkan penduduk desa Bangga sendiri yang pada umumnya terdiri dari suku Kaili yang jarang meninggalkan desa, untuk pergi ke desa lain.

Biasanya penduduk desa Bangga ini pergi ke luar desa selama 3 sampai 7 hari untuk mencari Rotan di hutan-hutan yang terdapat di sekitar desa itu.

Sedangkan penduduk Kotarindau yang pindah, hanya biasanya penduduk hanya pergi ke kota Palu untuk memenuhi kebutuhannya, biasanya kembali lagi ke desa. Di kota hanya 5 sampai 10 jam, atau pergi pagi kembali sore. Selain daripada itu banyak pula anak-anak sekolah yang tinggal di desa Kotarindau, tetapi bersekolah di kota Palu

3. Sejarah Pemerintah Desa.

Pada bagian ini akan dikemukakan sejarah Pemerintahan desa pada lokasi penelitian ini yang meliputi asal usulnya, periode penjajahan Jepang dan Keadaan pemerintah desa di zaman Kemerdekaan.

a. *Asal Usul*

Mengenai asal usul kedua desa penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Desa Kotarindau yang merupakan salah satu desa dalam ibu kota Kecamatan Dolo menurut ceritera dari orang tua-tua yang diwawancarai (Bapak H. Djafar Lapasere) menceriterakan sebagai berikut :

Sebenarnya Dolo atau Kerajaan Dolo itu terletak di dataran tinggi di atas Desa Bora. Akan tetapi oleh karena dahulu kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Sulawesi Tengah umumnya dan di daerah Kabupaten tingkat II Donggala khususnya selalu terjadi perang antara kerajaan-kerajaan yang ada terutama antara kerajaan Sigi dan Kerajaan Dolo maka kerajaan Dolo terdesak turun ke bawah sampai pada suatu dataran rendah yang dewasa ini disebut desa Bodi.

Jarak desa Bodi sekarang dengan Ibu kota Kecamatan Dolo kurang lebih 3 km ke sebelah Timur. Di desa Bodi itu untuk sementara Kerajaan Dolo bertahan dari serangan Kerajaan Sigi. Namun kerajaan Sigi tetap memerangi Kerajaan Dolo terus menerus mendesak daerah kerajaan Dolo. Akhirnya ibu kota kerajaan Dolo pindah lagi dan turun sampai pada pinggir sungai yang memanjang dari sebelah Selatan ke sebelah Utara.

Pada pinggir sungai itulah dijadikan untuk ibu kota kerajaan Dolo. Pada bagian Utara dan dari ibu kota Kerajaan Dolo itu dibuat benteng untuk membendung serangan dari kerajaan Biromaru sedangkan pada bagian selatan dari ibu kota kerajaan itu juga dibuat benteng untuk membendung serangan dari kerajaan Sigi.

Pembuatan benteng-benteng tersebut baik dibagian Utara maupun pada bagian Selatan dimaksudkan adalah untuk melindungi Ibu kota Kerajaan Dolo dari gangguan-gangguan/serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya pada waktu itu.

Dengan didirikannya benteng-benteng tersebut yang sampai sekarang masih dapat diketemukan bekas-bekasnya merupakan suatu bukti bahwa kerajaan Dolo dalam perkembangannya hingga pada dewasa ini telah mewujudkan ibu kota Keca-

matan Dolo yang terdiri dari Desa Kotarindau (Kota di bagian Utara) adalah bekas benteng kerajaan di bagian Selatan. Jadi berdasarkan informasi yang diungkapkan itu maka sekarang sudah jelas bahwa asal usul desa Kotarindau dan desa Kotaripulu yang kedua-duanya merupakan Ibukota Kecamatan Dolo sampai sekarang ini.

Mengenai asal-usul desa Bangga menurut informasi yang diperoleh dari orang-orang tua yang ditemui di lokasi mence-
riterakan sebagai berikut :

Dahulu Bangga adalah merupakan suatu Kerajaan dan termasuk dalam dewan *Hadap Pitunggota* yang terdiri dari Kampung Dolo, Kampung Bangga, Kampung Biromaru, Kampung Kulawi, Kampung Sibalaya, Kampung Sidondo dan Kampung Pakuli. Dewan *Hadap Pitunggota* adalah pendamping utama dari kerajaan Sigi, sehingga menurut informasi Bangga dahulu banyak berhubungan dengan kerajaan Sigi yang merupakan penguasa tertinggi dari dewan *Hadap Pitunggota*.

Selanjutnya menurut ceritera yang diperoleh bahwa Desa Bangga sekarang ini berasal dari suatu tempat yang disebut *Bungkulangi* yang jaraknya kurang lebih 5 km dari desa Bangga sekarang. Tempat yang disebut *Bungkulangi* ini, kini sudah merupakan hutan rotan tempat rakyat mengambil rotan untuk dijual/diperdagangkan. Namun yang sangat mengherankan bahwa pada tempat itu (*Bungkulangi*) banyak sekali terdapat kuburan yang tidak dikenal. Malahan diantara kuburan-kuburan itu telah banyak yang dibongkar orang untuk mencari barang-barang antik. Jadi berdasarkan data-data tersebut jelas bahwa desa Bangga adalah merupakan suatu desa yang tertua didalam Wilayah Kecamatan Dolo.

b. *Periode Penjajahan Belanda.*

Setelah kaum Imperialisme Belanda masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dan khususnya masuk ke daerah Tingkat II Donggala, maka satu persatu kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Tingkat II Donggala jatuh ke tangan Imperialisme Belanda. Mulai pada waktu itu kekuasaan raja-raja yang menentang Belanda banyak dipenjarakan atau banyak diasingkan ke luar Pulau Sulawesi.

Adapun yang berlaku pada lokasi penelitian ini khususnya yang berlaku di ibu kota Kecamatan Dolo dapat digambarkan sebagai berikut :

Di zaman penjajahan kerajaan Dolo dipimpin oleh seorang Magau Dolo yang bernama Dayupamusu. Beliau disamping sebagai Magau Dolo juga merangkap sebagai Ketua SI (Syarikat Islam) di kerajaan Dolo dan daerah sekitarnya. Dalam tindakannya sebagai seorang Magau Dolo Datupamusu selalu menunjukkan sikap yang menentang terhadap kekuasaan Belanda. Beliau selalu membakar semangat pengikutnya untuk tidak mematuhi pemerintah dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang dijalankan di daerah kerajaannya terutama menentang untuk membayar blasteng (pajak) dan melaksanakan kerja paksa (*rodi*). Oleh karena raja selaku Kepala Pemerintahan dan juga merangkap sebagai Ketua Syarikat Islam (S.I) maka hampir semua rakyat yang ada pada kerajaannya masuk menjadi anggota Syarikat Islam, sehingga apapun yang diperintahkan oleh rajanya mereka patuh dan taat melaksanakannya.

Sikap yang menentang dari kerajaan Dolo bersama dengan rakyatnya terhadap kekuasaan Belanda, menyebabkan *Magau* Dolo Datupamusu dipanggil oleh Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Palu untuk menghadap penguasa Belanda dan kemudian pada waktu itu *Magau* Dolo Datupamusu dibujuk agar mau bekerja sama dengan penguasa Pemerintah Belanda.

Dalam hal tersebut akhirnya penguasa Belanda memberikan ultimatum kepada *Magau* Dolo yang isinya sebagai berikut :

”Magau dan kerajaan tetap ada akan tetapi harus keluar dari partai Syarikat Islam atau tetap dalam partai Syarikat Islam akan tetapi Magau dan kerajaan musnah”.

Magau Datupamusu dengan tenang dan ikhlas dan disertai tekad yang bulat menjawab :

”Lebih baik aku dan kerajaan tumbang asalkan aku tetap dalam partai Syarikat Islam yang menegakan persatuan dan persaudaraan.”

Oleh karena itu maka Magau Datupamusu ditangkap dan diasingkan ke Pulau Ternate dengan seorang puteranya

yang bernama Tagunu selama kurang lebih 10 tahun. Saudara sepupunya Gagaramusu diasingkan ke Sangir Talaud dan dua orang sepupunya yang lain masing-masing Datupalinge dan Lapasere dipenjarakan di Palu oleh karena beliau-beliau itu adalah pembantu utama pada staf kerajaan Dolo.

Selanjutnya mengenai periode penjajahan Belanda di desa Bangga yang kami jejak di lokasi diperoleh penjelasan bahwa pada desa tersebut tidak ada lagi kegiatan-kegiatan baik yang bersifat menentang ataupun bekerja sama dengan pemerintah Belanda oleh karena memang pada waktu itu desa Bangga sangat terisolir dari kegiatan-kegiatan kaum penjajah.

c. *Periode penjajahan Jepang.*

Menurut ceritera-ceritera orang tua desa yang diketemukan pada kedua desa sampel penelitian ini mengatakan bahwa pada zaman penjajahan baik Zaman Belanda maupun zaman Jepang kehidupan dalam masyarakat desa cukup aman dan tenteram. Di kalangan warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terdapat solidaritas yang cukup tinggi, cukup makan dan semangat kerja juga cukup tinggi.

Akan tetapi keadaan yang disebutkan itu selalu diiringi dengan adanya wabah penyakit menular yang menjangkiti masyarakat, pakaian dan sandang yang sangat sederhana, dan yang paling menyedihkan adalah pendidikan hampir-hampir tidak ada, bahkan di desa hanya ada sekolah dasar yang hanya 3 tahun. Disamping itu yang sangat dirasakan oleh masyarakat desa pada waktu itu baik pada penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang adalah pembayaran pajak formal yang sangat berat dipungut oleh kedua bangsa penjajah tersebut. Hal tersebut menimbulkan kesengsaraan terhadap masyarakat sehingga pada waktu itu tidak mustail timbul tantangan dari warga masyarakat desa. Namun di kalangan masyarakat desa Kotarindau pada waktu ada orang-orang tertentu yang ingin mencari muka dan menjadi kaki tangan dari pemerintah Jepang, maka terjadilah penangkapan terhadap warga masyarakat desa yang mengakibatkan penyiksaan dan lain-lain hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah Jepang kepada anggota-anggota masyarakat. Apalagi pada waktu itu di Sidera yaitu salah satu desa yang merupakan batas sebelah Timur dari Kecamatan Dolo sedang dilaksanakan pembuatan

lapangan terbang untuk kepentingan perang Jepang. Orang-orang yang dikerahkan untuk pekerjaan itu bukan hanya dari desa Kotarindau bahkan hampir semua orang laki-laki dari desa-desa lainnya secara bergilir didatangkan ke Sidera untuk mengejerjakan lapangan terbang itu. Jadi keadaan yang digambarkan tersebut boleh dikatakan bahwa kehidupan sosial cukup stabil, akan tetapi keadaan ekonomi mengalami stagnasi.

d. *Periode Kemerdekaan*

Dimasa kemerdekaan keadaan di desa pada umumnya dan pada desa penelitian khususnya adalah merupakan masa transisi yang pahit tetapi terkadang nikmat. Hal tersebut menurut informan yang kami wawancarai mengatakan bahwa setelah perang kemerdekaan yang cukup pahit kita lalui itu, maka rakyat di desa bagaikan bangkit dari mimpi dan ikut menikmati alam kemerdekaan. Masyarakat pedesaan bangkit dengan semangat yang menyala-nyala dan secara bergotongroyong mendirikan SD (dahulu disebut sekolah Rakyat). Kehidupan dalam masyarakat pedesaan sudah lebih bervariasi dan sudah terbuka. Sebagian penduduk masyarakat desa di samping mengerjakan usaha pokoknya sebagai petani, adalah yang berdagang keluar masuk desa menuju tempat-tempat pasar dalam menjajakan barang dagangannya bahkan ada yang keluar Kecamatan dimana ada pasar-pasar yang ramai dikunjungi orang.

Kehidupan dalam ikatan sosial lambat laun semakin longgar dan sistim hukum/peraturan adat istiadat yang ketat sering berbenturan dengan sistim hukum yang baru dengan penguasa/pemerintah yang baru. Sistim pemerintah feodal desa diganti dengan sistim Demokrasi. Kepala-kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat.

Banyak anak desa telah dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah-sekolah Menengah dan Atas terutama banyak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Alchaerat Palu ke luar dari Kecamatan Dolo.

Akan tetapi dalam periode kemerdekaan yang diperkirakan dari tahun 1945 sampai enam puluhan itu pada hakekatnya warga masyarakat di lokasi penelitian ini tidak mengalami perubahan yang besar bahkan mereka masih berada da-

lam kehidupan tradisional. Usaha pertanian seperti perkebunan kelapa dan bertanam padi yang merupakan landasan hidup yang paling pokok dari anggota masyarakat tidak mengalami perkembangan apa-apa, baik dari segi jumlah pokok kelapa dan luas tanah yang digarap maupun cara pengelolannya, pada hal jumlah penduduk desa tetap terus bertambah. Penguasa/pemerintah setempat tidak mengadakan penyuluhan. Keadaan yang demikian itu bukan mustahil akan menimbulkan kemiskinan yang tidak nyata tetapi pasti.

4. Latar Belakang Sosial Budaya.

Kaliktive dan Elite-Elite Desa.

Sebelum dibicarakan bagaimana kaliktive dan Elite-Elite pada kedua desa Penelitian ini, maka perlu dikemukakan pendapat dari para ahli ilmu sosial tentang pengertian kaliktive dan Elite-elite yang ada dalam masyarakat yang antara lain : Mayor Polek Hal. 180 dan 181 "Apabila orang berkumpul, maka bangkitlah kesadaran kaliktive yang menaklukkan kesadaran individual. Disamping itu jika ditinjau dari sudut sosial dan faktor kebudayaan, maka secara pyshologis dasar timbulnya suatu kelakuan kaliktive elementer" sering dijumpai suatu keadaan kegelisahan sosial.

Selanjutnya mengenai pengertian Elite-elite di desa adalah anggota masyarakat seperti, orang-orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan/pekerjaan yang oleh masyarakat dinilai sekali (Dr. Phil Astrid S. Susanto hal. 109).

Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut maka di bawah ini akan digambarkan secara singkat tentang kaliktive dan Elite-elite yang terdapat pada kedua desa penelitian sebagai berikut:

Bahwa pada masyarakat desa Kotarindau dan desa Bangga sebagaimana halnya dengan desa-desa lainnya, dalam kehidupan sosialnya juga sering terjadi kolektif atau kumpulan orang-orang banyak baik terhadap terjadi secara sengaja maupun tidak, oleh karena hal tersebut telah merupakan kelakuan umum. Namun kolektieve atau kumpulan-kumpulan orang-orang banyak masih mengikuti aturan permainan yang ada seperti kegiatan/tradisi, dan peraturan-praturan yang telah disepakati bersama. Contohnya adalah orang berteriak-teriak dan bersorak dalam pertandingan sepak bola, volley, ball, takrau dsb.

Kolektive atau kumpulan-kumpulan diskusi dimana para anggota kelompok saling memberikan tafsiran/argumentasi yang saling berbeda antara satu dengan lainnya. Akan tetapi disamping itu dalam masyarakat desa Kotarindau sering terjadi kelakuan kaliktive yang berjalan secara tidak normal dan tidak terorganisir. Contohnya adalah dengan terjadinya suatu peristiwa tabrakan mobil atau motor terhadap seorang anggota masyarakat desa. Keadaan tersebut menimbulkan kegemparan umum atau Collective Exitement sehingga menimbulkan suatu dorongan untuk membalas yang menjurus kepada suatu tindakan kaliktive yang selanjutnya diikuti secara serentak dan tidak rasional memukul supir dan kondekturnya.

Selanjutnya Elite-elite yang ada di desa Kotarindau dapat digambarkan bahwa orang-orang yang kaya adalah mereka-mereka yang mempunyai pohon-pohon kelapa yang jumlahnya ribuan pohon. Pengaruh mereka dalam masyarakat sangat besar baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain. Hal tersebut menurut informasi apabila diantara keluarga tersebut terlambat membayar pajak, maka hubungi saja salah seorang keluarganya yang berpengaruh. Dalam waktu yang relatif singkat semua keluarganya yang terlambat yang membayar pajak akan melunasinya dengan cepat. Sedangkan elite-elite desa lainnya seperti tokoh formal dan tokoh informal serta kaum intelektual yang ada di desa Kotarindau dalam suatu pertemuan/rapat-rapat di desa pada umumnya memberikan dukungan terhadap pembangunan desa baik secara moral maupun secara material.

Stratifikasi sosial

Mengenai stratifikasi sosial pada kedua desa penelitian ini terutama desa Kotarindau dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa stratifikasi Sosial adanya sistim berlapis-lapis di dalam masyarakat Kotarindau menurut pengamatan dan informasi yang diperoleh dari beberapa orang tokoh masyarakat pada desa itu adalah yang menjadi ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut ialah :

1. Ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan atau kebendaan ini dijadikan sebagai ukuran; barang siapa yang memiliki harta

benda seperti pohon kelapa, ternak, tanah, yang banyak ia tergolong dalam lapisan atas. Harta kekayaan tersebut dapat terlihat pada bentuk rumah yang besar dan bagus, cara berpakaian beserta perhiasan yang dipakainya dan isi dalam rumahnya.

2. Ukuran kekuasaan. Hal ini nampak bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang seperti Kepala Desa, Camat, Dan Ramil dan Dan Sektor yang tinggal di desa Kotarindau menempati lapisan yang tertinggi.
3. Ukuran kehormatan. Hal ini terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan dan yang termasuk dalam golongan orang-orang tua atau mereka-mereka mempunyai jasa besar terhadap desa ini.
4. Ukuran ilmu pengetahuan. Di samping kriteria tersebut di atas maka ukuran ilmu pengetahuan juga sangat menentukan bagi status seseorang anggota masyarakat di desa Kotarindau untuk menempatkan dirinya menduduki lapisan atas.

Kriteria atau ukuran yang dikemukakan di atas itu adalah merupakan suatu sistim pelapisan sosial yang terbuka, oleh karena pada masyarakat Kotarindau terbuka kesempatan bagi siapa saja berusaha untuk mendapatkan status lebih tinggi dalam masyarakat. Terutama sekali adalah melalui pendidikan. Seseorang telah bergelar Sarjana maka ia telah mempunyai peluang untuk memperoleh kekuasaan dan kehormatan dalam masyarakatnya.

Sedangkan kalau dibandingkan dengan Desa Bangga maka sistim pelapisan dalam masyarakatnya hanya terdiri dua kriteria yang digunakan yaitu kriteria kekayaan dan kriteria kekuasaan.

Ukuran kekayaan yaitu anggota-anggota masyarakat yang mempunyai pohon kelapa, tanah dan harta benda lainnya, untuk kriteria kekuasaan adalah terutama kepada mereka yang memegang kekuasaan di desa seperti Kepala Desa, Ketua LKMD, LMD dan Iman Mesjid. Anggota-anggota masyarakat tersebut tergolong pada lapisan teratas dalam masyarakat.

Sistim Kekerabatan

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa yang mendiami kedua desa penelitian adalah suku bangsa Kaili. Oleh sebab itu pada suku bangsa Kaili hanya dikenal keluarga batih

dan keluarga luas. Strukturnya terdiri dari ayah ibu dan anak-anak yang belum kawin. Peranannya adalah ayah dan ibu harus dihormati dan dimuliakan oleh anaknya, ayah harus bekerja untuk menghidupkan keluarga batih ini serta dibantu oleh ibu dan anak-anaknya. Di samping itu ibu berkewajiban mengasuh anak-anaknya dan mengurus rumah tangga. Ayah dan ibu berkewajiban pula menentukan jodoh anak-anaknya.

Sedangkan struktur keluarga-keluarga luas adalah terdiri lebih dari satu keluarga batih dan mereka diikat oleh suatu kesatuan sosial yang erat. Biasanya mereka hidup dan tinggal di dalam satu desa yang berdekatan. Anggota keluarga luas ini terdiri dari nenek laki-laki dan nenek perempuan, mertua (laki-laki dan perempuan) ayah dan ibu (keluarga batih), paman dari pihak laki-laki dan perempuan, kemenakan, anak-anak, cucu, ipar, sepupu sekali, sepupu dua kali dan seluruh keluarga yang masih sedarah. Peranannya adalah sama dengan keluarga batih.

Dalam sistem kekerabatan pada keluarga batih dan keluarga luas pada kedua desa ini kesatuan sosialnya sangat erat dan saling menghormati dan saling membantu dalam kehidupan. Dalam hal-hal tertentu seperti mengadakan pesta, selamat dan lain-lain yang menyangkut seluruh keluarga, maka keluarga yang senior sangat memegang peranan penting.

Sistim Ekonomi

Mata pencaharian utama pada masyarakat pada kedua desa yang menjadi lokasi penelitian ini adalah bertani (Sawah, Kebun, dan Ladang). Sawah dan Ladang digunakan untuk menanam padi dan tanaman palawija. Sistim pengolahan sawah masih menggunakan bajak yang ditarik oleh dua ekor sapi. Sedangkan sistim penanaman padi ada dengan cara menghambur dan ada pula pakai pesemaian bibit di tempat lain, kemudian setelah pada waktunya baru dipindahkan dengan cara menanam di persawahan.

Sedangkan perkebunan terutama adalah menanam kelapa. Pengolahan kelapa untuk menjadi kopra adalah dengan cara mengeringkan melalui panas matahari, sedangkan di musim hujan kelapa-kelapa yang telah dibelah dibuatkan tempat sedemikian rupa, kemudian dipanaskan dengan api dari bawah atau dengan kata lain *ditapa*.

Banyak anggota masyarakat yang tertarik pada sistim ijon. Nampaknya sistim ijon belum dapat diberantas oleh karena kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Selain perkebunan kelapa, juga sudah dikenal tanaman cengkeh.

Sistim Teknologi.

Untuk memberikan gambaran tentang sistim teknologi yang berlaku pada masyarakat pedesaan di daerah Sulawesi Tengah umumnya dan pada masyarakat di lokasi penelitian khususnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sistim teknologi yang akan digambarkan adalah sistim teknologi pada bidang perekonomian (pertanian), pada bidang pertukangan dan home industri.

Secara umum mengenai teknologi di bidang pertanian yang berlaku di daerah Sulawesi Tengah masih sebagian besar menggunakan sistim tradisional baik dalam pengolahan sawah seperti menggunakan bajak, sistim injak-injak dengan kerbau dan sistim menghambur bibit langsung di tanah persawahan. Demikian pula mengenai pengairan/irigasi masih sangat terbatas jumlahnya jika dibandingkan dengan areal persawahan yang ada di daerah Sulawesi Tengah.

Sedangkan penggunaan teknologi pertanian yang sudah maju seperti cara menggunakan alat-alat pertanian mini traktor dalam pengolahan sawah masih sangat terbatas jumlahnya. Hal demikian ini hanya diketemukan pada daerah-daerah transmigrasi.

Mengenai sistim teknologi dalam bidang pertukangan seperti membangun rumah /gedung sekolah dan sebagainya juga masih menggunakan cara-cara tradisional. Demikian pula home industri atau kerajinan-kerajinan tangan dalam rumah tangga seperti penenun sarung (sarung Donggala) membuat anyaman dari rotan untuk keperluan rumah tangga juga masih menggunakan cara-cara tradisional.

Khusus pada lokasi penelitian yaitu di desa Kotarindau sistim teknnologi yang digunakan baik pada bidang pertanian, pertukangan, industri Rumah Tangga, maupun sistim teknologi pada bidang lainnya nampak belum ada cara-cara yang baru digunakan, malahan jika hendak mengadakan suatu hajat atau

memulai sesuatu pekerjaan selalu memperhitungkan hari yang baik dan bulan dilangit.

Demikian dalam menghambur padi pertama di sawah selalu diundang orang tua Adat/dukun sebagai penghambur pertama dengan mengadakan upacara sesajin terlebih dahulu. Akan tetapi dengan adanya sistim intensifikasi di bidang pertanian (bimas) maka kedua desa sampel sudah mengenal dan menggunakan pupuk dalam usaha meningkatkan hasil-hasil pertanian. Apalagi dengan ditematkannya PPL (Penyuluhan Pertanian Lapangan) maka pengertian masyarakat di kedua desa tersebut tentang penggunaan pupuk sudah lebih meningkat.

Sistim Religi.

Mengenai sistim religi dalam hal ini akan diuraikan tentang agama yang dianut dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat pada kedua desa penelitian ini. Agama yang dianut pada desa tersebut adalah Islam 100%.

Aliran kepercayaan yang berdasarkan agama, khususnya Islam dikenal adanya aliran Ahlusunnah Waljamaah dan aliran Muhammadiyah.

Pengaruh agama terhadap kehidupan masyarakat cukup tinggi. Sedangkan kerukunan intern umat beragama dengan pemerintah cukup baik.

Dalam hal perayaan dan peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Halal Bil Halal selalu diadakan setiap tahun baik di mesjid-mesjid atau di lapangan terbuka dan selalu dikunjungi masyarakat. Demikian pula dalam hal pembangunan rumah ibadah dan sekolah agama (alchaerat) selalu nampak kegotong-royongan dari masyarakat dan atas prakarsa dari pemerintah setempat.

Tentang kepercayaan yang hidup masyarakat pada kedua desa lokasi penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kepercayaan yang masih hidup dalam masyarakat desa Kotarindau dandesa Bangga nampak pada berbagai upacara adat dalam aspek dewa hidup, upacara adat dalam bidang pertanian dan adat kemasyarakat lainnya : Misalnya di desa Kotarindau masih ada kepercayaan kepada benda-benda sakti kepada rokh-rokh halus, kepada *Tomanuru* tersebut dilakukan dalam suatu upacara keagamaan yang disebut Upacara Balia.

Pada suku bangsa Kaili umumnya dan pada masyarakat di lokasi penelitian ini khususnya masih dikenal 3 macam balia yaitu *Balia Jinja*, *Balia Tampilangi*, *Balia Ntomanuru*. *Balia Tampilangi* khusus diadakan dalam bidang pertanian seperti pembukaan sawah dan ladang serta pada waktu menanam dan menuai padi.

Untuk *Balia Jinja* dan *Balia Ntomanuru* pada umumnya diadakan untuk penyembuhan dari anggota-anggota masyarakat yang sakit.

Dewasa ini macam-macam Balia itu sudah kurang dilaksanakan, namun pengaruhnya dalam masyarakat masih dirasakan.

Sistim bahasa

Bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pada masyarakat suku bangsa Kaili pada umumnya dan pada masyarakat di lokasi penelitian khususnya adalah bahasa Kaili.

Sistim bahasa yang digunakan pada lokasi penelitian ini tidak diketemukan perbedaan yang menentukan kedudukan seseorang apakah bahasa yang digunakannya adalah bahasa raja-raja atau bahasa orang Kaili biasa. Jadi dari segi bahasa tidak dikenal adanya struktur dan pelapisan sosial seperti "bahasa-bahasa raja" pada beberapa bahasa daerah.

Sistim Kesenian

Menggambarkan sistim kesenian yang berlaku pada kedua desa penelitian ini, sebenarnya adalah menggambarkan sistim kesenian yang berlaku pada suku bangsa Kaili pada umumnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu disebutkan beberapa jenis kesenian yang sekarang masih digemari oleh masyarakat terutama masyarakat yang ada pada kedua desa penelitian yaitu desa Kotarindau dan desa Bangga yang antara lain, Kesenian *Dero*, *Rego*, *Jepeng* dan *Vaino* (dewasa ini sudah kurang dilaksanakan oleh penduduk).

Jenis-jenis kesenian tersebut diadakan pada waktu-waktu yang tertentu seperti :

Rego dan *Dero* diadakan dalam pesta tertentu seperti apabila panen jadi atau pesta-pesta adat lainnya seperti *nokeso* dan lain-lain. Khusus *Dero* dewasa ini sudah dipengaruhi oleh *Dero* dari Poso namun tujuan sama yaitu sebagai hiburan baik untuk

yang tua maupun bagi yang muda. Dahulu *Dero* ini diadakan di tengah-tengah sawah dimana panen pada waktu itu sangat berhasil. Dewan adat dari kerajaan merencanakannya dengan mengundang desa-desa yang ada dibawah pemerintahannya untuk mengadakan pesta *Dero* dan di tengah-tengah sawah itu dibuat "*Vunja*".

Vunja ini dibuat dari sebatang bambu besar, kemudian ditegakkan di tengah-tengah sawah. Bersamaan dengan bambu itu digantungkanlah bermacam-macam hasil pertanian kemudian dikelilingi sambil "*Modero*" dengan tarian khasnya dimana tua dan muda ikut bersama-sama *modero* bahkan sampai pagi hari.

Pada kedua desa penelitian ini kesenian *dero* ini dari dahulu sampai sekarang sistimnya sama. Demikian pula kesenian Jepeng pada kedua desa penelitian ini tetap digemari oleh masyarakat bahkan di desa-desa lain dimana kesenian berkembang dan maju selalu diundang oleh masyarakat lain untuk bermain Jepeng di desanya. Kesenian Jepeng diadakan terutama dalam pesta perkawinan dan lain-lain.

Mengenai kesenian *Vaino* dulu diketemukan hampir semua desa pada suku bangsa Kaili. Namun sekarang ini di desa Bangga masih ada sebagian masyarakatnya yang masih menyukai kesenian ini. Kesenian ini diadakan pada waktu pesta ke-dukaan yaitu diantara malam-malam dari hari ke 3 sampai hari kedua puluh malam bahkan sampai ke 40 malam dari si almarhum. Kesenian ini dilagukan oleh antara pria dan wanita sambil bersahut-sahutan dengan syair-syair yang tersusun secara teratur dan pada umumnya merupakan sindiran yang sifatnya membangun. Kesenian *Vaino* ini tidak menggunakan instrument. Selain dari kesenian tersebut masih ada lagi jenis kesenian-kesenian seperti "*Dadendate*" dan Kesenian Kakula (Gamelan).

Pada desa Kotarindau terdapat suatu perkumpulan kesenian yang disebut "*Beringin Jaya*" yang bergerak dalam bidang seni tari terutama tarian daerah Kaili, Vokal Group dan kesenian rebana.

Khusus kesenian "*Dadendate*" maksudnya nyanyian yang dilagukan semalam suntuk oleh dua orang masing-masing satu orang wanita dan satu orang pria silih berganti dengan syair. Syair yang merupakan sindiran. Penyanyinya diiringi dengan

alat kesenian semacam gambus. Penggemar "*dadendate*" ini pada umumnya orang-orang tua dan para pemuda.

Mengenai kesenian "*Kakula*" (gamelan) penggemarnya masih banyak baik masyarakat di desa penelitian maupun di desa lainnya di daerah Sulawesi Tengah. "*Kakula*" hanya terdiri dari satu set peralatan yaitu 15 biji kakula dan 2 tambur serta 1 gong. Pemainnya cukup 4 orang sudah dapat mempergunakan alat tersebut. Pada umumnya alat-alat kesenian tersebut hanya dimiliki oleh orang kaya dan sering dipersewakan apabila ada pesta perkawinan, pesta adat dan lain-lain.

BAB. III

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

1. Organisasi Pemerintahan Desa.

Secara umum desa adalah sebagai suatu daerah hukum yang telah ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang hidup dan mantap pada suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yang disebut Kepala Desa.

Kehidupan penduduk desa umumnya tergantung dari usaha pertanian dan diselingi dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan. Keadaan tersebut akan dijumpai hampir di seluruh tanah air dan merupakan yang unik, namun hal yang demikian itu mempunyai satu kesamaan yaitu strukturnya, lingkungannya dan corak hidupnya.

Selanjutnya untuk membicarakan organisasi Pemerintah Desa maka yang dimaksud adalah satuan organisasi terendah Pemerintah RI yang berdasarkan azas demokrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Wilayah Kecamatan.

Personalia dari satuan organisasi Pemerintah desa disebut Perangkat desa dan mereka bukan pegawai negeri, kecuali kelurahan perangkatnya disebut pegawai negeri. Walaupun perangkat desa pada umumnya dipilih oleh dan dari rakyat/warga masyarakat desa setempat, namun pengangkatannya adalah dari Pejabat Negara yang berwenang seperti Bupati dan Camat setempat.

Pemerintah desa tersusun dalam suatu organisasi yang sederhana mengingat bahwa di desa telah ada lagi instansi atau dinas/jawatan baik yang sektoral maupun yang vertikal. Apalagi kenyataan yang ada di desa bahwa jumlah tokoh masyarakat sudah sangat terbatas jumlahnya.

a. *Struktur organisasi Pemerintah Desa.*

Dalam hal struktur pemerintahan Desa nampaknya sederhana oleh karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat.

Strukturnya terdiri dari 3 unsur masing-masing adalah :

1. Unsur Kepala yaitu Kepala Desa
2. Unsur Pembantu Kepala Desa atau staf
3. Unsur Pelaksana yaitu fungsional dan teritorial.

Selanjutnya mengenai jabatan struktural yang ada di lingkungan Pemerintahan desa adalah terdiri dari jabatan-jabatan :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Pelaksanaan yang terdiri dari beberapa tenaga teknis fungsional dan kepala-kepala dusun.

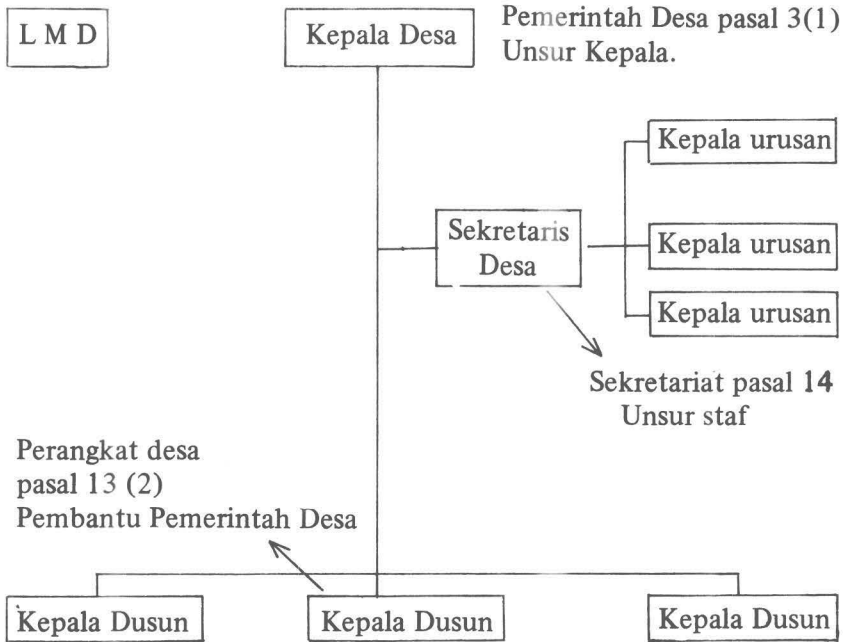
Dalam hal desa yang terdiri dari beberapa kampung/dusun, maka diadakanlah jabatan-jabatan Kepala-kepala dusun.

Di samping jabatan-jabatan struktural itu dimungkinkan pula adanya jabatan-jabatan fungsional, yaitu jabatan-jabatan teknis di dalam lingkungan masing-masing jabatan struktural.

Formasi jabatan-jabatan struktural dan fungsional di kalangan pemerintah desa tergantung dari beberapa faktor antara lain :

- Volume, sifat dan jenis pekerjaan
- Jumlah penduduk yang dilayani
- Luas dan kondisi wilayah
- Kondisi komunikasi
- Kemampuan pembiayaan dan fasilitas.

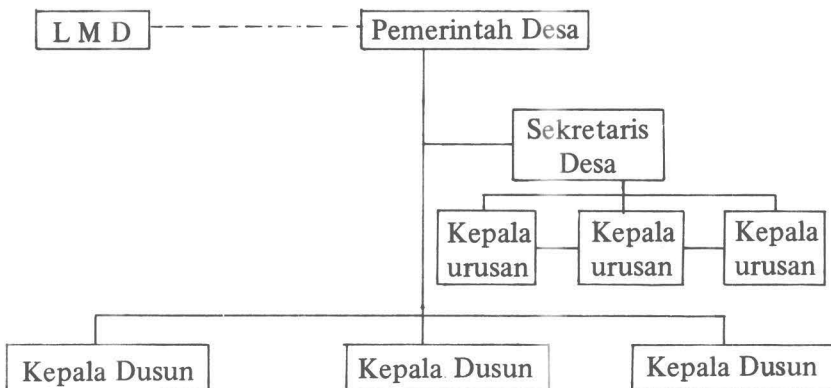
Selanjutnya dalam pasal 3 dan 23 UU nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa berturut-turut ditetapkan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pemerintah desa dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala dusun. Sekretariat desa adalah meliputi sekretaris desa dan Kepala-kepala urusan. Secara institusional hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 1).



Gambar 1. Organisasi Institusional Pemerintah Desa menurut unsur-unsurnya.

Sumber : UU5/1979.

Badan Organisasi Administrasi Pemerintahan Desa



b. *Tugas dan kewajiban :*

Mengenai tugas-tugas dan kewajiban dari organisasi Pemerintahan desa yaitu mulai dari Kepala desa staf dan Pelaksana teknis fungsional dan sektoral maka secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih tinggi.
- Mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah yang lebih atas maupun pemerintah desa sendiri ditaati oleh penduduk dan seluruh warga desa.
- Menyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha dan kegiatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan demi tercapainya daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- Membina ketenteraman dan ketertiban dalam desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang P.4, Pembinaan politik dalam negeri, pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah.

2. **Sistim Kepemimpinan.**

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang data-data mengenai kepemimpinan formal dan kepemimpinan formal tradisional yang berlaku pada lokasi penelitian ini. Namun sebelum hal-hal tersebut dikemukakan beberapa pengertian mengenai kedua hal tersebut.

Para ahli kepemimpinan mengemukakan bahwa pemimpin formal adalah orang secara resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinan, teratur dalam suatu organisasi secara hirarkhi, tergambar dalam suatu bagan/struktur yang tergantung dalam tiap-tiap Kantor. Kepemimpinan formal ini lazimnya tidak dengan sendirinya dapat memberi jaminan bahwa seorang yang diang-

kat menjadi pemimpin formal dalam suatu organisasi akan dapat diterima secara baik oleh anggota-anggota organisasi sebagai pemimpin sesungguhnya. Hal ini masih diuji didalam praktek dan tindak tanduknya dalam memimpin organisasi.

Pemimpin formal ini pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas atau pimpinan yang lebih tinggi. Pada umumnya pemimpin formal ini (formal leader) lebih banyak diketahui dengan istilah "Kepala" seperti Kepala Kecamatan, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Pemimpin formal itu ditetapkan atas dasar legitimasi yang menitik beratkan kepada pendidikan, kecakapan dan pengalaman kerja sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Negara.

Sedangkan kepemimpinan formal tradisional adalah pemimpin yang terjadi melalui saluran administrasi masyarakat dalam daerah pedesaan seperti Kepala mukim, Kepala Kampung.

Pemimpin-pemimpin formal tradisional itu dipilih oleh rakyat berdasarkan tradisi.

Pola kepemimpinan yang disebutkan terakhir ini untuk daerah Sulawesi Tengah pada umumnya ada atau sudah dikenal. Pola kepemimpinan formal tradisional tersebut dalam tulisan ini akan dibahas secara tersendiri, sehingga dapat terlihat secara jelas bagaimana syarat-syaratnya, hak dan kewajiban serta atribut yang digunakannya.

Selanjutnya pola kepemimpinan yang akan digambarkan dalam tulisan ini adalah pola kepemimpinan informal :

Pemimpin informal pada daerah penelitian adalah ketua adat dan anggota-anggota adat lainnya (tokoh-tokoh adat), pemuka-pemuka agama (para ulama, Imam dan pembantu-pembantunya), tokoh-tokoh organisasi sosial masyarakat seperti organisasi pemuda desa, organisasi wanita (PKK) dan organisasi wanita keagamaan (persatuan wanita Islam Alakherat). Adat dilokasi penelitian ini tetap masih terpelihara dengan baik justru peranan tokoh-tokoh adat dan pemimpin informal lainnya berusaha untuk melestarikannya, juga karena adanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan pemimpin formal di desa itu. Dewasa ini pemimpin-pemimpin informal di desa telah dipersa-

tukan dalam wadah yang disebut Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas itu, maka mengenai gambaran umum tentang kepemimpinan yang berlaku dalam lokasi penelitian di desa Kotarindau dan desa Bangga dapat dilaporkan sbb. :

a. *Kepemimpinan Formal.*

Di lokasi penelitian di desa Kotarindau pola kepemimpinan formal berlaku syarat-syarat kepemimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut dapat dibagi atas dua golongan yaitu :

1. Syarat-syarat umum yaitu :

- a. Setia pada Pancasila dan UUD 1945
- b. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan terlarang.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti.
- d. Sehat rohani dan jasmani.
- e. Penduduk desa yang bersangkutan.
- f. Berusia 25 sampai 50 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah.

2. Syarat khusus antara lain :

- a. Memiliki pengalaman dalam tugas-tugas yang menyangkut kepentingan umum secara langsung.
- b. Pernah memegang jabatan pimpinan suatu organisasi/badan atau lembaga kemasyarakatan.
- c. Pendidikan formal sekurang-kurangnya tamat SD atau SMP.

Keberadaan seorang pemimpin formal itu disamping memiliki syarat-syarat tersebut di atas maka harus pula mempunyai faktor-faktor pendukung antara lain :

- a. Memiliki integritas pribadi yang baik dengan sesama warga desa
- b. Taat menjalankan perintah agama
- c. Jujur dan berani
- d. Dipilih dari rakyat, oleh/untuk rakyat.

Syarat-syarat dan faktor pendukung yang telah dikemukakan di atas tersebut pada kedua lokasi penelitian ini nampaknya belum berlaku secara sempurna. Hal tersebut menurut informasi dan observasi yang dilakukan bahwa pemimpin formal pada kedua lokasi penelitian ini terutama dalam hal keberadaannya sebagai pemimpin formal (Kepala Desa) adalah berdasarkan penunjukan dari pimpinan dari atas (Camat atau Bupati) berarti pemimpin formal pada desa Kotarindau dan desa Bangga bukan dipilih dari rakyat oleh/untuk rakyat dalam wilayah desa itu, melainkan atas kemauan/penunjukan dari Kepala Wilayah Kecamatan/Bupati.

Mengenai hak dan kewajiban dari pimpinan formal ini antara lain disebutkan :

Hak dari pemimpin formal atau Kepala Desa baik di desa Kotarindau maupun hak-hak Kepala Desa Bangga menurut data yang diperoleh adalah :

- Mengumpulkan masyarakat (*todea*) untuk melaksanakan gotong royong baik pada jalan-jalan desa maupun pada saluran-saluran air di daerah persawahan.
- Menerima pemberian dari masyarakat sebagai (adat *pekasugia*) dan sekaligus sebagai ucapan terima kasih dari masyarakat atas kepemimpinan yang telah mengayomi kehidupan dalam masyarakat.
- Memberikan pertimbangan terhadap sanksi-sanksi adat yang akan dikenakan pemangku adat kepada warga masyarakat yang telah melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban dari pemimpin formal disini adalah untuk mengayomi seluruh warga masyarakat, melindungi sarana dan prasarana yang ada dalam wilayah desa seperti jalan-jalan, jembatan-jembatan, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan, pasar, saluran air dan tempat-tempat lainnya yang menjadi milik desa.

Selanjutnya Kepala Desa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin formal nampaknya ia mempunyai beberapa jalur antara lain :

1. Jalur ke atas yaitu jalur pemerintah dan laporan dari dan ke Kecamatan.

2. Jalur keluar yaitu jalur konsultasi dan kerja sama dengan desa-desa yang ada di sekitarnya.
3. Jalur ke samping yaitu jalur kordinasi dengan Organisasi-organisasi masyarakat, di tengah-tengah nama Kepala desa memegang peranan koordinatif.
4. Jalur ke bawah adalah jalur pelayanan terhadap seluruh warga masyarakat desa.
5. Jalur ke dalam yaitu jalur perintah dan laporan kepada dan dari unsur staf-staf dan pelaksana (Intern organisasi).

Atribut-atribut/Symbol Kepemimpinan.

Dahulu pada zaman raja-raja berkuasa di wilayahnya masing-masing diantaranya pada zaman kerajaan Dolo masih berkuasa maka yang memiliki atribut/symbol kepemimpinan adalah Magau, Madika Malolo, Madika Matua dan pemimpin formal lainnya (Kepala Desa). Atribut-atribut adalah simbol-simbol kerajaan yang berupa pakaian, rumah dan simbol-simbol lainnya yang membedakannya dengan rakyat biasa (todea). Akan tetapi di zaman kemerdekaan dewasa ini atribut-atribut yang dipakai oleh pemimpin formal/Kepala Desa rupanya sudah diatur secara seragam oleh pemerintah lebih atas.

Atribut/symbol itu terdiri dari pakaian yang bermodel Safari berwarna putih-putih dengan memakai Lencana yang dipasang pada dada sebelah kiri dari pakaian atau baju. Keadaan atribut/symbol itu berlaku untuk seluruh kepala desa baik di lokasi penelitian maupun di luar desa penelitian ini.

Cara Pengangkatan dan Upacara.

Pengangkatan Pemimpin formal/Kepala Desa yang berlaku pada lokasi penelitian yaitu baik di desa Kotarindau maupun pada desa Bangga dapat digambarkan sebagai berikut :

Dahulu prinsip musyawarah mufakat yang telah hidup dan berkembang dalam msyarakat pedesaan dalam hal pengangkatan Kepala Kampung/Desa atau dalam hal melaksanakan pembangunan kampung selalu diadakan pertemuan/rapat yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat sehingga keputusan yang diambil adalah merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat kampung/desa.

Keadaan yang demikian itu sampai sekarang ini masih tetap berlaku terutama dalam hal pengangkatan Kepala Desa. Kepala Desa atau pemimpin formal yang akan menjadi pimpinan dalam desa itu diangkat melalui prosedur pemilihan yang diadakan di Balai Desa atau di Kantor Desa. Pemilihan diadakan setelah calon-calon Kepala Desa telah memenuhi syarat untuk dipilih dan biasanya terdiri dari beberapa orang calon. Setelah pemilihan selesai dilaksanakan maka calon-calon tersebut diajukan kepada Camat/Bupati untuk menentukan siapakah diantara calon tersebut yang berhasil untuk diangkat menjadi Kepala Desa. Biasanya calon yang mendapat suara terbanyak itulah yang diangkat menjadi Kepala Desa. Pengangkatan Kepala Desa yang terpilih adalah dilakukan sendiri oleh Bupati atas nama Gubernur. Pengangkatan/pelantikan Kepala Desa yang baru itu dilakukan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat dan warga desa lainnya.

Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu setelah selesai Pemilihan Umum I pergantian Kepala Desa tidak lagi melalui prosedur yang berlaku bahkan di lokasi penelitian ini di desa Kotarindau sampai sekarang ini Kepala Desanya sudah memegang jabatan kurang lebih 11 tahun dan belum lagi diadakan pemilihan Kepala Desa yang baru, walaupun Kepala Desa sekarang ini adalah bukan hasil pemilihan dari masyarakat desa tetapi langsung ditunjuk oleh Kepala Wilayah Kecamatan Dolo. Sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh dari observasi langsung terhadap keadaan dalam masyarakat Kotarindau bahwa secara terpendam di kalangan pemuka masyarakat telah terjadi benturan-benturan pendapat. Namun oleh karena peranan dari beberapa tokoh masyarakat yang menjalin hubungan diantara mereka sendiri bahkan sampai-sampai ke tingkat Propinsi. Sehingga keadaan tersebut nampaknya biasa-biasa saja.

Sedangkan Desa Bangga lain lagi masalahnya, pergantian Kepala Desa sejak pemilihan Umum yang pertama sudah 3 kali. Dari 3 kali pergantian Kepala Desa ada yang berumur kurang lebih satu dan ada pula yang hanya berusia 8 bulan sudah diadakan lagi pergantian kepala desa.

Kepala Desa adalah kepala desa yang sebelumnya telah menjabat Kepala Desa di Bangga kurang lebih 20 tahun. Dan Kepala Desa sekarang ini tidak dipilih tetapi ditunjuk langsung

dari Kepala Wilayah Kecamatan Dolo. Oleh karena itu pula tidak diadakan upacara pengangkatan di desa. Keadaan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari warga masyarakat mengapa lain yang terpilih tetapi lain pula yang diangkat menjadi Kepala Desa.

b. *Kepemimpinan Formal Tradisional.*

Syarat-syarat Kepemimpinan dan faktor-faktor pendukungnya.

Pemimpin tradisional pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu pimpinan formal dan pimpinan informal. Bentuk pimpinan tradisional adalah demokratis yang bertumbuh dan berkembang atas prinsip kolektif baik dalam pimpinan tradisional formal maupun yang informal.

Dahulu di kerajaan Dolo khususnya dan di kalangan kerajaan-kerajaan umumnya pimpinan tradisional formal terdiri atas dua lembaga legislatif. Lembaga eksekutif di bawah pimpinan *Maradika* atau *Magau* (Raja), sedangkan lembaga legislatif yaitu lembaga dewan Hadat Kerajaan dibawah pimpinan *Baligau*. Kedua lembaga tersebut mempunyai hak yudikatif secara bertingkat, dimana *Magau* (Raja) dapat menerima hak apabila sesuatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh anggota-anggota Dewan Hadat. Akan tetapi dewasa ini khususnya pada desa lokasi penelitian ini yaitu di Desa Kotarindau dan Desa Bangga kepemimpinan tradisional formal peranannya sudah sangat kurang sekali, walaupun pada setiap desa masih ada dewan hadat kampung/desa.

Adapun syarat-syarat pimpinan tradisional formal yang sampai sekarang ini masih diperlakukan adalah :

- Jujur adil serta amanah
- Mempunyai pandangan jauh ke depan.
- Memiliki banyak pertimbangan
- Berwibawa
- Ahli dan cakap
- Sebagai sari teladan
- Berasal dari keturunan raja.

Syarat-syarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh seorang pemimpin tradisional yang baik. Dalam perkembangan sistem pemerintahan sekarang ini maka kedudukan pimpinan tradisional formal seperti *Magau*, *Maradika*, sudah sangat tergeser oleh sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kaum kolonial di zaman Penjajahan Belanda, Zaman Jepang dan setelah kemerdekaan lembaga dewan adat kampung/desa sekarang ini telah menjadi pemimpin informal didalam masyarakat pedesaan.

c. *Hak dan Kewajiban.*

Dahulu pemimpin tradisional formal mempunyai hak-hak sebagai berikut :

Magau (Raja) serta Madika Malolo dan Madika Matua berhak menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum adat kerajaan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Baligau dan ketua-ketua adat di wilayahnya, demikian pula berhak menyatakan perang, menetapkan hari berduka apabila ada keluarga raja yang meninggal, berhak mengumpulkan seluruh rakyat untuk melaksanakan pekerjaan gotong-royong untuk kepentingan kerajaan. Sedangkan pemimpin formal lainnya adalah berhak memberikan pertimbangan kepada raja dan wakilnya melalui madika Matua berdasarkan tugasnya masing-masing. Demikian pula hal dari Baligau yang menekuni lembaga legislatif kerajaan, berhak menyampaikan pengelolaan Hukum adat yang berlaku daerah kerajaan.

Akan tetapi oleh karena dewasa ini pemimpin tradisional formal telah tergeser dan menjadi pemimpin tradisional informal maka hak-hak mereka adalah : menjatuhkan sanksi-sanksi adat kepada warga desa yang telah melanggar norma-norma kesusilaan setelah hal tersebut dimusyawarahkan yang juga dihadiri oleh Kepala Desa, demikian pula berhak memberikan pertimbangan dan teguran-teguran kepada kepala desa dan pemimpin formal lainnya dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa.

Sedangkan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemimpin tradisional formal antara lain

mengayomi seluruh rakyat, melindungi peninggalan-peninggalan kerajaan yang berupa benda-benda bersejarah, mengadakan musyawarah untuk memutuskan perkara yang belum diselesaikan dan memimpin upacara adat yang masih diperlukan.

Atribut/Simbol Kepemimpinan.

Di zaman kerajaan Dolo dahulu yang memiliki atribut adalah *Magau*, *Madika Malolo*, *Madika Matua* dan pemimpin formal lainnya.

Atribut-atribut adalah berupa pakaian-pakaian kebesaran seperti (*Puruka Pajama*) Celana pendek yang agak ketat dan dihiasi dengan benang-benang emas, *Siga* (daster) yang diikat di kepala dan lain-lain atribut yang maksud utamanya adalah untuk membedakannya dengan rakyat biasa (*todea*).

Akan tetapi dewasa ini bagi pemimpin tradisional formal sudah jarang dipakai, kecuali pada waktu-waktu yang tertentu seperti kalau ada pesta adat dari turunan raja dan juga apabila ada penyambutan terhadap tamu-tamu agung yang sangat dihormati.

Cara Pengangkatan dan Upacaranya.

Pada zaman dahulu yaitu sebelum zaman kemerdekaan pengangkatan pemimpin tradisional formal itu seperti *Magau* yang memegang pimpinan tertinggi dalam pemerintahan kerajaan, diangkat melalui musyawarah (*Libu Ntodea*) Dewan Adat Kerajaan. Pemilihan dilaksanakan apabila *Magau* yang memerintah pada waktu itu telah meninggal dunia. Penggantinya adalah dipilih secara selektif yaitu turunan yang memiliki darah biru (asli) baik ayahnya maupun dari pihak ibunya.

Sedangkan pembantu-pembantu *Magau* yaitu *Madika Malolo*, *Madika Matua* dan anggota-anggota pemimpin formal lainnya langsung ditunjuk oleh *Magau* setelah mendapat persetujuan dari Dewan Hadat kerajaan.

Mengenai upacara pengangkatan adalah *Magau* dilantik di *Baruga* Rumah Adat) dengan segala Upacara kebesaran dan biasanya diadakan pesta kerajaan yang dihadiri oleh seluruh rakyat. *Magau* yang dilantik itu diarak berkeliling dan yang melantiknya adalah *Baligau* (Ketua Dewan Hadat).

Akan tetapi dewasa ini yaitu setelah kemerdekaan maka posisi dari pemimpin tradisional formal ini semakin tergeser oleh sistem administrasi nasional yang semakin merata di daerah pedesaan bahwa daerah-daerah terpencilpun sudah dapat dijangkau oleh karena semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu maka pengangkatan pemimpin tradisional formal yang berlaku di desa Kotarindau dan Desa Bangga yaitu dipilih dalam suatu musyawarah desa dan setelah itu diajukan kepada Camat untuk memintakan pengesahannya dan tidak diadakan lagi upacara pengangkatannya.

BAB IV POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDAG SOSIAL

1. Organisasi Dalam Kegiatan Sosial.

Manusia secara membentuk suatu kerja sama (*Orgazed Action*) karena didorong oleh suatu keyakinan bahwa dengan kerja sama itu akan lebih menjamin tercapainya kebutuhan-kebutuhan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dalam proses berorganisasi manusia telah dibekali akal dan perasaan sehingga dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi itu manusia sampai kepada masalah pengaruh struktur formal organisasi terhadapnya, yang selanjutnya akan membawa pembahasan ini meliputi :

- a. Segi formal organisasi sebagai pola kerja sama.
- b. Adanya individu-individu (*human beings*) yang amat menentukan mekanisme kerja sama itu sendiri (David P. Gardner : hal. 67).

Kedua hal tersebut saling berhubungan erat dan mempunyai hubungan pengaruh. Bertolak dari motif pemenuhan kebutuhan suatu mekanisme organisasi berdasar sistem tertentu menjalin prosedur-prosedur kerja secara tertentu, jelas menuntut pula penyesuaian diri manusia sebagai sarana utama.

Di desa Kotarindau organisasi kegiatan sosial terbentuk karena adanya aktivitas-aktivitas anggota masyarakat. Pada mulanya muncul karena dipelopori oleh tokoh-tokoh adat. Dari kelaziman yang menjadi adat istiadat yang kokoh bagi masyarakat desa itu, kemudian timbul gagasan atau keinginan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kemudian memperoleh legitimasi dari pemuka-pemuka (*tetua kampung*) dan pemerintah desa, maka terbentuklah berbagai macam organisasi kegiatan sosial dalam masyarakat baik secara resmi maupun tidak.

Dari data yang diperoleh peneliti di desa itu terdapat lebih dari 10 kelompok organisasi yang pada umumnya berorientasi kepada 4 aspek pokok yaitu :

1. Organisasi perkumpulan petani sawah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan produksi pangan.
2. Organisasi yang berorientasi pada Ideologi politik.
3. Organisasi berorientasi pada aspek keagamaan (Amal jariah dan amal sholeh).
4. Organisasi yang berorientasi pada aspek hiburan dan lain-lain.

- 1.1. Organisasi yang pusat kegiatannya berorientasi bidang produksi pangan seperti petani sawah kebanyakan dipimpin oleh Kepala Keluarga (orang tua) dalam mengolah tanah pertanian.

Organisasi perkumpulan semacam ini tersebar di 5 RT/RK dan setiap kelompok masing-masing mempunyai 25 anggota.

Susunan kepemimpinan hanya terdiri dari Kepala (*"balengga"*) dan satu orang *"suro"*. Artinya satu orang pimpinan dan satu orang penghubung, serta anggota-anggota. Organisasi perkumpulan ini secara tradisional telah berlangsung sejak tahun 1970. Kepala kelompok tidak dipilih tetapi penunjukan biasa tokoh petani itu sendiri yang dipandang jujur dan tertua umurnya dan kaya. Keanggotaan diambil dari mereka yang humanya saling berdekatan. Tempat dan kegiatan mengolah tanah sawah dan perkebunan dilaksanakan secara bergilir baik dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di desa itu.

Status keanggotaan organisasi ini tidak jelas, karena tidak mempunyai anggaran dasar atau peraturan lainnya. Syarat-syarat keanggotaan dan aturan perubahan keanggotaan juga tidak ada jadi perkumpulan yang demikian ini hanya melaksanakan kegiatan semata-mata untuk kepentingan individu dalam suatu wadah yang mereka bentuk. Dan menentukan perkumpulan ini hanya secara kebetulan dengan pertimbangan jika secara bergilir untuk mengolah sawah dapat menjadi ringan dan tidak memakan waktu yang lama. Seperti pepatah lama mengatakan, *berát sama dipikul ringan sama dijinjing*. Gotong royong dalam melaksanakan tanah pertanian

sama dikenal oleh daerah ini umumnya dengan sebutan "posangu", atau "sintuvu", artinya persatuan.

Organisasi perkumpulan Petani sawah ini karena tidak mempunyai anggaran dasar dan peraturan, maka terdapat kebebasan para anggota dalam meningkatkan pola pertanian. Kebebasan dalam mengolah tanahnya masing-masing misalnya pemeliharaan tanaman dan pemupukan tetap mendapat petunjuk dari PPL Pertanian dan Petugas lainnya. Mereka mengumpulkan dana untuk membeli pupuk di Kota.

Berbeda halnya dengan organisasi yang sudah mempunyai anggaran dasar dan peraturan dan anggaran rumah tangga, para anggotanya terikat dengan struktur organisasi dalam suatu sistem kerja sama.

Kebebasan kelompok anggota petani sawah itu bukan kebebasan semaunya anggota, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab akan kehidupan organisasi dan kesejahteraan hidup mereka.

Tujuan yang ingin dicapai oleh perkumpulan/organisasi itu ialah kesejahteraan semua anggota dan masing-masing anggota mengambil haknya atas hasil tanah persawahan itu. Hanya saja kalau mereka memulai mengolah tanah pertanian itu atau memberi pupuk pada tanaman dan pembasmian hama tanaman, mereka selalu meminta petunjuk dari dinas pertanian Kecamatan Dolo dan tenaga PPL di desa itu.

Dari 5 kelompok organisasi petani sawah di desa itu seluruhnya 125 anggota yang dikoordinir seorang tokoh berpengaruh di desa itu. Tokoh pemimpin mereka ini dianggap mampu dan kaya telah mendorong perkumpulan itu kearah kemajuan. Tokoh masyarakat ini berperan selaku pemberi nasehat-nasehat dalam suatu upacara adat panen.

- 2.1. Organisasi yang berorientasi pada Ideologi Politik.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi politik di desa itu adalah aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat pada umumnya khususnya

pada masyarakat yang menjadi anggota organisasi politik yang bersangkutan.

Partai Politik yang ada di desa itu sejak Kemerdekaan ialah Partai Serikat Indonesia (PSII) Nahdatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) Ketiga Partai ini berusaha menarik sebanyak mungkin orang untuk menjadi anggota partai.

Susunan kepemimpinannya sudah jelas karena ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman dari organisasi politik itu.

Keanggotaan dan syarat-syaratnya semuanya tercantum dalam AD dan ART sehingga tidak menyulitkan bagi kegiatan organisasi itu dalam masyarakat. Hanya saja disini sering timbul konflik kalau menghadapi Pemilu karena berbagai tehnik dan propaganda digunakan untuk menarik jumlah anggota.

Kepemimpinan dalam partai politik ini sangat berpengaruh dalam masyarakat dan sampai sekarang masih terasa walaupun sudah diadakan fusi partai, sehingga partai yang ada di desa itu dewasa ini yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (GOLKAR).

Jelas bahwa kehidupan kepartaian dan kegiatan politik di desa itu turut mempengaruhi gerak pembangunan desa dan elite politik dalam masyarakat dapat memanfaatkan kekuasaannya selaku pemimpin dalam kegiatan sosial masyarakat.

Tokoh-tokoh partai politik sangat mempunyai pengaruh besar di desa itu. Karena laju pertumbuhan politik di Indonesia semakin mantap, yaitu hanya dua parpol dan Golkar, maka tokoh-tokoh partai banyak beralih menjadi anggota Golongan Karya dan masyarakat di desa itu sebagian besar ikut masuk Golkar. Sehingga pada Pemilu tahun 1981 kemenangan mutlak pada Golkar. Nah disinilah para tokoh partai tadi setelah masuk Golkar dan menang dalam Pemilu maka tokoh tadi mendapat kesempatan duduk dalam DPRD Kabupaten maupun DPRD Tingkat I. Dan nampaknya tokoh pemimpin di desa itu ada menjadi anggota DPRD Tingkat I

Sulawesi Tengah. Mobilitas politik dari anggota senantiasa diadakan ditingkat Ibu Kota Kecamatan Dolo. Pendidikan kader-kader Golkar dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya setiap tahun berlangsung dengan lancar.

- 2.2. Organisasi "ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA" (AMPI) yang bernaung di bawah Golongan Karya juga mengadakan kegiatan sosial masyarakat di desa itu.

Susunan pengurus dan keanggotaan sudah jelas ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMPI. Organisasi AMPI ini berpusat di Jakarta.

Sasaran turut membantu pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Partisipasinya lebih menonjol pada pembinaan generasi muda. Organisasi AMPI tersebut mendapat legitimasi dari pemerintah daerah Kabupaten mengenai pembentukannya dan pemerintah mendapat instruksi dari Bupati Kepala Daerah.

Pembinaan kader-kader pembangunan desa melalui wadah AMPI sering diadakan konsolidasi kedalam organisasi dan anggota-anggota mendapat bimbingan dari AMPI Kabupaten Donggala. Kepengurusan AMPI tersebut terdiri dari Ketua, Wakil-wakil ketua, Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris, Bendahara dan wakil Bendahara, dilengkapi seksi-seksi dan pembantu lainnya. Pengurus dipilih dari pemuda di desa itu dan secara resmi dilantik oleh AMPI Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala.

- 3.1. Organisasi yang berorientasi pada aspek keanggotaan (amal jariah dan amal saleh).

Organisasi kelompok Amal dimana perkumpulan ini sudah lama ada sejak dahulu kala. Gerakan perkumpulan dahulu dipelopori oleh tokoh Adat, tokoh agama yang berlangsung secara tradisional. Akan tetapi dewasa ini kepemimpinan itu selain dipimpin oleh tokoh tua juga sudah melibatkan tokoh-tokoh agama yang muda usia.

Kelompok perkumpulan ini sasaran utama kegiatannya ialah pembangunan sarana dan prasarana ibadat dan

rukun kematian. Kalau dahulu susunan kepemimpinan hanya terdiri dari satu orang dan dilengkapi beberapa orang pembantu-pembantu. Sekarang susunan kepengurusannya terdiri dari Ketua dan wakil-wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi serta pembantu-pembantu, dan ditambah penasehat. Karena perkumpulan ini ditandai oleh hubungan langsung antara anggota-anggotanya, banyak keakraban dan agak kekal.

Keanggotaan perkumpulan tersebut nampak jelas yang dapat dikatakan maju karena sudah peraturan baik berazas agama Islam maupun petunjuk hadis dan Al Qur'an tentang pembagian zakat amal dan lain-lain, serta dukungan dari sebuah panitia pembangunan sarana ibadah didesa itu.

Kepanitiaian dengan susunan pengurus serta kegiatan fungsi-fungsinya nampak ada keterikatan anggota dalam mengemban organisasi amal ini. Sebab menurut pandangan dari beberapa tokoh agama ustaz di desa itu pengaruh bidang keagamaan, khususnya agama Islam masih besar sekali, karena penduduk desa itu 100% beragama Islam. Jadi perkumpulan amal itu keanggotaannya tidak banyak syaratnya tetapi siapa saja yang sadar akan beramal maka mereka masuk anggota. Aturan-aturan perobahan atau pergantian anggota dan pemimpin dilaksanakan sesuai perkembangan amal itu melaksanakan tugas organisasi atau lembaga sosial desa. Nampak pola-pola aktivitas tersusun baik dalam menjalankan fungsi kegiatan bidang sosial masyarakat.

Sebagai contoh : dikemukakan di sini bahwa andaikata ada warga meninggal dunia, maka serempak anggotanya datang membantu berupa uang atau beras, melalui pengurus perkumpulan amal itu. Kalau ada anggota yang belum sempat memberi bantuannya maka pengurus menagihnya. Jadi berdasarkan ketentuan organisasi sudah tentu anggotanya terikat. Sering pula dilaksanakan iuran tiap bulan untuk mengisi kas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok seperti ini dapat digolongkan kelompok primer dalam kegiatan sosial masyarakat karena terjadi hubungan-

hubungan persahabatan dan persaudaraan luas.

Orientasi kegiatan perkumpulan itu berpusat di desa itu dan juga sampai keluar desa yang terdekat, dilaksanakan berkelompok maupun secara sendiri-sendiri yang pada dasarnya bermotifkan amal jariah dan amal saleh. Tujuan yang ingin dicapai dari perkumpulan amal itu ialah tercapainya pembinaan keagamaan, khususnya agama Islam di desa itu dengan baik dan maju.

Organisasi-organisasi yang terhimpun dibidang amal ini ialah remaja masjid, pengajian-pengajian muda-mudi, pengajian lainnya, rukun kematian, dan panitia Pembangunan sarana Ibadat.

3 Perkumpulan Olah Raga dan Kesenian.

Perkumpulan Olah Raga dan Kesenian di desa Kotarindau nampak sangat cepat pertumbuhannya. Kegiatan organisasi itu dipelopori oleh kaum muda. Perkumpulan-perkumpulan olah raga dan kesenian itu muncul setelah adanya gagasan pemerintah membentuk Karang Taruna yang disponsori oleh Departemen Sosial.

Selang dua tahun terakhir kegiatan perkumpulan anak muda itu memunculkan berbagai jenis cabang olah raga dan kesenian seperti sepak bola, volly Ball, Sepak Takrawa, catur, Badminton, Pencak Silat, Tennis meja dan lain-lain. Sedang perkumpulan bidang kesenian antara lain : vokal group, Zamrah/rebana, tari-tarian daerah dan lain-lain.

Susunan kepemimpinan dari berbagai macam kelompok organisasi tersebut nampak sudah mulai baik sebagaimana dituntut oleh suatu organisasi yang maju. Dalam kepengurusan organisasi tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan dilengkapi seksi-seksi serta beberapa orang pembantu-pembantu, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pengurus dipilih dari oleh mereka sendiri dengan syarat-syarat berpendidikan, mempunyai pengalaman, dipercaya dan punya kemampuan memimpin organisasi.

Keanggotan terikat dengan suatu peraturan dan anggaran rumah tangga organisasi yang mereka susun sendiri, seperti Iuran bulanan anggota dan bantuan yang tidak mengikat. Di

sini nampak jelas bahwa pengaruh organisasi sebagai suatu sistem kerjasama terhadap anggota-anggotanya.

Keanggotaannya terdiri dari para pemuda di desa itu dengan tidak ada pembatasan, tetapi menurut tingkatan bakat dan ketrampilan masing-masing individu. Jadi yang membedakan hanya kemampuan dari masing-masing anggota, jika ada orang mempunyai ketrampilan tiga jenis olah raga, maka dia mengikuti semua kegiatan dimasing-masing perkumpulan itu. Jadi tidak aneh jika ada seorang anggota memasuki 3 buah organisasi bahkan ada pengurus memimpin tiga organisasi. Hal itu disebabkan kurangnya tokoh berpendidikan dan berpengalaman khususnya tokoh pemuda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkumpulan olah raga dan kesenian selain pembentukannya disponsori oleh pemerintah desa juga mendapat dukungan dari Departemen Sosial dan Departemen P dan K Tingkat Kecamatan Dolo dan perkumpulan Remaja mesjid disponsori oleh K U A Kecamatan.

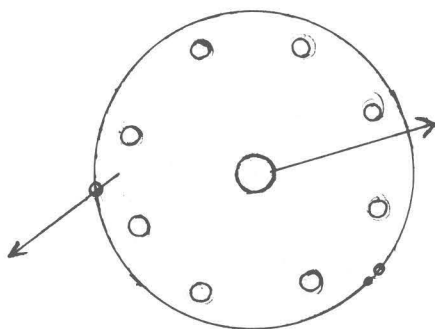
Melihat susunan kepemimpinan organisasi yang berorientasi pada aspek huburan ini nampak dua pola sistem yaitu ada pengurus yang dekat dengan tokoh masyarakat (kaum tua) yang senantiasa dapat menyetir kegiatan dari luar. Nampak anggotanya merasa paling dekat dengan pimpinan, serahasia, sekeluarga dan berbeda-beda kedudukannya.

Jadi disini semacam terdapat kelompok kecil dalam suatu kelompok besar (kelompok dalam atau in-group). Sedang ada anggota-anggota lainnya kurang akrab dimasukan dalam kelompok luar atau out-group. Akan tetapi bila menghadapi pertandingan Olah Raga dan Kesenian, maka kelompok luar tetap akan bersatu.

Dari pengamatan penulis, kegiatan Organisasi kemasyarakatan dibidang Olah Raga dan kesenian itu selalu diawasi oleh tokoh tua (*tetua kampung*) dari luar dan tetap memberikan konsep-konsep serta nasehat tentang pengembangan organisasi sosial itu.

Sebagai contoh dapat dianalisa dalam gambar berikut :

Berbagai organisasi sosial dibidang Olah Raga dan Kesenian,
Desa Kotarindau



Kelompok besar para anggota-anggotanya.

Kelompok kecil in-group duduk dalam pengurus tetap disetir oleh tokoh masyarakat dari luar organisasi.

Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap kelompok organisasi itu mempunyai tujuan masing-masing sesuai bidangnya mengingat perkembangan bakat dari masing-masing anggota. Akan tetapi kelompok kecil (in group yang ada duduk dalam kepengurusan memegang peranan dengan segala peraturan dan program kerjanya.

Secara hipotesis dalam penelitian ini bahwa pengembangan/pembinaan personality didukung oleh kecenderungan-kecenderungan berikut :

- a. Anggota atau individu cenderung berkembang dari keadaan pasif menjadi aktif (self initiative self determination).
- b. Anggota atau individu-individu itu cenderung berkembang dari keadaan ketergantungan pada orang lain menjadi berdiri sendiri.
- c. Anggota atau individu dari organisasi itu cenderung berkembang dari keadaan memiliki cara yang terbatas menjadi berkesanggupan menggunakan bermacam-macam cara dalam menyelesaikan sesuatu.

Dan masih banyak lagi kecenderungan-kecenderungan individu masyarakat itu yang melibatkan diri dalam organisasi/perkumpulan di desa. Akan tetapi manakah organisasi/perkumpulan itu pengaruhnya sudah mulai kurang, maka diadakanlah kegiatan pertandingan-pertandingan persahabatan seperti pertandingan sepak bola antar desa, volly ball dan lain-lain cabang olah raga. Keadaan yang demikian maka pengaruh struktur organisasi tetap bertahan dan kuat.

Tempat kegiatan dari organisasi/perkumpulan olah raga dan kesenian itu selain di desa Kotarindau juga keluar desa. Disini nampak rasa persatuan dan peranan tokoh pimpinan makin besar dalam pembinaan generasi muda desa.

Tujuan yang ingin dicapai ialah adanya pembinaan generasi muda dalam peningkatan bakat dan ketrampilan. Kegiatan olah raga dan kesenian itu pula bertujuan menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong royong generasi muda dalam pembangunan desa.

ORGANISASI PERKUMPULAN DI DESA KOTARINDAU

No.	Kelompok	Jum. Anggota	Orientasi Kegiatan
1.	Petani Sawah	125	Produksi pangan
2.	Petani Amal	100	Sarana Ibadat
3.	Rukun Kematian 5 RT	125	Arisan/Dana bantuan Kedukaan.
4.	Kesenian (Muda-mudi)	75	Tarian Daerah/Hiburan amal.
5.	Arisan Ibu-Ibu PKK	75	Kesejahteraan Anggota dan lain-lain
6.	Olah Raga Sepak bola dan takraw bimbingan/Volly vall	55	Olah Raga/kompetisi persahabatan antar warga desa.
7.	Kerajinan tangan sulam menyulam (Ibu-ibu PKK)	25	Produksi kerajinan untuk kesejahteraan anggota.
8.	Vokal Group	25	Pertandingan antar desa.
9.	Rebana/Zamrah	15	Hiburan-hiburan
10.	Tukang Kayu	25	Gotong Royong perbaikan bangunan desa dll.

No.	Kelompok	Juml.Anggota	Orientasi kegiatan.
11.	Remaja mesjid	75	Bantuan/ partisipasi pada pembangunan sarana Ibadat, dan pengajian-pengajian.

Pada umumnya organisasi sosial di desa itu melaksanakan kegiatan-kegiatan secara temporer. Didalam kelompok organisasi perkumpulan tersebut di atas, ada orang mempunyai kedudukan tertentu (status) terhadap anggota lainnya. Juga kelompok yang satu mempunyai kedudukan tertentu terhadap kelompok-kelompok lain secara keseluruhan.

Kedudukan tersebut banyak sangkut pautnya dengan peranan pemimpin. Sehingga ada pemimpin mempunyai banyak kedudukan di dalam organisasi di desa itu. Jumlah kelompok-kelompok perkumpulan di desa itu melahirkan pemimpin tidak sama karena dipengaruhi oleh kader atau bobot organisasi itu. Misalnya dalam kelompok kesenian dan olah raga dia dihormati karena dia menjadi ketua, tetapi dalam kelompok rukun kematian dia menjadi anggota. Jadi kedudukan seseorang dalam masyarakat berbed-beda, tergantung dari kedudukan sosialnya dalam masyarakat.

2. Sistem Kepemimpinan.

Berdasarkan data dari adanya organisasi sosial didalam kegiatan masyarakat di desa Kotarindau yang seluruhnya berjumlah lebih dari sepuluh buah. Dari 10 buah organisasi perkumpulan, yang berorientasi kepada 4 aspek kegiatan yaitu produksi pangan, politik, Amal dan Hiburan telah memperhatikan sistem kepemimpinan yang saling berbeda-beda. Hal itu karena dipengaruhi oleh struktur organisasi itu sendiri.

Hasil organisasi perkumpulan telah meningkatkan prediction kearah pola pembagian kerja sangat membawa pengaruh. Hal ini akan menimbulkan keterlibatan para anggota.

Dimuka telah diuraikan kecenderungan-kecenderungan para anggota dan ingin bekerja sama sesuai tuntunan organisasi.

Namun banyak problem didalam organisasi kegiatan sosial masyarakat.

Peneliti melihat ada tiga hal utama penyebab ketidak bebasan dalam situasi tertentu seperti :

- a. Pengaruh struktur formal organisasi.
- b. Melekatnya sifat directive didalam kepemimpinan dan
- c. Adanya menegerial controis dari incentive (iuran anggota, waktu dan lain sebagainya).

Bentuk demikian akan menjelma dalam suatu sistem komando organisasi. Akan sistem komando buat perkumpulan-perkumpulan kegiatan sosial masyarakat di desa belum bisa diterapkan secara kontinu.

Sebab ada anggapan masyarakat, mereka tidak mau dikomando-komando. Sebagai contoh : Perkumpulan Petani sawah hanya menciptakan sistem kepemimpinan yang tradisional yang diwarnai oleh religi, kesukuan dan golongan.

Sifat-sifat kepemimpinan masyarakat yang terdapat di desa Kotarindau dan desa Bangga ialah :

1. Pemimpin paternalistis (Kebapaan)
2. Kharismatis
3. Demokratis.

Ketiga sifat pemimpin tersebut merawat pada semua bentuk organisasi tetapi sifat-sifat yang lebih menonjol ialah "kebapaan" yang paling berbeda-beda pula sasaran kegiatannya. Misalnya kelompok petani sawah kalau ditinjau dari sudut peranan sehubungan dengan perubahan sosial, maka pemimpin bersifat tradisional terdapat disana. Kepemimpinan pada kelompok petani sawah ditandai dengan status sosial berbagai faktor pendukungnya.

Pemimpin paternalistis semacam terjadi hubungan anak dan bapak karena kelompok organisasi terjadi dari kalangan keturunan besar dari satu rumpun warga di desa itu. Walaupun sudah dimasuki alat modern misalnya hiburan Band dan folk song dan lain-lain tetapi kelompok ini tetap permanen. Pola administrasi dan manajemen organisasi tidak begitu dipatuhi sebab dalam organisasi di desa itu pada umumnya berlangsung hubungan-

hubungan informal antara fungsi-fungsi dalam hirarki organisasi pemuda dalam mengadakan rapat-rapat sering undangan hanya disampaikan dari mulut kemulut setiap anggota (lisan). Pemimpin kharismatis terjadi karena hubungan darah/turunan sehingga di desa itu terjadi pemunculan-pemunculan pemimpin dari kelompok turunan *maradika* (raja). Ini terjadi pada situasi tertentu sehingga kharismatis itu melekat. Tetapi nampaknya pemimpin kharismatis ini mulai meluntur sedikit demi sedikit. Karena Kepala Desa Kotarindau sendiri mengatakan "sekarang ini tidak ada lagi disebut "madika" atau "maradika". Memang benar apa yang dikatakan Kepala Desa itu, tetapi pengaruh dari keturunan itu tetap ada (pengaruh simbol raja) apalagi anak turunannya menjabat sebagai Kepala Pemerintah Kecamatan. Sehingga di desa kriteria kharismatis masih tetap menjadi syarat bagi pemilihan pemimpin di desa itu, (ditekankan pada orangnya siapa, anak siapa dan asal usul keluarganya atau silsilah).

Sifat pemimpin Demokratis; seperti keluwesan, dan keterbukaan, suka bermusyawarah dengan para anggota dan masyarakat. Juga mau menerima kritikan. Di sini nampak pada generasi muda pada organisasi perkumpulan sepak bola dan kesenian lainnya. Akan tetapi management tradisional berlaku disana. Contoh undangan rapat-rapat anggota sering disampaikan dari mulut-kemulut (secara lisan) melalui anggota. Hak-hak anggota dijamin sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, misalnya mengeluarkan usul saran dan pendapat.

Kalau kebapaan tadi hanya mengandalkan kemampuan bila sudah tiba masa maka tiba pula akal, yang penting menurut mereka asalkan dananya ada maka kegiatan organisasi akan bisa jalan.

a. Syarat-syarat dan faktor pendukung.

Mengamati syarat-syarat bagi seorang menjadi pimpinan organisasi di desa itu, nampak terdapat campuran yaitu dilihat dari segi formal dan nformal.

1. Segi formal misalnya seseorang yang dipilih harus memenuhi syarat yaitu : berpendidikan, pengalaman kerja kecakapan pribadi dan sebagainya.
2. Segi informal seseorang dipilih menjadi pimpinan yaitu ia

dapat dipatuhi, disegani, dapat diteladani dan menjadi sumber bertanya/pertukaran pikiran bagi pihak yang dipimpin.

Kedua macam syarat tersebut dipakai pada pemilihan pimpinan di desa itu. Hanya saja terdapat perbedaan yaitu kalau organisasi/perkumpulan itu beranggotakan generasi tua maka persyaratan kepemimpinan jatuh pada butir (2). Namun didalam organisasi LKMD, PKK, dan LMD, persyaratan yang dituntut sesuai organisasi modern tidak semuanya diberlakukan, sebab di desa itu masih kurang pemimpin yang berpendidikan tinggi. Dari data diperoleh klasifikasi kepemimpinan hanya tingkat SMP dan SMA sedang Sarjana Muda (BA) sangat sedikit sekali. Apalagi di desa Bangga persyaratan kepemimpinan berbeda pada butir 2. Oleh karena di desa Bangga kurang sekali tamatan SMP dan SMA.

Kegiatan organisasi perkumpulan secara temporer kecuali perkumpulan petani sawah, dan Panitia pembangunan sarana Ibadat.

Faktor Pendukung :

Faktor-faktor yang mendukung dalam sistem kepemimpinan sosial di desa itu ialah :

a. Status sosial dengan kriteria yang sangat berpengaruh

- (1) Keturunan (keluarga bangsawan/raja)
- (2) Kekayaan
- (3) Pendidikan.

Perlu ditegaskan di sini bahwa sehubungan dengan status perlu diingat hal-hal berikut ' kepemimpinan informal dan formal, telah ditemukan oleh peneliti bahwa bila seseorang memiliki status sosial tinggi dia akan mendapat transfer status suami/Bapak. Jadi disini nampak keturunan atau karena pewarisan kedudukan sebagai pemimpin. Akan tetapi faktor yang mendukung tentang kepemimpinan di desa itu ialah keturunan, keayaan, dan yang menjadi pemimpin biasanya laki-laki karena kaum pria mempunyai sifat-sifat pemberani dan kuat. Hal tersebut seperti kepemimpinan masyarakat di desa pembanding (Bangga). Salah

satu faktor yang dianggap penting oleh mereka ialah pemimpin berani dan keturunan mempunyai nilai-nilai yang tinggi di desa itu.

Hak dan Kewajiban

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa organisasi/perkumpulan sudah memperlihatkan kepemimpinan yang baik. Disini dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

1. Para anggota berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik yang dapat menambah serta menaikkan materi maupun yang bersifat spiritual.

Hak Anggota :

- a. 1. Hak untuk mengeluarkan pendapat dan membela diri.

2. Hak untuk memilih dan dipilih

b. Kewajiban Anggota :

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

2. Membayar uang pangkal dan Iuran Perkumpulan.

Kewajiban-kewajiban Pengurus :

1. Mengurus soal-soal organisasi kedalam dan keluar. Kalau kedalam ialah sering diadakan konsolidasi dan perbaikan tata aliran hubungan para Pengurus.

2. Berusaha mengkoordinir, mendorong dan membantu segala kegiatan yang dapat meningkatkan kehidupan anggota dalam bidang materi dan spiritual. Juga mengusahakan dana-dana untuk kepentingan organisasi.

3. Latihan-latihan sering diadakan bagi para anggotanya.

Sistem tersebut berlangsung pada semua organisasi yang sudah maju seperti partai politik, organisasi massa, dan perkumpulan lainnya tetapi tidak semua berlangsung secara kontinu. Biasanya berlangsung secara temporer misalnya perkumpulan sepak bola kalau mengadakan amal pem-

bangunan Mesjid maka diadakan bantuan/sumbangan dana dari para anggota dalam suatu kepanitiaan.

Jadi ada hak dan kewajiban para anggota terbatas dari kemampuan masing-masing perkumpulan pada kegiatan tertentu pula.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin organisasi perkumpulan di desa semuanya ingin memajukan kelompoknya. Sehingga disini kebijakan-kebijakan yang ditempuh saling berbeda-beda.

Pada kelompok petani sawah misalnya, sistem kepemimpinan tradisional nampaknya tidak mengenal perencanaan yang matang koordinasi dan lain sebagainya. Hanya dikenal disini ialah hak kebersamaan sebagai anggota perkumpulan. Mengenai kewajiban seperti yang bersifat material seperti kesempatan melaksanakan pekerjaan gotong royong disawah. Tetapi pemimpin tetap mempunyai kekuasaan mengarahkan anggotanya dan para anggota berhak pula memberi saran dan pendapat.

Di dalam organisasi yang berorientasi pada politikpun disini hak dan kewajiban para anggota tidak begitu berlaku secara kontinue seperti iuran anggota tidak dijalankan. Akan tetapi didalam masalah pengambilan keputusan partai politik selalu menggunakan hak-hak kepengurusannya dan memberikan pula kesempatan para anggota untuk bertanya/ajukan usul dan sebagainya. Sedang organisasi/perkumpulan yang berorientasi pada Amal disini nampak hak dan kewajiban anggota (umat beragama Islam) patuh dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban membayar iuran amal Jariah setiap bulan dipungut dari para anggota. Iuran Hukum kematian yang merupakan kewajiban para anggota setiap bulan dipungut.

Organisasi perkumpulan bersifat hiburan, hak-hak para anggota turut ambil bagian dalam latihan-latihan olah raga, kesenian dan lain sebagainya. Sedang kewajiban-kewajiban yang bersifat material dana keuangan tidak mengikat.

Kalau hak-hak dan kewajiban pimpinan nampak jelas seperti merencanakan kebijaksanaan, pengambilan keputusan

keputusan, mengorganisir para anggota dalam suatu pekerjaan, dan mengawasi.

Khusus organisasi keolah ragaan, disini pimpinan dan wakil serta seksi-seksi semuanya berkewajiban melakukan kegiatan masing sesuai seksi-seksinya. Mereka menggunakan sebuah proses dimana ditetapkan struktur dan alokasi jabatan-jabatan. Jadi semacam proses mengkoordinir menggerakkan (Actuating) memberikan motivasi (Motivating) dan lain sebagainya.

Kalau dimuka telah diungkapkan kepemimpinan tradisional keluarga petani sawah, disini nampak bentuk kewajibannya ialah "memberikan teladan, merangsang dan mengambil prakarsa, dan bertindak memiliki kesadaran tentang tanggung jawab terhadap kelompok. Dan faktor hubungan antara anggota dijalankan, sebaik-baiknya, sehingga kelompok petani sawah tersebut dijadikan kenyataan yang hidup.

Atribut/Symbol Kepemimpinan :

Atribut dan simbol Kepemimpinan yang dipakai oleh seorang pemimpin didesa penelitian ini adalah : Siga warna merah (Ikat kepala yang ditaburi manik-manik), celana merah yang disebut *Pajama* (celana pendek) dan sarung sutera kuning. Kemudian dengan tanda kebesaran lainnya seperti : Guma (alat perang semacam kelewang panjang), Kaliavo (perisai) dan Tombak berbulu. Atribut/symbol kepemimpinan tersebut hanya berlaku pada pemimpin organisasi yang bersifat tradisional saja sedangkan pada organisasi lainnya tidak berlaku. Pemimpin ini disebut tandulako.

Cara pengangkatan dan upacaranya : dinobatkan, dihadiri oleh umum dan pejabat pemerintahan, di desa itu dan cara tersebut dikenal diseluruh wilayah Kecamatan Dole.

Cara yang berlaku demikian hanya pemimpin dari keturunan raja/bangsawan saja. Hal itu berlaku pada zaman dahulu kala. Dewasa ini cara yang demikian tidak begitu digunakan lagi akan tetapi bila ada Pejabat tinggi negara datang didesa ini, sering diadakan upacara adat tersebut.

Bagi organisasi perkumpulan muda-mudi, cara pengangkatan dengan adat sudah tidak diperlakukan, mereka para pemimpin di desa hanya diangkat dan dilantik oleh Kepala Desa dan Pejabat di atasnya sesuai struktur organisasi.

Atribut/symbol pada organisasi perkumpulan pemuda di desa itu tidak ada. Kecuali sebutan-sebutan gelar biasa seperti "*punggawa*".

3. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG SOSIAL DALAM MASYARAKAT.

Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin harus mempergunakan "pengaruhnya" untuk mengarahkan para pengikutnya atau bawahannya kearah mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada pemimpin yang besar pengaruhnya dan ada pula tidak seberapa besar pengaruhnya. Jadi disini pengaruh seorang pemimpin akan berbeda-beda dan tergantung dari situasi dan kondisi yang berlangsung dalam masyarakat.

Sistim pengaruh dapat mencakup orang-orang yang menjalankan peranan yaitu antara pihak yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi sehingga mendatangkan perubahan-perubahan dalam kelakuan terjadi karena ide atau faktor lain.

Pengaruh kepemimpinan dalam masyarakat di desa penelitian, ada melakat pada fungsi organisasi atau perkumpulan dan ada pula pada diri pribadi. Kalau pada fungsi organisasi maka jelas dia mempunyai pengaruh yang dapat diistilahkan kekuasaan (Power) atau otoritas. Dan kalau hanya berpengaruh secara pribadi maka disini nampak hubungan kekeluargaan dimana pemimpin itu dianggap tinggi derajatnya dan dipercayai, misalnya dia dari turunan *maradika* (Raja), atau Bangsawan.

Sistim pengaruh kepemimpinan masyarakat didesa ada dua seperti diuraikan diatas, namun pengaruh dan interaksi itu merupakan proses dimana kelakuan individu selalu berhubungan dengan sebuah hirarki organisatoris. Antara wadah organisasi perkumpulan di desa dimana kepemimpinan langsung berperan karena fungsinya sebagai ketua atau pengurus.

Dari hasil pengamatan dan analisa data-data penelitian dilokasi desa Kotarindau dan desa Bangga, memperlihatkan

bahwa seorang pemimpin mempengaruhi pihak lain karena kualitas-kualitas yang ada pada diri pemimpin itu, berupa kepercayaan, kemampuan komunikasi, dan kesadarannya tentang pengaruhnya atas orang lain, dengan persepsi pada situasi yang sedang dihadapi serta pengikut-pengikut. Jadi disini apabila pemimpin dalam organisasi perkumpulan di desa itu pada umumnya berpengaruh karena melekatnya fungsi kepemimpinan dalam struktur organisasi.

Kwalitas kepemimpinan memang berbeda-beda hasilnya, hal ini tergantung daripada situasi kerja yang bersangkutan.

Salah satu yang paling menonjol sifat kepemimpinan di desa itu ialah "kepercayaan". Seperti nampak pada kepemimpinan kelompok petani sawah, ketua perkumpulan itu memberikan prioritas tinggi untuk mencapai pengertian dan kepercayaan anggota-anggota kelompoknya. Sehingga pengikut-pengikutnya harus mempercayai pemimpin-pemimpin mereka. Tingkat kepercayaan adalah derajat yang paling tinggi dan sangat mempengaruhi masyarakat.

Bukti-bukti dari penelitian memperlihatkan, ialah pengaruh kepemimpinan bersumber dari lingkungan tradisional. Beberapa anak turunan "*maradika*" (raja) dewasa ini menduduki jabatan Kepala Wilayah Pemerintahan Kecamatan dan Kepala-kepala Desa.

Jadi seorang turunan "*maradika*" karena memegang fungsi dalam pemerintahan maka masyarakat turut, taat, perintah. Sehingga beberapa perkumpulan di desa itu dibenahi oleh anak-anak dari keturunan "*maradika*", sebagaimana terdapat pula di desa Bangga.

Contoh lain dapat dikemukakan, panitia pembangunan Mesjid yang bergerak dibidang amal ibadah, senantiasa ketuanya memberi penerangan, dimesjid-mesjid di desa itu tentang pentingnya pembangunan sarana ibadah. Di sini nampak pengaruh kepemimpinan sehingga pengikutnya/masyarakat di desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan ibadah bersasaran amal jariah dan amal sholeh. Jadi panitia pembangunan sarana ibadah itu membuat semacam keputusan secara efektif.

Kalau kepemimpinan organisasi pemuda, misalnya perkumpulan olah raga, pengaruhnya nampak kegiatan-kegiatan latihan-latihan pertandingan olah raga dan kesenian dengan membawa-

kan hasil yang diharapkan. Ada usaha-usaha kearah perubahan perubahan dalam organisasi agar lebih cocok dengan pola kelakuan pemimpin. Organisasi pemuda desa itu dipimpin oleh karena sendiri dengan motivasi yang tinggi tetapi secara temporer kegiatan dilaksanakan, sehingga gaya kepemimpinan dan situasi yang terdapat di desa itu mempengaruhi hasil-hasil yang terdapat di desa itu mempengaruhi hasil-hasil yang dicapai. Akan tetapi jika pemimpin itu tidak menjalankan fungsinya sesuai apa yang diprogramkan oleh organisasi maka pengaruhnya tidak ada.

Kepemimpinan sosial tersebut, cenderung melihat orang lain sebagai individu dengan keluarga-keluarga, kawan-kawan serta lingkungan masyarakatnya dibelakangnya, kecenderungan itu terdapat pula pada bidang-bidang kegiatan dalam organisasi kemasyarakatan baik yang secara resmi maupun tidak resmi di desa itu.

Syarat-syarat formal terjadi tetapi nampaknya berbeda-beda.

Ciri-ciri kepemimpinan yang ideal seperti kemampuan skill jujur dan bertanggung jawab sehingga bisa membuat pola perencanaan dan pelaksanaan yang baik dengan menggunakan unsur-unsur management yang baik, tetapi masih jauh dari kenyataan. Sebab kenyataan penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dalam birokrasi pemerintahan dan organisasi sosial bersifat personal dan familier. Oleh Max Weber disebut dengan "birokrasi patrimonial", pola hubungan antara atasan dengan bawahan bersifat paternalistik (Nurhadiantomo, 1983).

Salah satu juga kepemimpinan yang dianggap berpengaruh yaitu masyarakat melihat dari pengalaman kerja, kedudukan dalam organisasi, jenis kelamin dan umur, tingkat pendidikan, serta asal keluarga (silsilah keturunan).

Kalau melihat kepemimpinan yang tergolong tua menyangkut kualitas pemimpin dikaitkan dengan proses pembangunan antara lain bermakna sebagai suatu proses inovasi, nampak pemimpin dengan kriteria-kriteria diatas hanya bersifat statis.

Pemahaman makna dari inovasi sangat kurang.

Dari hasil penelitian pada kelembagaan resmi di kedua desa penelitian itu terdapat kepemimpinan sosial yaitu pengem-

bangun dan pembinaan masyarakat secara terstruktur, di sertai instrumen-instrumen dan sarana-sarana sebagai penunjang kegiatan.

Kepimpinan dalam wadah organisasi kemasyarakatan yang struktur tadi akan menghasilkan suatu proses sosialisasi institusi rasional untuk meninggalkan nilai-nilai lama. Sebab proses sosialisasi menimbulkan nilai-nilai baru akan lebih mudah. Sebagai contoh yang ditemakan dalam penelitian : Kursus ke-trampilan wanita di desa itu mengenai masak-masakan dibarengi pula mata pelajaran P4. dan bagaimana menghayati Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini semacam perubahan mental untuk menimbulkan kesadaran sebagai warga negara dan kesetiaan pada sesama warga masyarakat menuju integrasi nasional.

Kewajiban-kewajiban pemimpin di desa itu akan menciptakan suatu internasionalisasi menuju sasaran integrasi nasional. Sebab hasil penelitian di desa Kotarindau, disana nampak ada gejala desintegrasi di kalangan masyarakat karena pengaruh kepemimpinan lama yang lambat menerima modernisasi.

Karena corak dan aneka ragam kebudayaan dan faham pemikiran para pemimpin di desa akan sangat mempengaruhi kestabilan pembangunan didesa itu. Maka ada pemimpin hendak mempersatukan mereka kearah pembangunan yang mempunyai pola dasar pembangunan. Dan Nilai yang dipandang terbaik dari pola dasar itu adalah kesepakatan nasional yaitu dalam bidang-bidang : Politik, kebudayaan, dan sosial.

Jadi antara kepemimpinan masyarakat yang tidak memegang fungsi dan memegang fungsi dalam masyarakat didesa sudah mulai digarap untuk mempersatukannya.

Kepemimpinan dalam masyarakat pada desa Bangga selaku desa pembanding dalam penelitian ini, disana nampak istilah "Bapak" dan "Anak". Management bapak, tipe ini kurang baik, karena inovatif sangat rendah.

Bapak ini selaku pemimpin sosial betul hanya melihat hubungan yang baik terjalin setiap hari. Bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk senantiasa dilaksanakan oleh kepala desa dan semua perangkat desa terdiri dari keluarga dekat kepala desa. Institusi-institusi di desa itu belum terbentuk semuanya. Kehidupan penduduknya hanya bertahan dengan keadaan alam sekitar.

Antara jenis-jenis daerah pedesaan (Kotarindau dan Bangga) terdapat perbedaan yang bersifat ekologis yang disebabkan karena kondisidaerah masing-masing. Bukan perbedaan fisik saja akan tetapi perbedaan dari pengaruh dalam watak dan sifat yang dimiliki dari pada kelompok warga masyarakat yang tinggal dimasing-masing wilayah itu, Pengaruh lingkungan hidup serta cara berpikir dan mata pencaharian masing-masing warga.

Keadaan lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat di desa itu akan sangat mempengaruhi pola kepemimpinan di-bidang sosial. Apa sebab, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakatnya sudah terpengaruh oleh ide-ide baru dan menerima perubahan-perubahan, tetapi sebagian belum menerima sama sekali.

Menurut kepekaan fihak peneliti, kemiskinan dipedesaan bangga bahwa ita itu bukannya sempitnya tanah garapan, dan bukannya terdapat pengangguran, tetapi warga desa "bertahan pada mentalitas". Sikap kepemimpinan masyarakatnya ikut bertahan dan berserah kepada mentalitas, mengakibatkan mundurnya daya kreasi masyarakat untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia.

Kalau penulis pamanfsirkan secara sosiologis, masyarakat desa Bangga enggan dan lambat reaksinya untuk menerima idee-idee yang menuju kearah dinamika kemajuan.

Menurut Kepala Desa Bangga, "hanya penduduk yang malas tidak meningkat penghidupannya, padahal di desa ini tersedia 200 Ha tanah perkebunan".

Kepemimpinan dalam masyarakat yang juga menonjol dan besar pengaruhnya ialah kepemimpinan dibidang kepartaian (Partai Politik Eksponen-Eksponen yang muncul didalam kondisi sosial obyektif dan pda tingkat sosiokultural di desa itu masih bersifat patrimonialistis. Dalam percaturan politik yang demokratis representatif, nampak kepemimpinan (Ketua-Ketua dalam kepengurusan organisasi) mempunyai basis kekuatan pengaruh, pendukung, pengikut luas dalam masyarakat. Sebagai contoh; PPP dan Golkar terdapat kompetisi yang sehat tersetruktur menghadapi Pemilu di desa itu pada tahun-tahun lalu.

Bukan hanya itu kepemimpinan dalam LKMD di desa itu

turut dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin dalam organisasi sosial tadi dan begitulah seterusnya pada pembentukan wadah/institusi-institusi lainnya.

Pengaruh kepemimpinan disini adalah bagaimana motivasi masyarakat agar mereka mau mengikuti sang pemimpin. Jadi bukan fungsinya karena pemimpin itu menduduki jabatan struktur formal kepengurusan melainkan kultur politik kerakyatannya.

Kepemimpinan kaum Ulama termasuk golongan tua, disini terdapat potensi kewibawaan, sedang kaum muda terdapat potensi dinamika sosial yang kuat. Sebagai contoh yaitu muncul organisasi-organisasi baru/atau kelompok-kelompok sosial masyarakat di desa Kotarindau yang dipelopori oleh kaum muda, yang cukup besar pengaruhnya dalam modernisasi pembangunan desa.

Faktor pendorong yaitu adanya dorongan pemerintah desa dengan ditunjang oleh dana-dana bantuan desa (Bandes) Juga adanya partisipasi masyarakat yang tinggi ("*sintuvu*") dan "*posangu*") artinya gotong royong, dalam kegiatan kemasyarakatan. Wadah/institusi masyarakat ikut menunjang pembangunan desa. Sumber daya alam yang belum di olah ikut menunjang organisasi kegiatan masyarakat desa.

Faktor penghambat; hambatan psikologis, dan tradisi/kebiasaan masyarakat terlalu fanatik (kepercayaan pada benda-benda Sakti) karena kepemimpinan masyarakat itu masih dipegang oleh tokoh-tokoh adat (*totua-totua adat*, dalam tingkah selalu menunjukkan kestaitisan dalam pola sistim nilai pramata sosial.

Hambatan lainnya ialah kebijakan-kebijakan pembangunan desa belum terprogram dengan baik, disebabkan karena pengurus merangkap banyak tugas. Misalnya seorang tokoh pemimpin menjadi pengurus pada 5 buah organisasi, sudah tentu pelaksanaan kontrol kegiatan pekerjaan kurang berjalan lancar. Rendahnya pendidikan para pemimpin di desa merupakan suatu hambatan yang tidak bisa dielakkan. Apalagi di desa itu penduduknya banyak buta huruf.

BAB V

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

1. Organisasi dalam Kegiatan Ekonomi.

Pada bab ini akan diuraikan organisasi atau perkumpulan Ekonomi dengan segala kegiatannya yang ada di desa Bangga dalam Wilayah Kecamatan Dolo.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam bagian ini adalah bagaimana sistim pengorganisasiannya, sistim kepemimpinan yang berlaku dan pengaruh-pengaruh apa yang telah nampak dalam lingkungan masyarakatnya, sejak organisasi/perkumpulan ekonomi itu lahir sampai dengan keadaannya dewasa ini.

a. Nama Organisasi.

Di desa Kotarindau yang merupakan salah satu desa ibu kota Kecamatan Dolo perkembangan/organisasi telah banyak kita ketemukan.

Organisasi-organisasi tersebut ada yang bergerak dalam keolah ragaan, dalam bidang sosial tertentu dan ada yang khusus bergerak dalam bidang Ekonomi atau mata pencaharian.

Organisasi yang terakhir inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu yang disebut Koperasi.

Di desa Kotarindau telah berdiri satu Koperasi yang diberi nama "Koperasi Batu Bata Beringin". Koperasi Batu Bata Beringin didirikan sejak Tahun 1975, akan tetapi Koperasi tersebut nanti diresmikan oleh Departemen Perindustrian Kabupaten Donggala pada tahun 1982, dengan jumlah anggotanya 50 orang pengrajin batu bata.

Memperhatikan jarak waktu dari pendiriannya sampai diresmikan menjadi bentuk Koperasi maka berdasarkan informasi dan data-data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa kegiatan sebagai pengrajin batu bata ini dimulai oleh beberapa orang yang sejak pada waktu itu memperhatikan orang-orang sesama warga desa sangat jauh membeli batu bata dari luar desanya kurang lebih 10 km,

sedang potensi untuk dikembangkan dalam pembuatan batu bata disamping telah ada beberapa yang mempunyai ketrampilan untuk usaha itu.

Berdasarkan potensi dan ketrampilan yang mereka miliki maka dimulai percobaan untuk membuat batu bata itu dan hasilnya cukup memuaskan. Ternyata dengan percobaan pertama itu mendapat sambutan positif dari masyarakat desa Kotarindau oleh karena warga desa yang ingin membangun rumahnya atau bangunan-bangunan lainnya tidak lagi mendatangkan bahan baku dari luar desa.

2. Bahwa sejak adanya kegiatan pengrajin batu bata memang telah dikandung maksud yaitu agar usaha pembuatan batu bata ini dapat berkembang lebih baik dan maju, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah : "berbentuk Koperasi".

Akan tetapi dikalangan para pengrajin batu bata pada waktu itu masih selalu dibayangi oleh keadaan-keadaan yang lampau dimana Koperasi pada waktu itu tidak bertahan lama oleh karena disebabkan beberapa faktor seperti sistem pengolahannya yang tidak trampil yang akibatnya perkumpulan-perkumpulan yang dulu pernah ada seperti Koperasi Konsumsi, Koperasi Kopra tidak berkembang malahan hanya merugikan para anggotanya.

Berdasarkan peristiwa/kasus-kasus dimasa lampau itu maka perkembangan Koperasi Batu Bata Beringin di desa Kotarindau sangat lamban.

Malahan mulai didirikan Koperasi ini masih bersifat arisan dimana dari beberapa anggota saling berganti untuk dipekerjakan baik dalam pengolahan tanah maupun dalam mencetaknya menjadi batu bata yang siap untuk dibakar.

Namun secara psikologis warga desa Kotarindau pada umumnya mengerti/mengetahui bahwa menjadi anggota Koperasi adalah bermanfaat untuk meningkatkan/memperbaiki tingkat kesejahteraan dan penghasilan dalam rumah tangga.

Hal ini dapat dijelaskan dari hasil angket yang telah disebarkan kepada kurang lebih 40 orang responden yang antara lain menyatakan :

1. menyetujui Koperasi 31 orang
2. kurang menyetujui 3 orang
3. tidak memberikan keterangan 3 orang
4. Lainnya angket tidak kembali.

Berdasarkan data-data tersebut maka jelas masyarakat desa Kotarindau menganggap bahwa dengan memasuki Koperasi, kesejahteraan dalam rumah tangga dapat ditingkatkan.

Mengenai susunan/struktur kepemimpinan dalam organisasi/perkumpulan Koperasi batu bata beringin dapat digambarkan sebagai berikut :

Struktur kepemimpinan yang berlaku dalam perkumpulan Koperasi Batu Bata Beringin terdiri dari :

1. Unsur Ketua
2. Unsur Sekretaris
3. Unsur Bendera
4. Unsur Manager
5. Unsur Seksi-seksi.

Struktur kepemimpinan tersebut berlaku secara umum pada organisasi yang berbentuk Koperasi. Suatu hal yang perlu dijelaskan bahwa walaupun struktur kepemimpinan itu telah berlaku dalam Koperasi Batu Bata Beringin namun sangat disayangkan ketrampilan mereka mengatur/mengembangkan Koperasi itu masih kurang oleh karena sampai sekarang ini banyak anggota-anggota Koperasi itu masih berhubungan dan terikat dengan sistim ijon sehingga dari data yang diperoleh menyatakan dari 50 anggota Koperasi tersebut dapat dijelaskan :

1. Dari Segi Modal.

35 orang menggunakan modal dari para pengijon dan sisanya menggunakan modal sendiri dan saling membantu.

2. Dari segi kegiatan :

50 orang anggota Koperasi dibagi dalam 5 kelompok masing-masing kelompok saling membantu *nolunu* dalam melaksanakan/mencetak satu bata.

3. Dari segi Pemasaran :

Dari para pengijon pemasaran batu bata dilaksanakan oleh pemberi modal (tengkulak) sedangkan lainnya dilaksanakan sendiri.

4. Dari segi Peningkatan mutu.

Sebelum diresmikan pembuatan batu bata belum menampakan kualitas yang baik akan tetapi setelah diresmikan berbentuk Koperasi, maka bimbingan dari Departemen Perindustrian sudah sering diadakan dan apalagi sekarang ini khusus untuk daerah Dolo telah ditempatkan seorang PPL (Penyuluhan Praktek Lapangan) khusus dalam bidang pengrajin batu bata dan pembuatan genting, sehingga dewasa ini mutu batu bata dari wilayah Dolo semakin baik sebagai bahan bangunan.

Mengenai keanggotaan dalam Koperasi Batu Bata Beringin adalah terdiri dari 50 orang anggota yang kesemuanya mempunyai status yang sama. Tidak ada anggota kehormatan.

Keanggotaan ini adalah semuanya pengrajin.

Dari setiap anggota dibantu oleh keluarganya (anehnya, iparnya dan saudara-saudaranya).

Sedangkan kalau kita menelusuri keadaan organisasi/perkumpulan Ekonomi di desa Bangga maka disana tidak ada Koperasi. Didesa Bangga diperoleh informasi ada istilah yang mereka namakan "*Kuapunuras*" artinya *kalau masuk menjadi anggota Koperasi rejekinya akan habis dikooperasi.*

Hal tersebut adalah sebagai akibat dari pada pengelola Koperasi yang pernah ada didesa itu dahulu, dimana saham/modal koperasi yang dikumpulkan dari warga desa tidak berkembang malahan habis dipergunakan oleh pengurus koperasi untuk kepentingan pribadinya.

Selanjutnya yang dapat digambarkan tentang perkumpulan/organisasi ekonomi yang ada di desa Bangga adalah yang mereka namakan "*Perkumpulan Tani Singani*". (Perkumpulan Tani Bersama). Perkumpulan ini didirikan sejak tahun 1972. Pada waktu itu belum diberi

nama "*Singgani*" (Bersama).

Perkumpulan ini kegiatannya khusus saling membantu dibidang pertanian dan perkebunan.

Struktur/susunan kepemimpinan dalam organisasi ini masih mengikuti cara-cara tradisional yaitu yang paling berperan adalah unsur keketuaan sedang unsur-unsur lainnya seperti unsur Sekretaris Bendahara dan seksi-seksi sama sekali belum berfungsi. Apalagi organisasi ini didalam kegiatannya harus selalu diketahui kepala desa Bangga.

Dalam arti bahwa jika ada kegiatan yang harus dilaksanakan maka kepala Desa tidak boleh ditinggalkan. Jadi Kepala Desa merupakan motivator utama dalam menggerakan para anggota-anggota perkumpulan tersebut dalam melakukan kegiatannya. Keanggotaanya adalah terdiri dari warga desa Bangga sendiri yang sampai sekarang ini telah berjumlah kurang lebih 70 orang.

b. Tempat dan Kegiatan.

Mengenai tempat dan kegiatan Koperasi Batu Bata Beringin diadakan didusun Kabobona Desa Kotarimdau. Dusun Kaboboma terletak pada bagian sebelah Utara dengan Desa Kalukubula. Dusun Kaboboma mempunyai penduduk ini tersebar lebih 300 jiwa. Pada dusun kaboboma ini tersebar tempat-tempat pembuatan batu bata. Kebanyakan tempat-tempat tersebut berada dan tersebar dibawah pohon-pohon kelapa. Sehingga menurut pengu-sutan secara langsung bahwa bukan mustahil tempat-tempat tersebut mempunyai pengaruh/dampak yang negatif terhadap kehidupan pohon-pohon kelapa yang disekitarnya Namun dalam tulisan ini tidak dibicarakan tentang kehidupan pohon kelapa yang ada disekitarnya.

Pusat Kegiatan.

Sebagai suatu badan Usaha yang melayani kebutuhan kebutuhan para anggotanya tentu mempunyai tempat khusus yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Koperasi Batu Bata Beringin yang berada di Dusun Kabobona Desa Kotarindau ini menetapkan pusat ke-

giatannya atau kantornya berada pada dua tempat yaitu : Masjid Tua. Masjid ini tidak digunakan lagi karena sudah ada mesjid yang baru dibangun dan lebih besar.

Pada mesjid tua yang telah berubah fungsinya menjadi Kantor Koperasi Batu Bata Beringin kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam usaha mengembangkan Koperasi itu ketingkat yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan atau yang dilaksanakan pada Kantor Koperasi itu antara lain : Kegiatan Rutin, mengadakan rapat-rapat, dan konsultasi-konsultasi yang berhubungan dengan pengembangan Koperasi dan cara-cara meningkatkan mutu pembuatan batu bata. Selain dari Kantor Koperasi, kegiatan dapat pula diadakan dirumah terutama dirumah ketua Koperasi. Kegiatan dirumah ini biasanya hanya bersifat konsultasi/mengenai kegiatan rutin. Seperti giliran siapa yang akan dikerjakan batu batanya dan apakah bahan-bahannya sudah siap.

Kegiatannya Sendiri.

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa kegiatan dari masing-masing anggota Koperasi Batu Bata Beringin adalah menyebar dibawah pohon-pohon kelapa yang ada didusun Kabobona. Hal ini nampak dengan jelas kalau kita berhubungan kedusun Kabobona desa Kotarindau. Dari seluruh anggota yang berjumlah 50 orang dalam melaksanakan kegiatannya dibagi menjadi 5 kelompok. Sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Setiap kelompok dalam melaksanakan kegiatannya untuk membuat/mencetak batu bata dilakukan sistim *molunu/nosimoroa* (bekerja sama untuk kepentingan seseorang) dan dilaksanakan secara bergilir sampai semua anggota kelompok mendapatkan giliran.

Sistim *nolunu/nosimporoa* (bekerja sama) dalam membuat /mencetak batu bata nampaknya merupakan suatu cara yang perlu dipelihara dalam Koperasi Batu Bata Beringin. Oleh karena dengan sistim tersebut seorang pengusaha/pengrajin batu bata dalam waktu sehari saja sudah dapat memiliki batu bata yang siap dibakar sebanyak 5000 biji, karena setiap anggota kelompok dari 10 orang masing-masing 1 hari mencetak/membuat batu bata 500 biji.

Hal tersebut dapat diperkirakan andai kata seorang anggota mendapat giliran pembuatan batu bata 5 kali dalam tempo dua bulan berarti ia telah memiliki batu bata sejumlah 5×5000 biji = 25.000 biji yang siap untuk dibakar.

Target yang harus dicapai untuk bekerja *nolunu* (bekerja bersama) satu hari sebanyak 5000 biji batu bata mentah adalah sudah merupakan ketentuan yang harus dipenuhi pada hari kerja itu. Untuk itu kepada setiap anggota yang akan mendapat giliran pekerjaan membuat batu bata ia harus mempersiapkan tanah secukupnya yaitu berupa *gege* (pecek-pecek tanah) sebanyak 5000 biji batu bata. Kepada anggota-anggota kelompok yang belum siap/ belum memiliki *gege* (pecek tanah) untuk dikerjakan pada gilirannya, maka anggota tersebut harus mencari anggota lain yang telah siap *gege* (tanah peceknnya) untuk dikerjakan pada giliran itu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggota pengganti dari kelompok tersebut harus menanggung semua biaya konsumsi yang digunakan pada waktu diadakan pekerjaan membuat/mencetak batu bata.
2. Anggota pengganti harus membayar kepada anggota yang punya gilinya harga batu bata mentah @ Rp. 1,50 jadi 5000 biji satu hari sama dengan $5000 \times \text{Rp. } 1,50 = \text{Rp. } 7.500,-$ untuk jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel I Bab V

Daftar Kegiatan pembuatan Batu Bata Koperasi Batu Bata Beringin berdasarkan kelompok (*nolunu*) thn. 1982/1983.

No. Kegiatan	Batu Bata mentah yang dihasilkan		Jumlah 1983	Hasil pembakaran
	1982	1983		
1. Kelompok A	300.000	210.000	510.000	480.000
2. Kelompok B	260.000	230.000	490.000	470.000
3. Kelompok C	200.000	180.000	380.000	365.000
4. Kelompok D	275.000	280.000	555.000	520.000
5. Kelompok E	200.000	200.000	400.000	375.000
	1.235.000	1.100.000	2.335.000	2.10.000

Sumber : Pengurus Koperasi Batu Bata Beringin.

Organisasi *Tani Singgani* di desa Bangga mempunyai dua fungsi yaitu Sebagai perkumpulan/badan yang berusaha untuk kepentingan anggota-anggota, yaitu perbaikan saluran air kepersawahan, membuka jalan baru, tetapi disamping itu mencari dana untuk pembangunan Rumah Ibadah, dan lain-lain pembangunan di desa itu.

Anggota-anggota *Tani Singgani* merupakan pelaksana dari pekerjaan itu, sedangkan pemimpin desa merupakan orang yang mencarikan pekerjaan/borongan tersebut.

Biasanya pembicaraan tentang hal ini diadakan di Rumah kepala desa sebagai pengerah dalam Organisasi ini. Kegiatan dari organisasi *Tani Singgani* diadakan secara bergilir untuk setiap anggota antara lain : kegiatan pengolahan sawah mulai dari membongkar tanah dengan bajak sampai dengan mengeluarkan rumput padi disawah sedangkan dalam kegiatan perkebunan yaitu mulai dari pembukaan kebun sampai penanaman bahkan sampai pemagaran kebun bagi anggota anggota yang mampu menyiapkan bahan-bahannya.

c. Tujuan yang ingin dicapai.

Setiap usaha yang didirikan baik perorangan maupun secara berkelompok mempunyai tujuan tertentu. Apalagi yang bernama Koperasi tujuannya sudah jelas.

Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pemimpin Koperasi Batu Bata Beringin diperoleh keterangan bahwa dalam Koperasi itu mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai antara lain :

Tujuan umum :

- Agar warga desa Kotarindau yang membutuhkan batu bata untuk membangun perumahan dsb. tidak lagi mendatangkan/membeli dari tempat yang jauh dan sekaligus menghemat dana dalam pembangunan.
- Bahwa dengan adanya para pengrajin batu bata yang berbentuk Koperasi maka desa Kotarindau selangkah demi selangkah telah dapat memenuhi seruan pemerintah dalam hal penggalakan Koperasi di masyarakat pedesaan, walaupun Koperasi tersebut masih sangat membutuhkan bantuan dari pihak yang berkompeten.
- Bahwa dengan status arisan menjadi status Koperasi maka diharapkan para anggota pengrajin batu bata Beringin dapat ditingkatkan kesejahteraannya pada waktu-waktu yang akan datang.

Tujuan khusus.

Sebagaimana dikatakan terdahulu bahwa pertamanya perkumpulan pengrajin batu bata berdiri masih berbentuk arisan dengan kerja *nolunu* (bekerja bersama) untuk membuat/mencetak batu bata secara bergilir pada setiap anggota kelompok, oleh karena para anggota tersebut tidak semuanya memiliki modal yang cukup dalam proses pembuatan batu bata itu. Untuk mengatasi kekurangan modal itu, banyak diantara para pengrajin batu bata datang kepada para pengrajin untuk memintakan bantuan modal hingga sampai sekarang ini. Justru karena itu maka dengan diresmikannya menjadi "Koperasi Batu Bata Beringin", maka salah satu tujuan

khususnya adalah memberantas para pengijon yang selalu datang menjajakan modalnya kepada parapengrajin batu bata sedangkan tujuan khusus lainnya adalah dengan menjadi anggota koperasi Batu Bata Beringin sudah mudah mendapatkan fasilitas peminjaman kredit dari bank pemerintah. Sehingga dengan demikian anggota-anggota Koperasi tersebut dapat mengembangkan usahanya lebih maju lagi.

2. Sistim Kepemimpinan.

Sebelum sampai kepada Sistim Kepemimpinan yang berlaku dilokasi penelitian khususnya didesa Kotarindau dan desa Bangga, perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Pertama : Bahwa secara keseluruhan dengan diterapkan UUD No. 5/1979 telah banyak membawa pengaruh dan perubahan-perubahan didaerah pedesaan sehingga dengan demikian baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pula sistim kepemimpinan yang berlaku didaerah pedesaan (Thamrin Handam 1983 : 8)

Kedua : Bahwa dengan adanya pengaruh kekuatan politik sistim administrasi nasional, maka sistim kepemimpinan didaerah pedesaan juga mengalami perubahan terutama dalam pengakuan dari masyarakat itu sendiri terhadap pemimpinnya. Bertolak dari kedua pengertian tersebut diatas maka pendekatan yang digunakan dalam mengkaji sistim kepemimpinan yang berlaku dilokasi penelitian ini adalah pendekatan dari Sosiologi Politik yaitu bagaimana sistim kepemimpinan dan sistim politik yang berlaku pada kedua desa tersebut (desa Kotarindau dan desa Bangga), khususnya sistim kepemimpinan dalam bidang Ekonomi pada "Koperasi Batu Bata Beringin" dan "Tani Singgani".

Di desa Kotarindau Koperasi Batu Bata Beringin dipimpin oleh seorang Guru Sekolah Dasar Negeri sedang di desa Bangga Kelompok "*Tani Singgani*" dipimpin oleh seorang warga desa yang dianggap dituakan di desa itu.

Mengenai Sistim Kepemimpinan yang berlaku pada kedua Organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

– Koperasi Batu Bata Beringin.

Dalam Koperasi Batu Bata Beiringin berlaku pula sistim kepe-

mimpinan sebagaimana yang berlaku pada Koperasi umumnya. Dalam Koperasi terdapat unsur, Ketua, Unsur Sekretaris, unsur bendahari unsur manager dan Seksi-seksi menurut kebutuhan.

Akan tetapi untuk menjalankan kegiatan Koperasi hampir seluruhnya bertumpuh pada ketua. Hal tersebut bukan berarti ketua Koperasi mau monopoli semua tugas-tugas dalam menjalankan Koperasi tetapi hal tersebut disebabkan oleh Karena :

1. Bahwa pada umumnya masyarakat didaerah pedesaan menganggap ketua itulah yang paling syah untuk menentukan sesuatu kegiatan.
2. Masyarakat didaerah pedesaan belum mengerti benar cara-cara berorganisasi baik mengenai pembagian tugas dan wewenang maupun mekanismenya dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka mekanisme kepemimpinan yang berlaku dalam Koperasi Batu Bata Berigin lebih banyak ditentukan oleh Ketuanya, walaupun pembagian tugas sudah diadakan dalam Koperasi itu. Namun demikian dalam mengambil keputusan Ketua Koperasi masih tetap memintakan persetujuan dari pimpinan lainnya, sehingga keputusan yang diambil adalah merupakan kesepakatan bersama, jadi bersifat musyawarah.

Hal-hal lain yang perlu dicatat dalam sistim kepemimpinan didesa Kotarindau khususnya dibidang Ekonomi/Koperasi Batu Bata Beringin adalah Ketua Koperasi belum dapat mencegah para anggota Koperasi untuk memperoleh uang dari para tengkulak yang selalu datang menjajakan uangnya. Hal ini menurut pengakuan dari Ketua Koperasi Batu Bata Beringin disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Bahwa untuk memperoleh Kredit dari bank diperlukan persyaratan (setifikat tanah) yang pada umumnya para pengarajin batu bata itu belum memiliki.
- b. Kebutuhan kehidupan yang mendesak sehingga diperlukan biaya untuk membakar batu bata seperti membeli kayu, dan upah buruh, yang mau atau tidak terpaksa harus datang kepada para tengkulak.

- c. Bahwa modal Koperasi yang diperoleh dari setiap anggota Koperasi berupa 100 biji batu bata siap pakai yang berjumlah seluruhnya 5000 biji batu bata = Rp. 1.000.000,— sampai sekarang ini belum terlaksana dengan baik.

Dari gambaran tentang keadaan Koperasi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistim kepemimpinan yang berlaku dalam Koperasi Batu Bata Beringin sangat dipengaruhi oleh tradisi kehidupan para anggotanya.

Sehingga gerakan Koperasi yang diinginkan oleh para pemimpinnya masih menyesuaikan diri dengan keadaan anggota.

Organisasi Tani Singgani.

Seperti telah disebutkan terdahulu bahwa Kelompok "*Tani Singgani*" (Tani bersama) didesa Bangga didirikan sejak tahun 1972.

Organisasi tersebut keadaannya sampai sekarang ini nampaknya biasa-biasanya saja; maksudnya sejak berdirinya hingga dewasa ini belum menampak suatu kemajuan oleh karena belum mempunyai rencana kerja yang tersusun secara rapih serta belum mempunyai perlengkapan administrasi.

Anggotanya kurang lebih 70 orang dan kegiatan utamanya adalah dibidang pertanian dan perkebunan.

Sistim kepemimpinan yang berlaku dalam organisasi/perkumpulan tersebut adalah tradisional. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Struktur kepemimpinan yang berlaku dalam organisasi tersebut terdiri dari unsur Ketua, unsur Sekretaris, unsur bendahara dan seksi-seksi. Walaupun nampaknya perkumpulan/organisasi tersebut telah mengikuti sistim organisasi modern, akan tetapi sistim kepemimpinan yang berlaku adalah didominasi karena tradisional.

Keadaan tersebut jelas sekali dalam kegiatannya dimana yang menentukan bukan ketua tetapi harus selalu dikonsultasikan dengan kepala desa dan kepala desa yang menentukan kapan suatu kegiatan akan dilaksanakan. Hal tersebut berlaku oleh karena kepala desa Bangga yang bernama *Salindate Remtelembah* adalah keturunan raja Bangga yang selama ini telah memegang Kepala Desa Bangga kurang lebih 20 tahun. Beliau sangat berpengaruh terhadap penduduk asli didesa itu.

a. Syarat-syarat dan faktor pendukung.

Seseorang yang akan dijadikan sebagai pemimpin harus mempunyai kelebihan-kelebihan dari orang lain terutama dari orang-orang yang dipimpinya.

Oleh karena itu diperlukan persyaratan khusus sesuai dengan sifat organisasi yang akan dipimpinya, dengan demikian organisasi tersebut dapat berkembang dan dapat mencapai tujuannya. Untuk maksud tersebut maka persyaratan bagi seorang pemimpin Koperasi Batu Bata Beringin dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jujur adil dan amana
2. Memiliki ketrampilan berorganisasi.
3. Berpandangan jauh kedepan
4. Berwibawa
5. Ahli dan cakap dalam bidangnya.

Kelima persyaratan tersebut merupakan hal-hal yang wajar dalam organisasi baik dalam sistim kepemimpinan tradisional maupun dalam sistim kepemimpinan yang modern.

Disamping persyaratan-persyaratan tersebut maka diperlukan suatu dukungan yang luas terutama dukungan dari para anggotanya, pimpinan formal dan informal dalam desa bahkan harus didukung oleh seluruh warga desa.

Faktor-faktor pendukung tersebut adalah merupakan motivasi yang besar dalam membangkitkan semangat pemimpin Koperasi itu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin Koperasi.

Selanjutnya persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kelompok "*Tani Singgani*" didesa Bangga dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa ia adalah mempunyai darah bangsawan/keturunan raja-raja.
- b. Penduduk asli desa Bangga.
- c. Disetujui oleh Kepala Desa.

Ketiga hal tersebut merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang calon Ketua dari Organisasi/Kelompok

”Tani Singgani”.

Sedangkan hal-hal lain yang merupakan faktor pendukung adalah : Disetujui oleh seluruh anggota dan dapat bekerja sama terutama dengan pemerintah Desa dan tokoh-tokoh dalam masyarakat desa Bangga.

b. Hak- dan Kewajiban

Pemimpin Organisasi dibidang Ekonomi khususnya Koperasi Batu Bata Beringin mempunyai hak-hak sebagai berikut : Bagi seorang pemimpin Koperasi yang ada. Disamping itu ia masih mempunyai hak dalam menegur para anggota Koperasi yang tidak mau mentaati peraturan yang telah disepakati bersama bahkan ia berhak pula memberikan sanksi. Hak hak lainnya adalah seorang pemimpin menerima imbalan jasa dari usahanya memimpin Koperasi.

Kewajiban-kewajiban dari pemimpin Koperasi selain telah diatur dalam undang-undang Koperasi, maka kewajiban-kewajiban lainnya adalah mengayomi para anggota Koperasi, menciptakan kesejahteraan alahir batin, menegakan norma/ nilai-nilai yang berlaku baik didalam organisasi maupun yang ada didalam masyarakat. Selanjutnya agar para pemimpin Koperasi dengan seluruh anggotanya selalu berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan desa sehingga dengan demikian terjalin hubungan kerja sama antara aparat pemerintah an desa dengan para pemimpin Koperasi.

Mengenai hak dan kewajiban yang ada pada organisasi Tani Binggani di desa Bangga adalah sebagai berikut :

Punggawa utama (tokoh yang memegang adat tanah) berhak menerima pemberian (*pekasugia*) hasil panen dari para anggotanya oleh karena jasa-jasanya yang telah memberikan petunjuk dan cara-cara bersawah dan berkebun yang baik. Hal ini berlaku pada zaman dahulu; akan tetapi dewasa ini hak-hak tersebut sudah hilang/tidak berlaku lagi. Malahan dalam masyarakat desa Bangga sekarang ini timbul istilah dalam bahasa Kaili : ”*Dono naria panggawa, damo lenge naria*” : maksudnya (tidak ada lagi penghasilan dari *punggawa* melainkan hanya kelelahan saya yang diperoleh)”.

Namun demikian pemimpin Tani Singgani tetap berkewajiban memperhatikan seluruh anggotanya yaitu mencari dan menentukan siapa diantara anggota-anggota itu yang didahu-

lukan untuk dipekerjakan dan selalu menciptakan suasana aman dan kerja anggota organisasi.

c. Atribut/Simbol Kepemimpinan.

Pada waktu jayanya daerah-daerah kerajaan suku bangsa Kaili dahulu dikalangan pemimpin-pemimpin formal seperti *magau, madika malolo, dan Madika Matua* nampak dengan jelas atribut-abribut yang mereka pakai sebagai tanda untuk membedakannya dengan todea (rakyat biasa).

Disamping itu atribut tersebut juga merupakan simbol-simbol dari kerajaan yang antara lain berbentuk pakaian, rumah dan lain-lain.

Akan tetapi dewasa ini atribut-atribut yang dipakai untuk pemimpin-pemimpin dibidang Ekonomi khususnya Koperasi Batu Bata Beringin di desa Kotarindau sepanjang penelitian dan pengamatan kami tidak memakai simbol-simbol lagi seperti pada waktu jayanya kerajaan suku bangsa Kaili dahulu

Gelar>Nama.

Dari berbagai gelar dan nama yang terdapat dalam sistim kepemimpinan kerajaan Kaili dahulu seperti, *Magau, Madika Malolo, Madika Matua, Punggawa, Gulara, Tadulako, Pabicara, Suhandara, Totua Nungatan, Maradika Ntama* dll, maka gelar dan nama-nama tersebut yang ada hubungannya dengan sistim kepemimpinan dibidang Ekonomi adalah *Mardadika Ntama* artinya Tokoh yang memegang adat dalam bidang perekonomian dalam desa itu.

Akan tetapi gelar/nama untuk kepemimpinan dalam Koperasi Batu Bata Beringin menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara sudah sebgaiian besar masyarakat menyebut : Kalau ketua disebut Ketua (*Punggawa*), kalau Sekretaris juga disebut sekretaris dan kalau Bendahara disebut penyimpan uang (*topomboli doi*). Nampaknya gelar/nama tersebut hampir-hampir telah mengikuti cara-cara modern. Selanjutnya mengenai gelar/nama untuk sistim kepemimpinan dalam bidang Ekonomi didesa Bangga masih mengikuti gelar/nama yang digunakan pada sistim kerajaan dahulu antara lain : Pemimpin dalam kelompok *Tani Singgani* disebut *Punggawa nppokaraja* (Ketua dalam Organisasi/Perkumpulan *Tani Singgani*).

Tanda-tanda Kebesaran.

Dalam masyarakat suku bangsa Kaili terutama pada pemimpin-pemimpin kerajaan dahulu baik pemimpin dibidang Eksekutif dan legistatif, hampir semuanya mereka memakai tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran itu nampak pada cara-cara mereka berpakaian seperti pakai *celana panjang* (selana pendek merah yang pahanya dipersempit dan pakai benang emas), pakai *sigu* merah (ikat kepala) dan pakai *buya bomba* (sarung sutra Donggala).

Tanda tanda kebesaran yang berbentuk pakaian itu juga berlaku bagi pemimpin dibidang Ekonomi pada zaman kerajaan dahulu. Akan tetapi sekarang ini tanda-tanda kebesaran untuk pemimpin dibidang Ekonomi/Koperasi tidak ada lagi kecuali kalau didesa Bangga tanda-tanda kebesaran itu masih ada sebagian pemimpin dalam masyarakat memakainya, tetapi hanya pada upacara-upacara tertentu seperti pesta adat dan menyambut tamu besar yang berkunjung ke desa itu.

d. Cara Pengangkatan dan Upacara

Dalam masyarakat suku bangsa Kaili terutama dikalangan raja raja dahulu pengangkatan seorang pemimpin kerajaan (*Magau*) selalu diucaparkan dengan Tema :
Pelantikan/penobatan raja Palu, Pelantikan raja Kulawi atau pelantikan raja Dolo.

Setelah diumumkan kepada seluruh rakyat diwilayah kerajaan itu akan penobatan (pelantikan *Magau*, rakyat berbondong-bondong datang ketempat pelantikan. Disana *Magau* yang dilantik itu diusung dalam tempat yang dibuat dari batang pinang dan dibawa berkeliling kota. Cara pengangkatan dan upacara-upacara tersebut dewasa ini tidak berlaku lagi baik didesa Kotarindau maupun di desa Bangga. Seseorang yang terpilih untuk menjadi pemimpin baik sebagai pemimpin Koperasi maupun pemimpin dalam kelompok tani, pada waktu itu pula langsung disyahkan oleh para hadirin dan Kepala Desa yang ikut hadir dalam pemilihan itu. Pada waktu itu pula pemimpin yang terpilih itu sudah dapat memulai tugas-tugas untuk mengendalikan organisasi yang dipimpinnya.

3. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi dalam Masyarakat.

Sebelum sampai kepada pengaruh apa yang nampak dalam masyarakat pada kedua desa penelitian ini sebagai akibat dari fungsi-fungsi Kepemimpinan yang diterapkan oleh para pemimpin bidang Ekonomi pada kedua desa tersebut, dahulu perlu dikemukakan batasan-batasan tentang pengertian pengaruh dan fungsi-fungsi yang diperankan oleh para pemimpin bidang Ekonomi itu pada masyarakatnya.

Pengaruh dalam pengertian ini adalah bukan pengaruh kepemimpinan, tetapi pengaruh yang dimaksudkan disini adalah pengaruh dari karena adanya organisasi dibidang Ekonomi, sehingga membawa hasil (out put) baik terhadap anggota organisasi itu sendiri maupun bagi anggota masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi kepemimpinan disini adalah merupakan perincian dari tugas-tugas pokok dari seorang pemimpin atau peranan-peranan apa yang telah dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan organisasinya yang jelas dalam masyarakat.

Berdasarkan pada batasan dari pengertian-pengertian tersebut maka untuk selanjutnya akan digambarkan apa pengaruh dan fungsi kepemimpinan dibidang Ekonomi terhadap masyarakat desa Kotarindau dan desa Bangga sebagai berikut :

Desa Kotarindau : Telah diuraikan diatas bahwa pengrajin Batu Bata atau industri batu bata yang ada di desa Kotarindau sampai diresmikan menjadi "Koperasi Batu Bata Beringin" sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Waktu yang sekian lama itu tentu telah membawa para anggota khususnya dan masyarakat desa umumnya kepada suatu tingkat kehidupan yang lebih baik dari yang lalu. Untuk itu maka berdasarkan informasi dari dua hal yaitu : Pengaruh Positif dan pengaruh negatif.

Pengaruh Positif dapat digambarkan :

1. Untuk anggota Koperasi Batu Bata Beringin hampir semuanya telah memiliki rumah permanen dalam arti bahwa income perkapita para anggota bertambah dari tahun ke-tahun.

2. Bahwa pada umumnya anggota Koperasi batu bata beringin tidak menunggak pajak.
3. Dalam kegiatan didesa Kotarindau terutama kegiatan yang membutuhkan dana, maka anggota Koperasi Batu Bata Beringin selalu mengembang sesuai dengan kemampuan.
4. Dalam melaksanakan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah tingkat Kecamatan maupun pemerintah Desa yang membutuhkan batu bata tidak lagi sukar untuk memperoleh batu bata. Demikian pula masyarakat Desa Kotarindau pada umumnya.
5. Bagi masyarakat diluar Desa Kotarindau baik pemerintah maupun swasta hampir seluruhnya membeli/memperoleh batu bata dari desa Kotarindau.
6. Disamping hal-hal tersebut maka pengaruh lainnya yang tidak kurang pentingnya adalah pengaruh terhadap beberapa desa tetangga seperti desa Kalukubyla dan desa Beka yang hanya berbatasan dengan sungai Palu, dimana masyarakatnya sudah melaksanakan pembuatan batu bata yang menurut informasi dari Kepala Perindustrian Kabupaten Donggala telah mengeluarkan surat izin usaha untuk para pengrajin batu bata pada kedua desa tetangga itu.
7. Bahwa dengan adanya Koperasi Batu Bata Beringin di Desa Kotarindau yang dewasa ini anggotanya 50 orang pengrajin yang masing-masing pengrajin mempekerjakan 5 s/d 10 orang tenaga buruh, dengan demikian telah dapat menyerap tenaga kerja sejumlah $50 \times 5 \text{ orang} = 250 \text{ orang}$. Walaupun tenaga kerja adalah terdiri keluarganya masing-masing. Hal tersebut telah dapat mengurangi pengangguran didesa Kotarindau.

Pengaruh Negatifnya.

Pengaruh negatifnya yang nampak dengan jelas didesa Kotarindau adalah akibat dari penggalian tanah yang diolah untuk batu bata itu telah menimbulkan lubang-lubang yang ber-tebaran dibawah pohon kelapa. Dengan demikian bukan tidak mungkin membawa dampak yang negatif terhadap tumbuhnya pohon kelapa yang ada disekitarnya. Bahkan menurut informasi yang diperoleh sudah ada pohon kelapa yang tumbang karena akar-akarnya tidak dapat lagi bertahan.

Dengan keadaan yang demikian itu sudah jelas telah bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup yang dewasa ini sedang giat-giatnya digalakan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengaruh negatifnya tersebut, maka timbul masalah baru yang sekaligus merupakan tantangan bagi fungsi kepemimpinan dalam bidang Ekonomi dan yaitu bagaimana jalan yang harus ditempuh untuk menghadapi masalah tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dalam masyarakatnya desa Kotarindau. Oleh karena hal ini adalah masalah baru maka dalam naskah laporan ini tidak cukup waktu dan tenaga untuk mengolahnya, sebab hal tersebut membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Desa Bangga.

Di desa Bangga pengaruh organisasi/perkumpulan di bidang Ekonomi/pertanian menurut informasi dan pengamatan langsung dapat dikatakan bahwa pengaruh organisasi/perkumpulan Tani Singgani terutama dalam hal pembangunan Desa Bangga. Maksudnya untuk memperoleh Dana yang digunakan untuk pembangunan mesjid, sekolah dan sebagainya anggota-anggota dari Tani Singgani yang menjadi pelopor utama untuk mengerjakan sesuatu borongan pekerjaan sedang uang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut semuanya disumbangkan kepada bangunan mesjid atau bangunan pendidikan.

Sedangkan terhadap para anggota Tani Singgani tingkat kehidupannya biasa-biasanya sejak organisasi tersebut didirikan.

BAB VI

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDANG AGAMA

1. Organisasi dalam kegiatan Agama.

Didalam masyarakat pedesaan kita akan menemui bermacam-macam organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan yang berdasarkan kepada agama masing-masing seperti agama Islam, Kristen dan Hindu Budha. Organisasi keagamaan itu ada yang sudah tersusun dalam suatu organisasi yang teratur dan dinamis dan ada pula masih merupakan mana saja yang ada tetapi kegiatannya belum nampak.

Namun demikian dengan keberadaan dari pada organisasi keagamaan tersebut adalah merupakan suatu pertanda bahwa masyarakat kita terutama didaerah pedesaan telah ikut secara aktif untuk membangun warganya dalam rangka menjadikan manusia yang bermental agama dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya.

Untuk maksud tersebut maka dalam tulisan ini akan dilaporkan tentang hasil-hasil penelitian yang telah kami laksanakan pada kedua desa sampel di Kecamatan Dolo, masing desa Kotarindau dan desa Bangga. Pada desa tersebut kami telah menemukan beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan tetapi sebagaimana telah diutarakan diatas bahwa dari beberapa organisasi keagamaan yang ada itu belum seluruhnya tersusun sebagai suatu organisasi yang teratur dan dinamis, melainkan masih ada organisasi yaitu namanya saja ada tetapi kegiatannya belum nampak.

Oleh karena itu dalam laporan ini kami hanya memilih organisasi yang dalam kegiatan sejak terbentuknya telah menampakkan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat bagi anggota-anggotanya bahkan untuk masyarakat desa secara keseluruhan.

a. Nama Organisasi.

Berdasarkan data dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada desa Kotarindau dan desa Bangga bahwa pada kedua desa tersebut telah diketemukan berbagai macam nama dan bentuk organisasi keagamaan antara lain :

1. Pengurus Ta'mirul mesjid atau lazim disebut Pegawai Syarah mesjid.
2. Pengurus Madrasah Alchaerat
3. Perkumpulan Remaja Mesjid.
4. Perkumpulan wanita Islam Alchaerat.

Keempat macam/jenis organisasi tersebut adalah yang ditemukan didesa Kotarindau. Sedangkan didesa Bangga Organisasi keagamaan yang ada adalah :

1. Pengurus Ta'mirul mesjid atau Pegawai Syarah Mesjid.
2. Pengurus Madrasah Alchaerat
3. Perkumpulan Remaja Mesjid.

Pembentukan dari Organisasi tersebut adalah atas dasar prakarsa dari pemuka-pemuka masyarakat terutama adalah tokoh-tokoh agama pada masing-masing desa itu.

Susunan Kepemimpinan.

Setelah mengadakan wawancara dan pengamatan secara langsung maka telah diperoleh data-data mengenai susunan kepemimpinan dari organisasi-organisasi keagamaan itu baik yang berlaku didesa Kotarindau maupun yang ada di desa Bangga. Mengenai pengurus Ta'mirul mesjid (Pegawai Syarah Mesjid) pada umumnya sama. Dimanapun ada mesjid struktur kepemimpinannya tetap sama yaitu terdiri dari :

- Unsur Imam
- Unsur Khatib
- Unsur Bilal
- Unsur Doja (Marbat).

Keempat unsur Pengurus Ta'mirul mesjid tersebut adalah merupakan persyaratan bagi suatu mesjid.

Susunan kepengurusan Ta'mirul itu sangat tradisional tidak dapat dirobah/ditambah atau dikurangi oleh karena sudah merupakan dogma agama (Islam). Namun demikian setiap unsur kepemimpinan tersebut sangat bervariasi untuk setiap desa artinya setiap unsur itu bukan hanya terdiri dari satu orang saja tetapi tiap unsur terdiri lebih dari satu orang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa itu. Demikianlah yang diketemukan pada desa penelitian ini yaitu di desa Kotarindau sebagai ibu kota Kecamatan Dolo terdapat 3

buah mesjid dimana struktur kepemimpinan dalam Pegawai Syarah adalah sebagai berikut :

Mesjid Pertama (Mesjid Jami) :

- Imam tetap 1 orang sedangkan imam pembantu 3 orang.
- Khatib tetap 1 orang sedangkan khatib pembantu 5 orang
- Bilal tetap 1 orang sedang bilal pembantu 2 orang
- Doja tetap 1 orang sedang doja tidak tetap 2 orang

Mesjid Kedua (Mesjid Alchaerat) :

- Imam tetap 1 orang sedang imam pembantu 3 orang
- Khatib tetap 1 orang sedang khatib pembantu 4 orang
- Bilal tetap 1 orang sedang bilal pembantu 2 orang
- Doja tetap 1 orang

Mesjid ketiga (mesjid Alchaerat) :

- Imam tetap 1 orang sedang imam pembantu 1 orang
- Khatib tetap 1 orang sedang khatib pembantu 3 orang
- Bilal tetap 1 orang
- Doja tetap 1 orang

Sedangkan struktur kepemimpinan yang terdapat pada Pegawai Syarah mesjid Bangga terdiri dari :

- Imam tetap 1 orang
- Khatib tetap 1 orang sedang khatib pembantu 2 orang
- Bilal tetap 1 orang
- Doja tetap 1 orang

Selanjutnya mengenai keanggotaan dari Pengurus Ta'mirul Mesjid (Pegawai Syarah Mesjid) adalah semua warga desa yang beragama Islam didesa itu.

Keanggotaan itu dimana-mana sama kecuali yang tidak masuk anggota adalah orang-orang yang beragama lain yang juga warga desa itu.

Mengenai struktur kepemimpinan dari Pengurus Madrasah Alchaerat cabang baik yang ada di desa Kotarindau maupun yang ada di desa Bangga adalah dibawah pembinaan Pengurus Besar Alchaeray Pusat Palu, yang berkedudukan

di Kota Palu. Oleh karena itu struktur kepemimpinan/kepengurusannya adalah sama atau seragam seluruhnya dengan komposisinya terdiri dari :

- Unsur Pelindung – Kepala Desa
- Unsur Penasehat Pemuka Agama Islam
- Unsur Ketua
- Unsur Sekretaris
- Unsur Bendahara
- Anggota-anggota.

Pengurus dari Alchaerat Cabang yang ada di desa Kotarindau dan desa Bangga mempunyai anggota yang terdiri dari seluruh orang tua/wali murid yang anaknya mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah Alchaerat di desa itu. Disamping itu masih ada anggota-anggota kehormatan yang terdiri dari tokoh-tokoh agama di desa itu serta telah menyatakan diri sebagai donatur dalam segala kegiatan agama Islam yang dilakukan di desa itu. Selanjutnya dalam struktur kepemimpinan Remaja Mesjid yang ada di desa Kotarindau adalah terdiri dari :

- Unsur Pelindung : Kepala Desa
- Unsur Penasehat : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Unsur Ketua/Wakil-wakil Ketua.
- Unsur Sekretaris/Wakil-wakil Sekretaris.
- Unsur Bendahara/Wakil Bendahara
- Unsur Seksi-seksi.

Perkumpulan Remaja mesjid yang dewasa ini telah berkembang hampir setiap mesjid di daerah pedesaan adalah berdasarkan pada Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Unsur Haji No. D/Ins/188/1978. Sedang pembentukannya di desa adalah atas inisiatif dari para remaja di desa itu bersama dengan Pengurus Ta'miril Mesjid, Kepala Desa dan tokoh-tokoh agama setempat.

Keanggotaan dari perkumpulan Remaja mesjid yang ada di desa Korarindau sampai sekarang ini berjumlah kurang lebih 160 orang semuanya adalah terdiri para remaja dalam desa

itu. Perkumpulan Remaja mesjid di desa Bangga juga telah dibentuk tetapi perkumpulan tersebut terutama Pengurus langsung ditunjuk oleh Kepala Desa Bangga yang juga terdiri dari :

- Unsur Pelindung/Penasehat
- Unsur Ketua
- Unsur Sekretaris
- Unsur Bendahara
- Unsur Seksi-seksi.

Anggota perkumpulan Remaja Mesjid di desa Bangga adalah remaja-remaja yang ada di desa itu tetapi dalam keanggotaan itu yang nampak aktif adalah anak-anak dari Madrasah Alchaerat di desa itu. Remaja-remaja lainnya kurang aktif hingga dalam wawancara yang kami lakukan dengan beberapa orang tokoh masyarakat diperoleh data bahwa remaja-remaja lainnya banyak yang pergi merotan ke hutan.

Perkumpulan Wanita Islam Alchaerat.

Organisasi Wanita Islam Alchaerat adalah suatu Organisasi wanita-wanita Islam yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi ini mempunyai cabang-cabang pada setiap desa dimana ada Madrasah Alchaerat. Pengurus Besarnya berkedudukan di Kota Palu.

Pembentukan cabang-cabangnya pada setiap desa dikoordinasi langsung oleh Pengurus Besarnya. Hampir semua desa di Sulawesi Tengah yang mempunyai Madrasah Alchaerat dibentuk perkumpulan Wanita Islam Alchaerat termasuk di desa Kotarindau dan desa Bangga. Susunan kepemimpinan dari organisasi Wanita Islam Alchaerat adalah terdiri :

- Unsur Ketua
- Unsur Sekretaris
- Unsur Bendahara
- Unsur Seksi-seksi.

Pembentukan wanita Islam Alchaerat di desa Kotarindau adalah atas inisiatif dari Kaum Ibu yang ada di desa itu bersama dengan Pengurus Ta'mirul Mesjid, tokoh-tokoh agama dan Kepala desa sebagai pelindung dan penasehatnya.

Sedangkan di desa Bangga Pengurus Wanita Islam Alchaera belum dibentuk dan menurut informasi yang diperoleh pembentukannya masih sedang direncanakan.

Dari segi keanggotaan Wanita Islam Alchaerat adalah yang paling besar setiap desa oleh karena yang masuk menjadi anggota adalah semua Wanita yang ada didesa itu mulai dari yang tua sampai anak-anak umur sekolah dasar.

b. Tempat dan Kegiatan.

Dari beberapa Organisasi keagamaan yang dikemukakan diatas dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai tempat-tempat tersendiri.

Pengurus Ta'mirul Mesjid (Pegawai Syarah Mesjid) pusat kegiatannya adalah di mesjid. Di mesjid itulah mereka mengadakan rapat-rapat atau pertemuan bahkan menyampaikan pengumuman-pengumuman tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam pertemuan itu selalu diikut sertakan Kepala Desa, tokoh-tokoh agama dan seluruh anggota pegawai syarah dalam mesjid itu. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Ta'mirul Mesjid antara lain yang bersifat umum : menyampaikan pengumuman dari hasil-hasil pertemuan baik dengan Pimpinan Urusan Agama Tingkat Kecamatan maupun hasil-hasil pertemuan mereka sendiri. Kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat kewajiban dari masing-masing anggota pengurus adalah menghadiri setiap pesta perkawinan, kematian, memandikan mayat, menyembahkannya dan membaca doa tahlil dirumah duka. Disamping itu membersihkan dalam mesjid yang setiap waktu digunakan orang untuk shalat wajib dan shalat Jum'at.

Kegiatan Pengurus Ta'mirul Mesjid untuk setiap desa semuanya sama.

Pengurus Madrasah Alchaerat Pusat kegiatannya adalah di rumah ketuanya atau sering-sering mereka meminjam gedung Madrasah untuk mengadakan rapat dengan orang tua/wali murid agar menyuruh anak-anak ikut berjemaah bersama di mesjid setiap kali shalat sehingga mesjid kelihatannya selalu ramai dikunjugi oleh warga desa secara keseluruhan.

Kegiatan-kegiatan lain yang sering dianjurkan oleh Pengurus

Madrasah Alchaerat adalah menganjurkan kepada warga masyarakat desa agar memasukan anak-anaknya keperguruan Islam oleh karena dengan memiliki pendidikan agama Islam anak-anak dikelak kemudian hari akan menjadi anak-anak yang saleh dan selalu berbakti kepada orang tua, masyarakat dan terutama kepada agama itu sendiri.

Di desa Bangga Pengurus Madrasah Alchaerat kegiatannya dilakukan dirumah Kepala Desa dan biasa juga dilakukan di Balai Desa atas kemauan Kepala Desa. Tetapi sering kegiatan itu dilakukan pada gedung Madrasah Alchaerat.

Kegiatan yang menonjol dalam rangka memperingati Hari-hari besar agama Islam dan sering-sering mengadakan pengajian di mesjid, namun yang banyak mengikutinya adalah murid-murid dari Madrasah itu sendiri. Kegiatan itu dilaksanakan setelah shalat Magrib sampai sembahyang Isa.

Materi kegiatan yang sempat kami ikuti adalah belajar mengaji Qur'an dan dipimpin oleh Uztad yang mengajar pada Madrasah itu. Akan tetapi kalau Uztad berhalangan biasa digantikan oleh salah satu dari pegawai Syarah di mesjid itu. Kegiatan-kegiatan itu tidak secara kontinu dilaksanakan melainkan temporer saja, maksudnya kalau menjelang peringatan hari-hari besar Agama Islam, barulah diumumkan kepada anak-anak Madrasah untuk mengadakan pengajian di mesjid setelah sembahyang Magrib.

Organisasi Wanita Islam Alchaerat

Sebagaimana telah dikatakan terdahulu bahwa satu-satunya organisasi wanita Islam yang hidup dan berkembang di daerah pedesaan Sulawesi Tengah adalah organisasi wanita Islam Alchaerat.

Organisasi ini Pengurus pusatnya berkedudukan pada Pengurus Besar Alchaerat Pusat Palu Sulawesi Tengah yang ada di daerah pedesaan adalah merupakan cabang-cabang termasuk di desa kotarindau dan desa Bangga.

Di Kotarindau organisasi wanita Islam Alchaerat kegiatan-kegiatannya bertempat dirumah ketuanya dan sering meminjam gedung Alchaerat dan tempat-tempat lainnya dalam melaksanakan kegiatannya oleh karena tempat khusus belum ada. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh

organisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan ceramah-ceramah agama setiap Minggu 1 kali dan pembawa-pembawa ceramah Agama itu dari para Uztad yang diundang dan biasanya dari Ustad berpengalaman ataupun dari tokoh-tokoh agama baik yang ada dalam masyarakat desa itu maupun diminta dari Kantor Urusan Agama.
2. Setelah ceramah diadakan selalu diadakan tanya jawab dalam usaha lebih meningkatkan pengetahuan agama di kalangan para anggota wanita Islam Alchaerat setempat.
3. Salah satu cara yang diadakan untuk memperbanyak anggota wanita Islam Alchaerat di desa Kotarindau adalah mengadakan Arisan setiap Minggu/setiap kali ceramah diadakan dengan diadakannya arisan setelah ceramah agama itu makan sangat menarik hati dan mendorong para anggota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau keagamaan itu.
4. Disamping kegiatan mingguan dari wanita Islam Alchaerat maka setiap kali ada hari-hari Besar Agama Islam, wanita Islam selalu ikut berpartisipasi aktif dalam perayaan hari-hari Besar Islam di desa Kotarindau. Bahkan dalam perayaan hari-hari Besar Agama Islam di desa Kotarindau Wanita Islam Alchaerat yang menjadi sponsornya dan pelaksanaannya.
5. Dalam rangka usaha mencari dana untuk kegiatan-kegiatan Wanita Islam Alchaerat ini maka setiap anggota yang baru masuk diwajibkan membayar uang kas Rp. 250,— Disamping itu setiap orang yang kena arisan setiap minggu ditarik dari padanya uang sumbangan sukarela sebanyak Rp. 1.000,—.
6. Berdasarkan dana yang ada di kas diadakan pula kegiatan untuk membeli alat-alat rumah tangga terutama gelas, piring baki, belangan dan alat dapur lainnya sebagai barang inventaris organisasi.
Alat perlengkapan dapur ini dipersewakan kepada para anggota yang membutuhkan dan warga masyarakat lainnya, uang yang diperoleh dari peminjaman itu dimasukkan kedalam kas organisasi.

Demikianlah beberapa kegiatan Wanita Islam Alchaerat yang dapat digambarkan di desa Kotarindau, dan selanjutnya kita akan membahas tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi-organisasi bidang keagamaan.

c. Tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari desa Lokasi Penelitian, terutama yang dilakukan melalui wawancara dengan para pemimpin organisasi. Keagamaan, maka tujuan yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengurus Ta'mirul Masjid (Pegawai Syarah Masjid).

- Bahwa pengangkatan seorang pemimpin dalam organisasi ataupun dalam masyarakat desa Kotarindau dan desa Bangga adalah untuk mengatur segala urusan kemasyarakatan secara tertib dan teratur.
- Bahwa segala kegiatan hidup dan penghidupan dalam masyarakat desa tersebut hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila ada seorang pemimpin sehingga semua perselisihan faham dan perpecahan dapat teratasi.
- Agar seluruh penganut agama Islam di desa Kotarindau dan desa Bangga dapat melaksanakan ibadah agamanya dengan aman, lancar dan tertib berdasarkan ajaran agama Islam yang benar.
- Agar setiap penganut agama Islam mulai dari lahirnya sampai kepada kematiannya dapat diatur menurut ajaran agama Islam.

2. Tujuan dari Pendidikan Madrasah Alchaerat didesa Kotarindau dan desa Bangga.

- Untuk menanamkan Pendidikan beragama terhadap anak-anak sehingga kelak dalam kehidupannya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal bertentangan dengan ajaran Agama.
- Untuk memajukan kehidupan beragama dikalangan seluruh warga desa sehingga eksistensi agama Islam di desa tetap terpelihara sepanjang masa.

3. Perkumpulan Remaja Masjid di desa Kotarindau dan Desa Bangga.

Oleh karena perkumpulan Remaja Masjid dibentuk atas Instruksi dari Departemen Agama maka tujuan yang ingin dicapai adalah identik dengan Instruksi tersebut. antara lain :

- Membina generasi Muda agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan dalam desa melalui media Masjid.
- Mengembalikan citra Masjid sebagai wadah pembinaan mental bagi seluruh warga masyarakat yang hidup di-sekitarnya.
- Memberikan kesempatan kepada remaja putri/putri yang ada di desa untuk mengembangkan kreativitasnya secara aktif melalui media masjid dibawah bimbingan tokoh agama yang berpengalaman.
- Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan melalui masjid maka diharapkan putri/putri remaja di desa tidak mudah terjerumus kepada masalah dikadensi moral.

4. Perkumpulan Wanita Islam Alchaerat.

Tujuan yang ingin di capai adalah :

- Sebagai salah satu wadah dalam mempersatukan Wanita Islam di daerah pedesaan.
- Membina dan meningkatkan pengetahuan keagamaan Wanita Islam di daerah pedesaan.
- Mendorong wanita Islam di daerah pedesaan untuk melaksanakan perintah agama dan menjauhi segala larangannya.

2. Sistim Kepemimpinan.

a. Syarat-syarat dan Faktor pendukung.

Setelah mengadakan wawancara dengan beberapa pemimpin organisasi keagamaan di desa Kotarindau dan desa Bangga, maka untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan syarat-syarat antara lain :

- Memiliki pengetahuan keagamaan dan Lancar membaca Al Qur'an.
- Memiliki pengetahuan tentang cara-cara berorganisasi sehingga ia dapat mengendalikan organisasi dengan baik.
- Memiliki pengaruh dalam msasyarakat serta dapat berkomunikasi dengan seluruh warga desa.
- Mempunyai pandangan jauh kedepan dan penduduk asli di desa itu.
- Mempunyai banyak pertimbangan serta cukup dan ahli menyelesaikan semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Syarat-syarat kepemimpinan yang diuraikan diatas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi pemimpin baik sebagai pemimpin keagamaan maupun sebagai pemimpin formal lainnya.

Disamping syarat-syarat tersebut maka perlu didukung beberapa faktor nantara lain :

- Seorang yang menjadi pemimpin harus jujur, adil dan berani membela kebenaran.
- Dalam perkembangan isistim kepemimpinan pada masyarakat pedesaan semakin dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pembangunan masyarakat pedesaan dan semakin terdesaknya pemimpin tradisional yang selalu mengagungkan keadaan-keadaan masa lalu yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

b. Hak dan Kewajiban.

Pemimpin organisasi keagamaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- Memberikan teguran-teguran, peringatan dan hukuman kepada setiap anggota yang melanggar baik peraturan organisasi apalagi ajaran Agama.
- Berhak mengumpulkan seluruh anggota organisasi dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi.

Kewajiban disini adalah mengayomi seluruh anggota organisasi melindungi ajaran agama, mengambil inisiatif untuk kesejahteraan anggota bahkan untuk kesejahteraan rakyat di desa itu.

Dalam waktu-waktu tertentu ia berkewajiban memberikan ceramah-ceramah agama tentang kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga keadaan yang meresahkan itu dapat dinormalkan kembali.

c. Atribut/Symbol Kepemimpinan.

Dalam organisasi dan kepemimpinan dibidang agama dikenal beberapa gelar/nama yang sering digunakan/dipakai oleh para pemimpin agama yang antara lain :

Ulama, Kiayi, All Sutaz, Ustad, Imam Khatib, Bilal, dan Doja.

Ulama adalah gelar yang diberikan kepada guru besar agama Islam.

Al Ustaz adalah sama dengan guru Pria.

Al Ustazah adalah sama dengan Guru Wanita.

Imam Pemimpin Islam di dalam desa.

Khatib adalah disamping sebagai pembaca khotbah juga dapat berperan sebagai imam apabila imam berhalangan atau sakit. Bilal adalah tukang azan apabila shalat dimulai.

Mengenai tanda-tanda kebesaran dari para pemimpin agama di desa dapat dilihat pada cara mereka berpakaian yang antara lain :

Topi yang dipakai, baju jubah, dan sering mereka membawa tasbeh.

d. Cara pengangkatan dan Upacara.

Dalam organisasi keagamaan terutama organisasi agama Islam didaerah pedesaan tidak ada diketemukan pengangkatan seorang pemimpin dilakukan melalui upacara tertentu. Sepanjang yang penjelasan diperoleh dari lapangan, yaitu dari desa Kotarindau dan desa Bangsa dapat digambarkan sebagai berikut :

Para pemimpin organisasi keagamaan yang dipilih dalam

suatu musyawarah desa, mulai dari unsur, Ketua sampai kepada unsur seksi-seksi, begitu mereka diumumkan menjadi pengurus/pemimpin dalam organisasi yang dibentuk langsung mendapat pengakuan dari anggota-anggota dan masyarakat seluruhnya.

Tidak ada lagi upacara-upacara khusus yang diadakan karena:

- Sejak dari dahulu kala upacara seperti itu tidak pernah dilakukan pada masyarakat desa.
- Kalau harus dilakukan biaya untuk upacara itu diperoleh dari mana.
- Upacara-upacara pengangkatan hanya dilaksanakan pada kerajaan yaitu pelantikan magau dari kerajaan yang bersangkutan.

3. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama Dalam Masyarakat.

Didalam masyarakat pedesaan pengaruh dari pemimpin agama sangat besar terhadap para anggotanya/pengikut-pengikutnya. Pengaruh yang timbul dari pemimpin agama itu bukan karena kharisma yang mereka miliki akan tetapi sebagai pemimpin agama (Ulama, Pendeta, Ustaz, Kiyai dsb.); mereka terpanggil untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Kehadiran para pemimpin agama dikalangan masyarakat pedesaan adalah sebagai pelapor pembaharuan dan bukan untuk dipuja, diberi tanda jasa ataupun ingin mendapatkan kedudukan, akan tetapi semata-mata karena ingin mencari keridhaan dan pertanggungjawaban kepada Allah S.W.T.

Kepribadian seseorang yang memancarkan daya tarik karena ilmunya, akhlakunya dan amaliah sehari-harinya dapat terlihat pada ulama (Drs. Ek. Imam Munawir : Hal. 117).

Oleh karena itu Ulama (pemimpin Umat Islam) sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat pedesaan terutama justru karena beliau adalah orang yang dianggap paling mengetahui tentang masalah keagamaan, sehingga ia menjadi tumpuan pertanyaan, konsultasi dalam masalah kerohanian.

Demikianlah Ulama/pemimpin agama Yang selalu tidak puas dengan keadaan yang nyata dalam masyarakat lebih selalu memberikan/membawakan pembaharuan-pembaharuan. Oleh karena

itu dilakukannya ceramah-ceramah keagamaan baik melalui organisasi keagamaan maupun melalui media lainnya seperti di mesjid-mesjid, dirumah dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari adanya ceramah-ceramah tentang keagamaan maka pengetahuan yang mereka terima telah membawa pengaruh dan perubahan dalam masyarakat pedesaan khususnya dalam masyarakat desa Kotarindau dan desa Bangga.

Adapun pengaruh-pengaruh pemimpin keagamaan yang dapat diungkapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Banyak petugas lapangan yang melakukan motivasi terhadap pembaharuan masyarakat terutama dalam pelaksanaan Keluarga Berencana mendapat sambutan yang acuh tak acuh dari masyarakat. Namun setelah para petugas tersebut mendekati para pemimpin organisasi keagamaan (Ulama, Kiai, Ustaz, Imam Mesjid) dan sebagainya barulah anggota masyarakat desa itu mengetahui dan memahami apa sebenarnya keluarga berencana itu.
- Pengaruh lain yang dapat dikemukakan disini adalah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dari masyarakat desa yaitu semakin ramainya setiap mesjid dikunjungi oleh warga desa oleh karena setelah mengadakan sholat selalu diadakan ceramah-ceramah keagamaan dari para ustaz dan cendekiawan Islam lainnya.
- Oleh karena sering diadakan ceramah-ceramah keagamaan maka pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus dalam bidang agama jarang terjadi di antara warga masyarakat terutama dalam kalangan muda-mudi.
- Dalam melaksanakan pembangunan dalam desa baik pembangunan berasal dari pemerintah maupun pembangunan itu berasal dari swadaya masyarakat sendiri, maka peranan pemimpin keagamaan banyak sekali memberikan motivasi terhadap anggota masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan itu.

Selanjutnya disamping pengaruh pengaruh dari pemimpin keagamaan itu maka fungsi-fungsi kepemimpinan yang di-bawakan adalah :

- Para pemimpin keagamaan dalam masyarakat pedesaan ada-

lah berperan sebagai inovator; maksudnya dengan penglihatannya terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat ia selalu tidak puas, dengan demikian diadakannya, ceramah-ceramah agama baik dimesjid dirumah-rumah atau ditempat-tempat lain yang hasilnya akan membawakan kepada perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.

Fungsi kepemimpinan bidang agama sangat penting dalam membentuk pembangunan bangsa untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual, oleh karena para pemimpin keagamaan itu adalah lahir ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Drs. Ek. Iman Munawir Hal. 120). mengatakan :

Adapun peranan pemimpin-pemimpin agama dan alim Ulama dalam pembangunan itu bisa disimpulkan antara lain sebagai berikut :

- Menterjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat.
- Menterjemahkan gagasan pembangunan kedalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat.
- Memberikan pendapat saran dan kritik yang sehat terhadap ide-ide dan cara-cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan.
- Mendorong dan membimbing masyarakat dan ummat beragama untuk ikut serta dalam pembangunan.

Apa yang dikemukakan oleh Drs. Ek. Munawir tersebut sangat relevan dengan apa yang diperoleh dari lokasi penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya fungsi dan peranan pemimpin-pemimpin dalam daerah pedesaan sangat penting artinya dalam mendorong dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk ikut serta membangun daerahnya. Hal tersebut disebabkan bahwa wibawa para pemimpin agama itu terutama dihati rakyat sehingga fatwanya diterima tanpa ragu-ragu.

Disamping itu mereka mampu berbicara dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat.

B A B VII

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDANG PENDIDIKAN

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan kehidupan bangsa maka salah satu jalur yang harus ditempuh adalah memajukan pendidikan didalam masyarakat. Untuk memajukan pendidikan perlu didukung oleh suatu organisasi yang teratur dan kuat dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pendidikan itu berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Namun demikian salah satu faktor yang paling menentukan dalam organisasi kependidikan itu adalah sistim kepemimpinan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut maka untuk selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian tentang pola kepemimpinan dibidang pendidikan masing-masing desa Kotarindau dan desa Bangsa Kecamatan Dolo Kabupaten Donggala.

1. Organisasi dalam kegiatan pendidikan :

Didesa Kotarindau Kecamatan Dolo terdapat dua macam organisasi yang berorientasi pada bidang pendidikan yaitu :

- a. Organisasi yang bergerak dibidang pendidikan umum yang disebut :
dengan : Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan yang disingkat dengan BP3 desa Kotarindau.
- b. Organisasi yang bergerak dibidang pendidikan agama yang disebut : Pengurus Madrasah Alchaerat Cabang Kotarindau.

Kedua macam/jenis organisasi pendidikan tersebut adalah merupakan ruang lingkup dari laporan panelitian ini, khususnya mengenai sistim dan pola kepemimpinan yang berlaku dalam organisasi itu.

Mengenai desa Bangsa organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan juga terdapat 2 macam yaitu organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengurus Madrasah Aclhaerat Cabang Bangsa.

a. Nama Organisasi.

Telah dikatakan diatas bahwa pada kedua desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdapat dua macam organisasi yang

bergerak dibidang pendidikan masing-masing diberi nama :

1. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Pengurus Madrasah Aclhaerat Cabang.

Susunan kepemimpinan/keanggotaan.

Kedua jenis organisasi yang terdapat pada kedua desa sampel tersebut mempunyai susunan kepemimpinan yang sama yaitu : Unsur Ketua, unsur penulis (Sekretaris) dan unsur bendera. Ketiga Unsur kepemimpinan tersebut merupakan pengurus harian.

Dalam instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 17/0/1974 dan No. 29 thn. 1974.

Tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa susunan dan masa jabatan Pengurus BP3 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah anggota pengurus sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Penulis dan Bendahara dan jika dipandang perlu dapat ditambah sesuai dengan keperluan.
2. Susunan anggota Pengurus terdiri dari orang Tua Murid atau Wali murid dan dapat ditambah dengan warga masyarakat.
3. Kepala Sekolah karena jabatannya diangkat sebagai penasehat pengurus.
4. Ketua penulis dan bendahara merupakan pengurus harian.
5. Pengurus disyahkan oleh anggota BP3.
6. Masa Jabatan pengurus ialah selama 1 (satu) tahun ajaran.

Mengenai keanggotaan dalam BP3 dalam instruksi bersama kedua Menteri tersebut juga telah diatur dan dalam kenyataan dilapangan memang telah disesuaikan yaitu keanggotaan BP3 terdiri dari :

1. Orang Tua murid atau Wali murid.
2. Personil Sekolah.

Disamping itu keanggotaan pada No. 1 dapat diperluas dengan warga masyarakat setempat, tamatan dan orang tua tamatan sekolah yang bersangkutan.

Selanjutnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) mempunyai tingkatan Pengurus yang terdiri dari Pengurus

BP3 tingkat Propinsi, Pengurus BP3 Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Pengurus BP3 tingkat Kecamatan dan Pengurus BP3 Tingkat Desa.

Mengenai susunan kepemimpinan dan keanggotaan Pengurus Madrasah Alchaerat baik yang ada didesa Kotarindau maupun yang ada didesa Bangga mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

- Susunan kepemimpinannya terdiri dari unsur Ketua, unsur Sekretaris dan unsur bendahara disamping itu ditambah dengan seksi-seksi sesuai kebutuhan. Demikian pula keanggotaan dalam kepemimpinan Madrasah alchaerat tersebut adalah terdiri dari seluruh orang tua/Wali murid dan anggota-anggota masyarakat lainnya yang menaruh minat pada pendidikan Madrasah tersebut.

b. Tempat dan Kegiatan.

Untuk mengembangkan kegiatan organisasi/perkumpulan maka salah satu faktor penunjang yang penting adalah tempat. Tanpa adanya tempat yang tetap dalam melaksanakan segala kegiatan sukar organisasi itu berkembang kearah yang lebih baik. Oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan tentang pusat/tempat dan kegiatan organisasi-organisasi pendidikan yang terdapat didesa lokasi penelitian didesa Kotarindau dan desa Bangga sebagai berikut :

Didesa Kotarindau tempat kegiatan dari organisasi pendidikan yaitu Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan (BP3) adalah disekolah Dasar Negeri No. 1 Dolo. Dolo adalah ibu kota Kecamatan Dolo yang terdiri dari desa Kotarindau dan desa Kotaripulu. Dalam ibukota Kecamatan Dolo terdapat 3 Sekolah Dasar Negeri masing-masing SDN No. 1, SDN No. 2 dan SDN Inpres. Ketiga sekolah Dasar Negeri itu 2 buah berada didesa Kotarindau dan 1 buah didesa Kotaripulu.

Dalam tulisan yang dijadikan bahan pembahasan adalah BP3 SDN No. 1 Dolo.

Selama BP3 SDN No.1 Dolo dibentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya antara lain :

- Mengadakan rapat/pertemuan dengan orang/walimurid.
- Membantu memperbaiki gedung sekolah yang bocor dan pemagaran sekolah.

- mengadakan rapat/pertemuan pengurus harian dengan guru-guru sekolah dalam rangka pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan yang telah dimiliki SDN No. 1 Dolo.
- Mengadakan rapat/pertemuan antara pengurus, guru-guru SDN dengan BP3 tingkat Kecamatan yang sampai sekarang ini sudah 5 kali diadakan.

C. Tujuan yang ingin dicapai.

Suatu organisasi yang dibentuk/didirikan baik organisasi/perkumpulan itu didalam masyarakat tradisional apalagi dalam masyarakat yang sudah agak modern/maju sudah pasti mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu yang ingin hendak dicapai. Biasanya perumusan tujuan dari suatu organisasi/perkumpulan yang akan dibentuk itu telah disiapkan lebih dahulu oleh para sponsornya sehingga didalam pembentuknya tinggal memperbaiki redaksionalnya dan menambah/mengurangi disana sini. Dengan demikian orang-orang yang diundang untuk menghadiri pembentukan organisasi tersebut setelah mendengar tujuan yang dibacakan segera tertarik dan langsung menyatakan diri untuk menjadi anggota. Tetapi ada juga keanggotaan tersebut merupakan otomatis karena adanya kaitan erat dengan masalah tersebut seperti contoh karena anaknya menjadi murid sekolah Dasar didesanya maka otomatis orang tua/walinya menjadi anggota dari Badan Pembantu penyelenggaraan Pendidikan (BP3) didesa itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka faktor tujuan yang ingin hendak dicapai oleh suatu organisasi merupakan persyaratan penting bagi suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut orang-orang akan tertarik dan terpengaruh menjadi anggota. Oleh karena itu untuk menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi/perkumpulan BP3 dan Pengurus Madrasah alchaerat yang terdapat pada lokasi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan tujuan yang ingin dicapai :
 - a. Memelihara dan meningkatkan kerja sama antara guru dengan orang tua/wali murid.
 - b. Memelihara dan meningkatkan hubungan yang baik antara keluarga, masyarakat, dengan sekolah.

- c. Memelihara dan meningkatkan tanggung jawab bersama antara masyarakat sekolah dan pemerintah baik secara organisasi maupun secara pribadi.
2. Pengurus Madrasah Alchaerat tujuan yang ingin dicapai.
 - a. Memelihara dan meningkatkan pendidikan agama didalam masyarakat desa.
 - b. Membantu dan menyediakan fasilitas yang erat hubungannya dengan pendidikan agama.
 - c. Menciptakan dan memelihara hubungan yang baik antara orang tua murid dengan guru-guru agama serta dengan pihak pemerintah setempat.
Oleh karena baik didesa Kotarindau maupun didesa Bangsa terdapat organisasi tersebut maka tujuan yang ingin dicapai hampir sama saja oleh karena berasal dari bidang pendidikan yang sama yaitu sekolah Dasar Negeri dan Pendidikan Alchaerat yang pusat utamanya adalah dikota Palu.

3. Sistim Kepemimpinan.

Membahas sistim kepemimpinan yang berlaku pada kedua organisasi pendidikan yang terdapat didesa Kotarindau dan desa Bangsa dapat digambarkan sebagai berikut :

Desa Kotarindau :

a. Syarat dan faktor pendukung.

Persyaratan-persyaratan yang dijadikan dasar untuk memilih pemimpin-pemimpin pada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- mempunyai minat terhadap bidang pendidikan.
- mempunyai pengaruh/terpandang dikalangan orang tua/wali murid dan dikalangan masyarakat luas didesa itu.

Disamping persyaratan tersebut maka faktor lain yang dibutuhkan adalah : mengerti tentang pendidikan, dapat berkomunikasi dengan seluruh anggota dan mempunyai pandangan jauh kedepan.

Sedangkan didesa Bangsa persyaratan yang dibutuhkan bagi seorang diangkat menjadi pemimpin organisasi adalah : seorang yang berpengaruh didesa itu tanpa memperhatikan apakah ia mengerti berorganisasi atau tidak.

Oleh sebab itu desa Bangga orang yang menjadi pemimpin di BP3 juga menjadi pemimpin pula pada Pengurus Madrasah alchaerat.

b. Hak dan Kewajiban.

Semua orang menjadi pemimpin didalam suatu organisasi/ perkumpulan baik organisasi itu bersifat politik maupun yang bersifat sosial, mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu melekat padanya manakala ia telah diangkat dan disahkan sebagai pemimpin dari sesuatu organisasi. Demikian pula halnya dalam organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang ada didesa Kotarindau dan desa Bangga yang menjadi lokasi penelitian ini. Akan tetapi sebelum hak dan kewajiban itu dikemukakan maka suatu hal yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini ialah bahwa pemimpin-pemimpin organisasi yang ada didaerah pedesaan pada umumnya pengetahuan mereka tentang berorganisasi masih rendah sehingga didalam memimpin suatu organisasi sering terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan organisasi yang dipimpinnya.

Hal yang demikian itu terjadi oleh karena para pemimpin organisasi itu belum mengetahui apa yang menjadi haknya dan bagaimana pula ia haru memenuhi kewajibannya. Namun sering terjadi para pemimpin organisasi didaerah pedesaan banyak yang hanya tahu menuntut haknya tetapi tidak mengerti apa kewajibannya demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh dari lapangan bahwa banyak organisasi dibentuk dalam masyarakat pedesaan hanya namanya saja yang ada tetapi kegiatannya tidak ada. Demikian pul ayang sering diketemukan dalam masyarakat pedesaan seorang warga desa (tokoh masyarakat) desa ia menjadi pemimpin untuk lebih dari satu organisasi. Syukurlah kalau tokoh masyarakat desa yang memegang pemimpin lebih dari satu organisasi itu mengerti seluk beluk berorganisasi sehingga dengan demikian ia dapat membangun organisasi-organisasi yang dipimpinnya demi kemajuan untuk desanya.

Selanjutnya akan digambarkan dibawah ini hak-hak dan kewajiban pemimpin BP3 dan pemimpin pengurus

Madrasah Alchaerat yang ada didesa Kotarindau dan desa Bangga sebagai berikut :

Pertama : Hak-hak pemimpin Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan untuk desa Kotarindau dan desa Bangga.

1. Menetapkan/menentukan waktu kegiatan dari BP3 setempat.
2. Menyetujui atau tidak menyetujui pungutan uang dari murid-murid dalam lingkungan sekolah Dasar yang bersangkutan.
3. Menerima penghargaan/imbalan jasa yang diberikan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta serta dari masyarakat luas.

Dari ketiga hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) baik didesa Kotarindau maupun didesa Bangga nampaknya sama, namun dari pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada pada kedua desa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa hak-hak pemimpin BP3 didesa Kotarindau dalam kegiatannya untuk memimpin organisasi dapat terlaksana dengan baik sehingga BP3 yang ada didesa Kotarindau berfungsi sebagaimana adanya.

Sedangkan BP3 didesa Bangga nampaknya hanya namanya saja ada tetapi kegiatannya seluruhnya dikoordinasikan oleh Kepala Desa Bangga. Hal tersebut terjadi oleh karena sistim kepemimpinan yang berlaku didesa Bangga masih didominasi kepemimpinan tradisional dimana organisasi-organisasi yang dibentuk didalam desa itu sifatnya bukan otonom, oleh karena kedudukan kepala desa pada setiap organisasi yang dibentuk adalah Kordinator dan beliau yang menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan.

Kedua : Hak-hak Pengurus Madrasah Alchaerat didesa Kotarindau.

1. Pengurusan wakaf Madrasah Alchaerat
2. Menentukan pergantian pengurus Madrasah Alchaerat.

3. Menetapkan/menentukan pembayaran uang Madrasah untuk setiap murid perbulan.
4. Menghadiri Musyawarah/rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar Pusat Alchaerat di Palu.
5. Menentukan/menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus Madrasah Alchaerat.

Hak-hak pemimpin Madrasah Alchaerat yang ada didesa Kotarindau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hak hak yang dimiliki oleh Pengurus Madrasah Alchaerat didesa Bangga oleh karena kedua Madrasah tersebut merupakan cabang dari Pusat Alchaerat di Kota Palu.

Akan tetapi apabila diamati lebih jauh antara kedua pengurus tersebut maka penggunaan hak dari Pengurus Madrasah Alchaerat desa Kotarindau nampak lebih demokratis sedangkan didesa Bangga hak-hak tersebut masih dibatasi oleh kekuasaan/wewenang dari Kepala Desa Bangga selaku Kordinator/Penasehat untuk seluruh organisasi yang ada didalam desa Bangga.

Kewajiban-kewajiban.

Pertama : Kewajiban pemimpin Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan di desa Kotarindau dan didesa Bangga.

1. Mendorong dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara orang tua/wali murid, keluarga, masyarakat, sekolah.
Dengan pemerintah baik secara organisatoris maupun secara perorangan.
2. Membantu kelancaran kegiatan pendidikan tanpa mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang Kepala Sekolah, guru dan instansi pembina pendidikan yang bersangkutan.
3. Mengusahakan bantuan dari orang tua murid/masyarakat terhadap perbaikan-perbaikan sa-

rana/prasarana dalam kelancaran jalannya pendidikan dan pengajaran.

4. Ikut mengamati/memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada didesa itu.
5. Memberikan pertanggung jawaban kepada orang tua/wali murid tentang segala kegiatan dan penggunaan keuangan selama masa jabatannya.

Kedua : Kewajiban Pengurus Madrasah Alchaerat di desa Kotarindau antara lain :

1. Memelihara hubungan baik antara orang tua/wali murid, guru dan masyarakat luas sehingga eksistensi Madrasah Alchaerat yang ada di desa tetap ada sepanjang masa.
2. Membayar gaji guru-guru Madrasah Alchaerat sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Mengusahakan agar guru-guru Madrasah Alchaerat tinggal bersama di desa ia mengajar.
4. Mengusahakan pembangunan gedung Madrasah Alchaerat yang permanen bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat.
5. Ikut memelihara terciptanya tata tertib dalam masyarakat berdasarkan ajaran agama masing-masing.

Demikian beberapa kewajiban-kewajiban penting yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin dalam Madrasah Alchaerat di desa Kotarindau sedangkan kewajiban Pengurus Madrasah Alchaerat di desa Bangga pada prinsipnya sama, tetapi pelaksanaan kewajiban itu selalu bersama-sama dengan kepala desa sehingga dengan demikian pelaksanaan kewajiban pelaksanaan kewajiban itu lebih mantap dan dapat mencapai sarannya.

c. Atribut/Symbol kepemimpinan.

Dalam bab-bab terdahulu telah dikatakan bahwa mengenai atribut/symbol kepemimpinan yang dipakai oleh para pemimpin dibidang organisasi dalam masyarakat pedesaan sepanjang pengamatan dan penelitian yang kami laksana-

kan hampir-hampir tidak ada lagi Pernah kami mengadakan wawancara dengan beberapa orang tokoh masyarakat dilokasi penelitian ini sebagai berikut :

Pertanyaan : Bapak sebagai pemimpin/Ketua organisasi /Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) didesa Kotarindau :

1. Apakah Bapak mempunyai gelar/nama khusus untuk itu.
2. Kalau Bapak mempunyai gelar/nama khusus apakah bapak juga memiliki tanda-tanda kebesaran?

Jawaban : Gelar/nama khusus ataupun tanda-tanda kebesaran yang dipakai oleh seseorang yang dijadikan pemimpin hanya ada pada zaman raja-raja suku bangsa Kaili pada zaman dahulu Contoh: Tadulako-Menteri Peperangan. Tadulako juga memakai tanda-tanda kebesaran seperti siga (ikat kepala) merah, pakai guma/kaliavo (parang panjang tipis dengan prisai). Sekarang ini pemimpin organisasi tidak lagi memakai gelar/nama khusus apalagi memakai tanda-tanda kebesaran.

Akan tetapi dalam sistim organisasi modern sekarang semua pemimpin organisasi disebut dengan nama ketua Sekretaris atau bendahara. Jadi sudah mengikuti cara-cara berorganisasi modern.

d. Cara pengangkatan dan upacara.

Mengenai pengangkatan pemimpin organisasi baik dalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) maupun dalam Pengurus Madrasah Alchaerat yang ada di desa Kotarindau dan desa Bangga bahwa setelah mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat pada kedua desa tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa seseorang yang terpilih untuk menjadi Ketua/pemimpin dalam suatu organisasi/perkumpulan yang dibentuk didesa itu langsung saja ia diangkat dan disyahkan oleh seluruh para hadirin. Akan tetapi pengangkatan itu tidak memakai surat keputusan namun seorang yang ter-

pilih pada waktu itu langsung mendapat pengakuan dari masyarakat. Berdasarkan pengakuan inilah pemimpin yang baru diangkat tersebut dihormati dikalangan warga desa sehingga dengan demikian iapun melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Demikian pula pengangkatan seseorang yang menjadi pemimpin organisasi tidak diucapkan, kecuali pada zaman kerajaan dahulu.

4. Pengaruh dan fungsi Kepemimpinan Bidang Pendidikan dalam Masyarakat.

Pada Bab-bab terdahulu telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang pendidikan dalam masyarakat pedesaan khususnya di desa Kotarindau dan desa Bangga adalah sebagai berikut :

Pengaruh disini dimaksudkan sejauh mana organisasi dalam bidang Pendidikan yaitu organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dapat mendorong warga masyarakat desa Kotarindau dan desa Bangga untuk turut berpartisipasi aktif dalam memajukan pendidikan di desanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi kepemimpinan dalam bidang Pendidikan adalah sejauh mana seorang pemimpin dalam bidang pendidikan di desa Kotarindau dan desa Bangga telah dapat menerapkan fungsi-fungsi seperti dalam perencanaan, pengorganisasian serta fungsi-fungsi lainnya dalam statusnya sebagai pemimpin organisasi pendidikan pada kedua desa tersebut.

Untuk menggambarkan pengaruh dan fungsi kepemimpinan tersebut maka menurut pengamatan dan hasil-hasil wawancara yang diperoleh dari kedua lokasi penelitian itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Desa Kotarindau: Berdasarkan pengamatan dan hasil-hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa tersebut bahwa pengaruh dari organisasi BP3 terhadap warga masyarakat desa Kotarindau dalam bidang pendidikan dapat dijelaskan antara lain :

- Sejak Badan pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) didirikan Tahun 1977 dengan anggotanya kurang lebih 110 orang sampai dewasa ini anggotanya sudah mencapai kurang lebih 200 orang.

- Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP3 seperti mengadakan rapat pengurus, rapat tahunan, mengadakan perbaikan-perbaikan serta pemeliharaan terhadap gedung SDN adalah suatu pertanda terjalannya komunikasi yang lancar antara sekolah keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Dengan adanya anjuran dan dorongan yang baik dari pemimpin-pemimpin Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) kepada seluruh warga masyarakat desa Kotarindau mengenai pentingnya pendidikan, maka berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala – SDN No. 1. Dolo bahwa hampir tidak ada anak-anak yang umur sekolah, yang belum memasuki sekolah Dasar Negeri.

Selanjutnya mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) Desa Kotarindau dapat dijelaskan sebagai berikut :

Apa yang disebut fungsi-fungsi kepemimpinan secara teoritis sebenarnya para pemimpin organisasi dalam masyarakat pedesaan belum tahu hal itu.

Mereka belum mengerti berapa fungsi-fungsi pemimpin (managemen) yang perlu dilaksanakan seorang pemimpin organisasi dan mereka belum mengerti fungsi managemen menurut Sarjana mana yang cocok diterapkan dalam masyarakatnya.

Namun demikian didalam kenyataannya para pemimpin organisasi didalam masyarakat pedesaan itu sadar atau tidak, mengerti atau tidak telah melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan itu menurut cara serta penghayatan mereka sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Suatu hal yang sangat membantu para pemimpin organisasi didaerah pedesaan adalah apabila organisasi yang dipimpinya itu mempunyai anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Disanalah mereka belajar tentang fungsi-fungsi kepemimpinan yang perlu mereka terapkan dalam mengendalikan organisasi yang dipimpinya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas maka sebagai hasil wawancara dengan Pimpinan BP3 SDN No. I Dolo Bapak Aidit P. dibawah ini akan dikemukakan beberapa fungsi

kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi tersebut antara lain :

- Merencanakan berapa dana dan darimana sumbernya untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan BP3 selama tahun ajaran yang berjalan dan apa yang menjadi sasaran kegiatan itu.
- Bagaimana organisasi BP3 di desa Kotarindau itu dapat membantu terpeliharanya kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah sehingga Pendidikan berjalan lancar.
- Mendorong kepada seluruh orang tua/wali murid bahkan seluruh warga desa Kotarindau agar selalu bekerjasama dalam membantu usaha-usaha Pendidikan didesa ini demi tercapainya kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Disamping hal yang dikemukakan tersebut maka pimpinan BP3 selalu mengadakan pengamatan terhadap murid-murid sekolah yang tidak aktif masuk sekolah. Atas dasar itu ia mengadakan pendekatan dengan orang tua murid atau biasa juga dibicarakan dalam pertemuan atau diumumkan dimesjid sesudah shalat Jumat.

Selanjutnya mengenai pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang pendidikan di desa Bangga dapat digambarkan bahwa pada prinsipnya sama. Akan tetapi organisasi BP3 yang ada di desa Bangga sebagaimana dikatakan terdahulu hanya namanya saja yang ada tetapi keaktifan dari pemimpinnya kurang sekali. Hal tersebut disebabkan oleh karena Kepala Desa Bangga merupakan yang menentukan segala kegiatan yang harus dilaksanakan. Memperhatikan gejala-gejala tersebut maka setelah kami mengadakan wawancara sambil lalu dengan Kepala Desa Bangga, kami memperoleh keterangan sebagai berikut : Bahwa kebijaksanaannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang demikian adalah disebabkan teman-temannya yang diangkat menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi di desa ini masih kurang sekali pengetahuannya tentang berorganisasi.

Jadi dengan data tersebut diatas sudah dapat diperjelas bahwa untuk mengungkapkan pengaruh dan fungsi apa yang telah diperankan oleh pemimpin dibidang pendidikan (BP3) desa Bangga mereka dapat dikatakan bahwa sistim kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan

kepala desa Bangga dan juga situasi dan kondisi dari masyarakat desa itu sendiri.

Mengenai pengaruh dan fungsi kepemimpinan dalam Pengurus Madrasah Alchaerat di desa Kotarindau adalah sebagai berikut :

4. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat bahwa pengaruh perkumpulan tersebut dapat digambarkan antara lain :
 - a. Sejak berdirinya perkumpulan Madrasah Alchaerat sampai sekarang ini telah memiliki kurang lebih 1000 pohon kelapa yang diwakafkan oleh warga desa Kotarindau.
 - b. Dengan Eksistensi Madrasah Alhairaat didesa Kotarindau kehidupan beragama didesa itu nampaknya sangat menggembirakan oleh karena berdasarkan pengamatan langsung dari kami, bahwa didesa itu ada 3 Mesjid. Setiap kali Shalat selalu ramai dikunjungi oleh warga desanya baik Orang tua maupun generasi mudanya. Bahkan pada Setiap mesjid mempunyai perkumpulan/Organisasi yang disebut: "Remaja Mesjid."
 - c. Pengaruh lain yang tidak kurang pentingnya yang nampak dalam Masyarakat desa Kotarindau adalah jarang sekali terjadi kasus-kasus yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama terutama yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam.

Selanjutnya mengenai fungsi kepemimpinan yang diterapkan oleh para pemimpin dibidang *pendidikan agama didesa Kotarindau* dalam terutama sekali dalam mengelola wakaf.

Hasil dari Wakaf tersebut adalah merupakan dasar dalam merencanakan dan mengatur segala sesuatu yang erat kaitannya dengan usaha-usaha memajukan Bidang Pendidikan Agama didesa itu. Namun suatu hal yang perlu diketahui bahwa Wakaf bukan merupakan satu-satu Sumber Keuangan dari Madrasah Alhaireat, tetapi masih ada lagi sumber-sumber keuangan dari Masyarakat yang kesemuanya itu merupakan fungsi kepemimpinan Madrasah tersebut untuk mengelolanya.

Sedangkan pengaruh dan fungsi organisasi bidang pendidikan Agama di desa Bangga dapat digambarkan antara lain :

Di desa Bangga pengaruh dari perkumpulan Madrasah juga dapat dirasakan seperti dewasa ini perkumpulan tersebut telah memperoleh wakaf sejumlah kurang lebih 300 pohon kelapa. Akan tetapi pengaruhnya terhadap warga masyarakat desa terutama dalam melakukan jemaah bersama di mesjid masih kurang. Dari pengamatan selama kurang lebih 10 hari berada di desa itu kami menemukan dan ikut sholat bersama di mesjid hanya anak-anak yang berumur 10 tahun kebawah. Berbeda sekali dengan keadaan di desa Kotarindau.

Selanjutnya fungsi kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin Madrasah Alchaerat di desa Bangga terutama adalah pengelolaan wakaf sedangkan mengenai kegiatan yang bersangkutan dengan bidang pendidikan agama untuk waktu-waktu yang akan datang banyak dikonsultasikan ditentukan kepala Desa Bangga dalam suatu musyawarah desa yang diikuti selain Pengurus Madrasah Alchaerat juga diikuti oleh tokoh/pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di desa itu.

Setelah membahas organisasi BP3 dan organisasi pengurus Madrasah Alhairat cabang di desa kotarindau dan desa Bangga, maka selanjutnya dalam laporan ini akan dibahas pula organisasi pendidikan yang antara lain :

1. Organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk desa Kotarindau dan desa Bangga.
2. Organisasi informal yang juga bergerak dalam bidang pendidikan seperti : pendidikan dalam rumah tangga oleh orang tua/sanak saudara.
Pendidikan ini adalah: mengajar anak-anak membaca Al-Qur'an bertingkah laku yang baik.
Disamping itu ada juga diadakan di Mesjid dan tempat-tempat tertentu.
Organisasi pendidikan informasi ini tidak dibahas dalam laporan ini, karena tidak tersusun sebagai suatu organisasi yang teratur; tidak mempunyai ketua, sekretaris dan bendahara, dan hanya berlaku dalam lingkungan keluarga saja.

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

a. Susunan kepemimpinan/keanggotaan.

Pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) pada kedua desa penelitian ini sama yaitu :

Unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara. Ketiga unsur kepemimpinan tersebut adalah merupakan pengurus harian. Ketua PKK adalah isteri dari kepala desa.

Mengenai keanggotaan dalam pendidikan kesejahteraan keluarga adalah semua ibu-ibu yang ada di desa itu.

Pengurus pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) mempunyai tingkatan pengurus yang terdiri, pengurus PKK tingkat kecamatan, pengurus PKK tingkat kabupaten, pengurus PKK tingkat Propinsi dan tingkat Nasional.

b. Tempat dan kegiatan.

Dalam mengembangkan kegiatan organisasi PKK pada kedua desa Penelitian ini adalah pada Balai Desa yang telah ada. Tetapi kadang kala kegiatan diadakan di rumah ketua yaitu di rumah ibu kepala desa. Pada kedua tempat itu secara bergantian diadakan :

- Rapat/pertemuan dengan seluruh anggota PKK.
- Rapat/pertemuan pengurus harian PKK untuk merencanakan program kerja setiap tahun anggaran. Hal dimaksudkan oleh karena setiap tahun PKK juga telah menerima bantuan dari Bangdes sejumlah Rp 250.000
- Mengadakan kegiatan-kegiatan seperti : menyulam, memasak-memasak membuat kue/roti dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga.

c. Tujuan yang ingin dicapai.

Pendidikan kesejahteraan keluarga yang merupakan sarana untuk pendidik para ibu-ibu rumah tangga yang di desa. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Membahas dan meningkatkan pendidikan ibu-ibu rumah tangga di daerah pedesaan.
- b. Membantu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam setiap rumah tangga di daerah pedesaan.
- c. Membantu dan meningkatkan hubungan yang baik antara sesama rukun Tetangga dan rukun Keluarga di daerah pedesaan bahkan memelihara hubungan

yang baik antara rukun keluarga rukun Tetangga dan pemerintah setempat.

Organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) pada setiap desa di seluruh Indonesia ada sehingga tujuan dan keberadaan organisasi ini mempunyai sasaran yang sama sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu maka organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga baik di desa Kotarindau maupun PKK yang ada di desa Bangga mempunyai tujuan yang sama. Namun perlu diingat bahwa PKK di desa Kotarindau dari segi struktur organisasinya, sistim kepemimpinannya dan tempat-tempat kegiatannya jauh lebih baik dari yang ada di desa Bangga.

2. Sistim kepemimpinannya.

a. Syarat-syarat dan faktor pendukung :

dalam organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga persyaratan yang dijadikan sebagai dasar untuk memilih pemimpin baik untuk desa kotarindau maupun untuk Bangga yaitu :

- Unsur ketua harus isteri Kepala desa atau yang ditunjuk oleh Kepala desa.
- Mempunyai pengaruh/terpandang dikalangan Masyarakat desa yang bersangkutan.
- Mempunyai/memiliki ketrampilan dalam berorganisasi serta mempunyai kemampuan untuk menggerakkan anggota-anggota PKK di desa itu.

Antara desa Kotarindau dan desa Bangga berdasarkan data yang diperoleh bahwa pemilihan unsur ketua saling berbeda yaitu kalau didesa Kotarindau benar-benar unsur ketua adalah isteri Kepala desa dan mempunyai/memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi.

Sedangkan pada desa Bangga unsur ketua sekertaris dan bendahara dipilih seadanya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas.

Sehingga dalam kegiatannya sering menimbulkan rasa tidak puas terhadap anggota-anggota lainnya yang mengerti tentang organisasi.

b. Hak dan kewajiban.

Pada umumnya masyarakat pedesaan khususnya di desa Kotarindau dan desa Bangga, pengetahuan

mereka untuk berorganisasi masih rendah, sehingga mereka yang menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut menganggap organisasi tersebut adalah milik mereka.

Hal tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban mereka dalam organisasi tersebut tidak dapat membedakannya oleh karenanya dalam tubuh organisasi tersebut sering terjadi perbedaan paham mengenai penggunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau perbedaan paham sudah terjadi maka yang menang adalah yang menjadi pemimpin organisasi dan mereka saja tanpa menghiraukan anggota-anggota lainnya. Akibatnya organisasi tidak dapat berkembang dengan baik.

c. Atribut/symbol kepemimpinan.

Dalam organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga nampaknya tidak ada tanda-tanda atau symbol yang mereka pakai sebagai atribut kepemimpinan. Akan tetapi pada organisasi PKK BAIK DIDESA Kotarindau dan Bangga, maupun desa-desa lainnya dianjurkan oleh pemerintah desa atau pemerintah lebih tinggi tingkatannya, agar semua pengurus dan anggota-anggota dari organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga harus memakai pakaian seragam. Warna pakaian seragam itu diserahkan kepada pengurus PKK itu sendiri untuk memilihnya.

Jadi gelar, atau tanda-tanda kebesaran yang dipakai oleh para pemimpin PKK di desa penelitian tidak ada.

d. Cara pengangkatan.

Seseorang atau para pengurus organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga dipilih untuk menjadi ketua, sekertaris, bendahara adalah berdasarkan hasil pertemuan pemerintah desa dengan anggota-anggota masyarakat (kaum ibu) yang ada didalam desa itu. Biasanya pengurus PKK di desa itu dilantik oleh Camat dalam suatu upacara khusus yang dipimpin oleh Kepala desa dan dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan kaum ibu yang ada di desa itu.

B A B VIII BEBERAPA ANALISA

1. Pengarus Kebudayaan terhadap Sistim Kepemimpinan di pedesaan.

Perkembangan kemajuan Zaman tak dapat kita bendung atau batasi. Demikian pula percampuran atau pembauran kebudayaan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain juga tak dapat dicegah. Bahkan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya Radio, Film Televisi dan sebagainya sangat besar pengaruhnya terhadap sistim kehidupan manusia dan sekaligus mempengaruhi pula tata nilai yang berlaku pada tempat itu. Hal-hal tersebut berlaku pula pada desa-desa yang dekat dengan pusat-pusat perdagangan bahkan akan mengalami perubahan yang dratis. Situasi yang demikian itu merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi resiko dari pergaulan antar sesama manusia di dalam suatu masyarakat. Namun suatu hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh manakah pengaruh kebudayaan itu dapat merubah suatu sistim tata nilai kemasyarakatan pada suatu masyarakat desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengertian kebudayaan adalah suatu manifestasi berpikir dan merasa orang-seorang atau segolongan masyarakat tertentu dalam seluruh kehidupannya yang dapat berwujud dilapangan sosial, Ekonomi, Agama, kesenian dan lain-lain.

Hal ini menandakan bahwa kenyataan kehidupan dalam masyarakat pedesaan banyak mempengaruhi segi sosial, kelembagaan dan segi pemerintahan.

Disamping itu dengan terbukanya komunikasi yang luas antara desa dengan kota, maka telah banyak pula membawa nilai-nilai baru, yang pada akhirnya akan terjadi pergeseran nilai yang di anut oleh masyarakat pedesaan.

Demikianlah nilai-nilai itu dapat mempengaruhi cara berpikir dan berbuat seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sistim kepemimpinan masyarakat pedesaan pengaruh-pengaruh kebudayaan dapat dibagi sebagai berikut :

Bahwa dengan diterapkannya sistim administrasi Politik Nasional telah menimbulkan akibat sampingan yang positif dan negatif yaitu disatu pihak penduduk masyarakat pedesaan telah berpikir secara lebih kritis, sedangkan dilain pihak karena

adanya perkembangan baru dalam sistim administrasi politik pada pemerintahan desa yang masih kurang mendapatkan bimbingan yang terarah, sehingga mengakibatkan krisis kepemimpinan di daerah pedesaan. Krisis kepemimpinan itu antara lain timbulnya sifat yang berjangkit kepada para pemimpin di daerah pedesaan sehingga menimbulkan masalah.

Masalah krisis kepemimpinan di daerah pedesaan perlu mendapatkan perhatian khusus sebab kalau hal tersebut dibiarkan berlarut-larut dapat berakibat lebih buruk lagi.

Dalam pada itu sistim kepemimpinan di pedesaan tidak lagi menampakan sifat kolektif dan kegotong-royongan yang utuh dan berwibawa, tetapi sudah mengarah kepada sistim untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagai contoh.

Dalam desa penelitian ini diperoleh informasi bahwa baik di desa Kotarindau maupun di desa Bangga terdapat proyek-proyek Bangdes yang tidak selesai oleh karena dananya telah habis entah kemana.

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistim kepemimpinan di daerah di pedesaan telah banyak dipengaruhi kebudayaan terutama pengaruh dalam memenuhi kebutuhan pribadi/golongan yang mengakibatkan pergeseran pergeseran nilai yang mau atau tidak akan menimbulkan benturan sosial. diantara sesama anggota masyarakat.

Sistim Kepemimpinan Pedesaan sehubungan sistim Administrasi Politik Nasional.

Dahulu dimasa jayanya kerajaan-kerajaan, sebelum kemerdekaan di tahun 1945, kehidupan di desa aman tenteram dan terdapat solidaritas yang tinggi di antara penduduk, cukup makan, dan semangat kerja tinggi dibawah seorang pemimpin formal yaitu kepala desa. Kepala Desa pada waktu itu tidak dipilih, tetapi langsung ditunjuk oleh orang-orang tua desa berdasarkan keturunan. Sistim pemerintahan desa pada waktu itu sangat tradjsional sehingga sampai dimasa kemerdekaan dan pembangunan dewasa ini sistim tersebut masih banyak dipraktakan didaerah pedesaan. Keadaan desa pada waktu itu memperlihatkan suatu kehidupan sosial yang stabil akan tetapi keadaan ekonominya mengalami stagnasi oleh karena keadaan tersebut diiringi dengan seringnya terjangkit penyakit menular,

pakaian atau sandang sedernana, pendidikan hampir tidak ada, pembayaran pajak formal yang dirasakan cukup berat yang dipungut oleh Jepang dan Belanda (B.N. Masben: 1980).

Apa yang diuraikan diatas itu adalah merupakan gambaran umum yang dialami oleh setiap desa dalam sistim pemerintahan pada waktu itu. Para pemimpin desa pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak oleh karena keterbatasan-keterbatasan fasilitas dan sebagainya.

Akan tetapi dizaman kemerdekaan dan dizaman pembangunan sekarang khususnya pada lokasi penelitian ini telah banyak membawa perubahan terutama dalam sistim pemerintahan yang feodal desa diganti dengan sistim demokrasi. Kepala Desa tidak lagi ditunjuk berdasar keturunan tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak banyak membawa perubahan pada penduduk desa bahkan mereka tetap berada dalam kehidupan yang tradisional. Dengan diterapkan sistim Administrasi Politik nasional di daerah pedesaan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 maka sistim pemerintahan di pedesaan mengalami perubahan antara lain :

Diterapkannya sistim pemerintahan desa yang terdiri dari unsur Kepala Desa, unsur Sekretaris dan unsur Staf (Unsur Umum, Urusan Keuangan, Urusan Kesejahteraan dan urusan Administrasi).

Disamping itu dibentuk pula Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Dengan diterapkannya sistim Administrasi Politik Nasional yang baru pada daerah pedesaan telah banyak membawa perubahan dalam sistim kemasyarakatan dan sistim pemerintahan desa.

Perubahan-perubahan itu mempengaruhi pula sistim kepemimpinan yang tradisional/feodal menjadi sistim pemerintahan demokratis.

Namun dalam kenyataan di daerah pedesaan belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena beberapa faktor :

Pertama : Bahwa dalam masyarakat pedesaan masih sangat kekurangan tenaga-tenaga yang terdidik untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut sehingga dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan banyak menimbulkan hambatan dan kesalahan yang pada akhirnya menimbulkan kesalah fahaman dan terjadilah bentur-

an-benturan sosial antara golongan-golongan yang berkepentingan.

Kedua : Bahwa walaupun sistim Administrasi Politik nasional telah diterapkan pada seluruh daerah pedesaan di Indonesia umumnya dan khususnya pada desa lokasi penelitian ini masih didominasi oleh sistim kepemimpinan tradisional. Namun semuanya telah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat desa. Pergeseran nilai-nilai itu adalah merupakan pertanda bahwa tata kehidupan dalam masyarakat pedesaan yang baru telah tumbuh dan berkembang serta meninggalkan nilai-nilai lama. Fakta dan pergeseran nilai-nilai hidup sebagai akibat dari sistim Administrasi Politik Nasional membutuhkan suatu therapi dan pembangunan yang serius, sebab kalau tidak nanti akan merupakan masalah dalam sistim kehidupan rakyat di pedesaan.

3. Sistim kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional.

Hampir seluruh desa yang ada di Indonesia mempunyai sistim pemerintahan. Kekuasaan yang tertinggi pemerintahan di desa itu terletak ditangan Kepala Desa sebagai seorang pemimpin formal. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa selalu dikontrol oleh orang-orang tua desa (*motua Nungata*).

Disamping pemimpin formal maka dalam desa masih ada lagi pemimpin informal. Pemimpin informal terdiri dari pemimpin agama, pemimpin/Ketua/Anggota adat, para dukun serta kaum cendekiawan di desa dan orang kaya di desa itu. Para pemimpin informal ini banyak yang menjadi pemimpin organisasi/perkumpulan kemasyarakatan di desa, sehingga mereka itu mempunyai pengaruh yang luas dalam tata kehidupan di desa itu.

Dalam kenyataan tata kehidupan di desa baik yang berlaku dalam desa penelitian ini maupun desa diluarnya mulai dari zaman kemerdekaan sampai sekarang ini tidak banyak mengalami perubahan. Apalagi dengan sistim administrasi Politik Nasional masyarakat desa banyak dirapatkan dengan segala bentuk organisasi, Birokrasi, pungutan dan sistim politik yang pada umumnya hal-hal tersebut masyarakat desa belum mengetahui secara mendalam.

Banyak masyarakat yang ikut ramai atau ikut-ikutan saja mungkin dengan keadaan terpaksa.

Dalam keadaan yang demikian itu kepala desa yang disebut sebagai pemimpin formal telah dianjurkan dalam memimpin masyarakat harus berdasarkan Pancasila, demokrasi dengan musyawarah/mufakat dalam melaksanakan pembangunan di desa. Namun hal itu belum dapat terlaksana dan yang banyak dipraktikkan adalah sistem kepemimpinan yang feodal dan tradisional.

Dalam sistem pembangunan Nasional sebessarnya pemerintah telah menyadari pentingnya pembangunan desa oleh karena desa adalah merupakan landasan dari pada negara dan masa depan kehidupan bangsa. Dalam kenyataan sekarang ini hampir semua Departemen mempunyai kepentingan untuk mengurus dan mengembangkan desa. Akan tetapi dengan sistem yang demikian itu menimbulkan kelemahan-kelemahan dalam penanganan pembangunan desa itu menjadi simpang siur dan tidak berkesinambungan, kurang konsisten dan kurang bertanggung jawab.

Apalagi program-program pembangunan desa yang direncanakan oleh Departemen-Departemen itu tidak terkordinasi bahkan sering terjadi dualisme yang akhirnya saling menyalahkan diantara Departemen.

Sistem yang demikian itu walaupun sekarang ini telah disadari namun belum dapat dipecahkan/ditemukan penyelesaiannya. Yang jelas biaya, tenaga dan waktu banyak terbuang tanpa hasil yang berarti. Siapa yang dituntut sebagai penanggung jawabnya juga kurang jelas. Akhirnya desa dan masyarakat pedesaan yang menderita sebagai akibat dari ketidak beresan, Namun sampai sekarang ini masih banyak departemen yang berlomba-lomba membangun daerah pedesaan, akan tetapi kalau diamati secara cermat dan teliti maka belum ada satu Departemenpun yang konsekwen dan bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan di daerah pedesaan sesuai cita-cita bangsa dan sistem pembangunan nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan walaupun telah banyak dipengaruhi oleh sistem Administrasi Politik Nasional, namun dalam kenyataan sehari-harinya para pemimpin dipedesaan itu masih dipengaruhi oleh sikap feodal dan tradisional. Hal ini ditambah pula dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah, sehingga kreatifitas mereka

terbatas dan tidak tanggap terhadap sistim pembangunan nasional yang diintrodusir oleh Departemen-departemen.

Oleh karena itu diperlukan pembinaan masyarakat pedesaan secara kualitas dan kuantitas untuk menangani dan ikut secara aktif membangun daerahnya dalam usaha mencapai cita-cita bangsa.

BIBLIOGRAFI

1. BM. Marbun SH 1980 Proses Pembangunan Desa menyongsong tahun 2000, Penerbit Erlangga Jakarta.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri Pembentukan Badan Penyelenggara Pendidikan.
Azas-azas Kepemimpinan dalam Islam, Penerbit Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
3. Iman Munawir Drs. Azas-azas Kepemimpinan dalam Islam, Penerbit Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
4. J.P.A.F. Polak Mayor Drs. 1960 Sosiologi, Suatu buku pengantar ringkas Penerbit Balai Buku Ichtiar Jakarta.
5. Kanor Statistik Kabupaten Donggala 1981 Registrasi Penduduk Kabupaten Donggala.
6. Kuntjaraningrat 1974 Pengantar Antropologi Cetakan ke IV Aksara Baru Jakarta.
1977 Metode-metode Penelitian Masyarakat Penerbit, PT Gramedia Jakarta.
7. Murhadiantomo 1983 Birokrasi dan Kepemimpinan Penyunting Dewan Redaksi Penerbit, Hapsara Surakarta.
8. Taliziduhu Ndraha 1981 Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa Penerbit PT. Bina Aksara Jakarta.
9. Thamrin Hamdan 1983 Beberapa Pendekatan dalam Pengkajian Kepemimpinan di Pedesaan Indonesia, Makalah dalam Lokakarya Tenaga Peneliti di Cisarua Bogor.
10. Phil, Astrid S. Susanto 1979. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial Penerbit Binacipta Bandung.

LAMPIRAN I

INFORMAN

No.	N a m a	Umur/L.P.	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan	Agama	Bahasa dikuasai	Alamat
1.	Hi. DJAFAR LAPASERE	45 THN L	H.I.S.	TOKOH MASYARAKAT PENSIUNAN	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	PALU
2.	THAMRIN DATUPALINGE	45 THN L	S.M.H.	CAMAT DOLO, PEGAWAI	ISLAM	- KAILI - BELANDA - INDONESIA	DOLO/KOTA RINDAU
3.	SAMAD ABD. KADIR	50 THN L	SMA	DAN RAMIL KEC. DOLO A B R I	ISLAM	- INDONESIA	KOTA RINDAU
4.	AKNA H. ASNAWI	50 THN L	SMP	KEPALA DESA KOTA RINDAU DAGANG KECIL	ISLAM	- KAILI	KOTA RINDAU
5.	IRWAN PODUNG	35 THN L	SPG	KETUA KOPERASI BATUBARA BERINGIN GURU SDN	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	KOTA RINDAU
6.	DJ. BELLA	37 THN L	SPG	KETUA LKMID GURU SDN	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	KOTA RINDAU
7.	HUSEN LAMALI	40 THN. L	SDN	TOKOH MASYARAKAT T A N I	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	KOTA RINDAU
8.	ARFAN LATOPADA	40 THN L	SARMUD PEND.	PENGURUS ALCHARAT DOLO STAF KANTOR AGAMA KAB. DONGGALA	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	KOTA RINDAU
9.	ROSNI YALIJAMA	33 THN P	PGAN	KETUA PPK GURU SDN	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	KOTA RINDAU
10.	DAUD LAREKE	44 THN L	SGA	TOKOH MASYARAKAT KEPALA SDN	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	KOTA RINDAU
11.	SUDIN T.	36 THN L	SMP	STAF P & K KEC. DOLO	ISLAM	- KAILI - INDONESIA	KOTA RINDAU

No.	N a m a	Umur/L.P.	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan	Aga.	Bahasa dikuasai	Alamat
12.	ABDURAHMAN LAPOPADA	47 THN L	ALIIYAH	PIMPINAN ALCHARAT CAB. DOLO	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	KOTA RINDAU
13.	H. LETUNGUDU	40 THN L	SGA	TOKOH AGAMA KEPALA DUSUN GURU SDN	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	KOTA RINDAU
14.	AIDIT P.	35 THN L	MUALIMIN ALGHAE- RAT	TOKOH MASYARAKAT	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	KOTA RINDAU
15.	YUSUP LATOPADA	38 THN L	S D A	TOKOH MASYARAKAT GURU AGAMA	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	KOTA RINDAU
16.	SALINDATE R.	60 THN L	SD Klas III	KEPALA DESA BANGGA KETUA PENGURUS AL- CHAERAT CAB. BANGGA	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA
17.	LAHUDI TANDESUSA	60 THN L	SDN	TOKOH MASYARAKAT, TANI	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA
18.	TAHARO L	50 THN L	SDN	TOKOH MASYARAKAT TANI	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA
19.	RANTEGAU R.	45 THN L	SDN	IMAM DESA BANGGA T A N I	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA
20.	MUSTAPA L.	35 THN L	MUALIMIN ALCHAE- RAT	KETUA REMAJA MESJID GURU AGAMA	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA
21.	P O L A R.	37 THN L	SDN	KETUA TANI SINGGANI TANI	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA
22.	KALI RANTELIBU	50 THN L	SDN	KETUA LKMD T A N I	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA
23.	DAENG PAWIRU	47 THN L	SDN	TOKOH MASYARAKAT T A N I	ISLAM	– KAILI – INDONESIA	BANGGA

I N D E K S

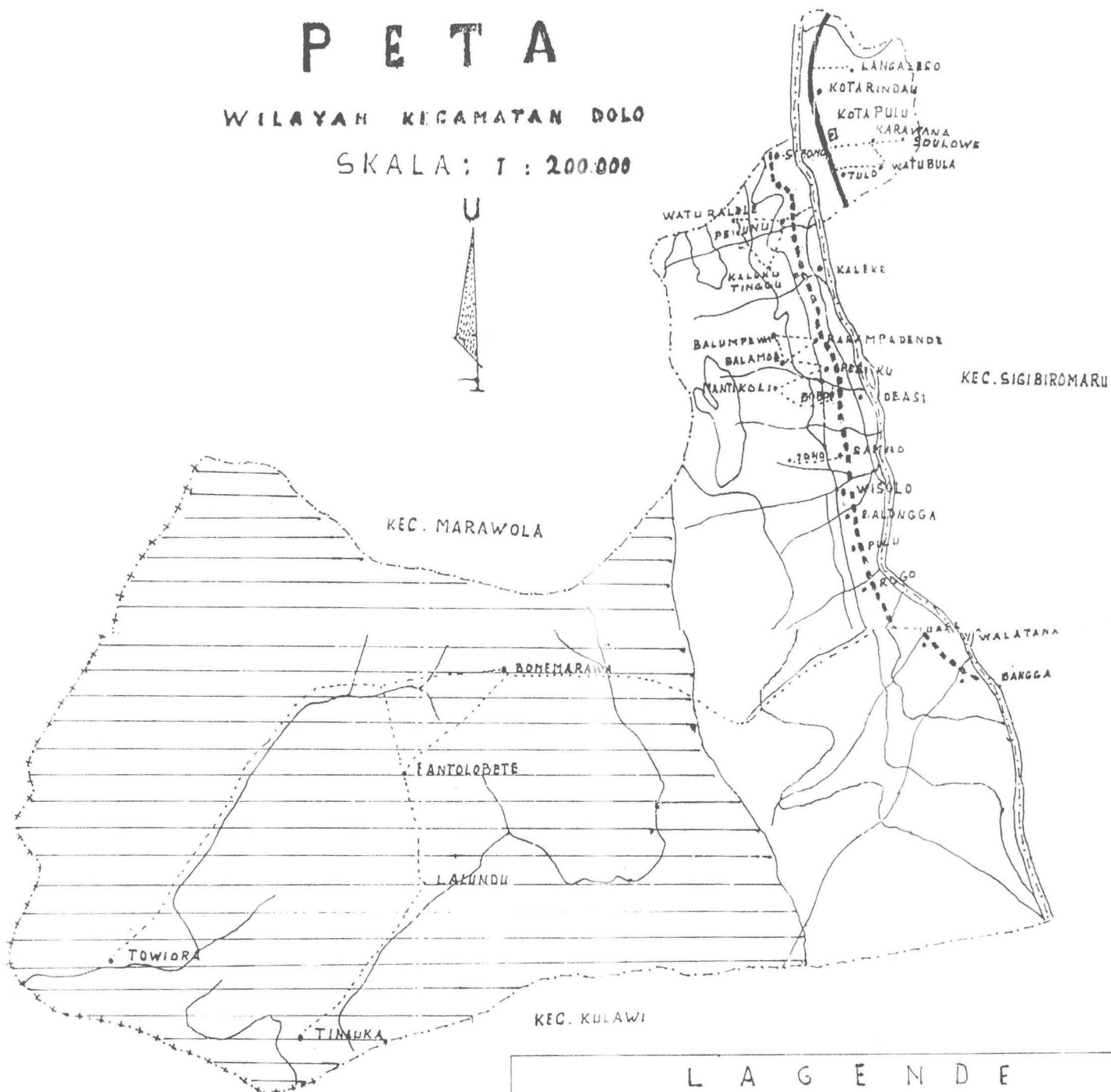
1. Ngata
2. Boya, Boya, ntanga
3. Kinta Baru
4. Mata Uwe/Buvu
5. Baruga
6. Bantaya
7. Libu
8. Pande
9. Binangga
10. B o b o
11. Ada mosibolai
12. Adat pitunggota
13. Bungulangi
14. M a g a u
15. Nitapa
16. Tomanuru
17. Balia jinja
18. Balia Tampilangi
19. Balia Tomanuru
20. D e r o
21. R e g o
22. V a i n o
23. N o k e s o
24. Vunja
25. Dadendate
26. Maradika
27. Madika Malolo
28. Madika Matua
29. Rurukan pajama
30. T o d e a
31. Libuntodea
32. Baligau
33. Totua kampu/ngata
34. Balengga
35. S u r o
36. Posangu
37. Sintuwu

38. S i g a
39. G a m a
40. Kaliyawo
41. Tadulako
42. Punggawa
43. Sintiwu
44. Totua adat
45. malunu
46. Kaupumurasi
47. Singgani
48. Nosimporoa
49. G e g e
50. Pekasuwia
51. Damo naria Punggawa
Damo Lengenaria
52. Pabicara
53. Maradikantana
54. Buya bomba

PETA

WILAYAH KECAMATAN DOLO

SKALA : 1 : 200.000



SEL

L A G E N D E



IBUKOTA : 1. KECAMATAN
2. DESA



BATAS : 1. PROPINSI

2. KECAMATAN



JALAN : 1. NEGARA, 2. KABUPATEN, 3. DESA



PEGUNGAN :



SUNGAI : 1. SUNGAI KECIL, 2. SUNGAI BESAR

PROPINSI SULAWESI TENGAH
(52)

PETA KONDISI JALAN



KETERANGAN

- ▣ kota provinsi
- kota kabupaten
- kota kecamatan
- kota
- ▬ jalan provinsi
- ▬ jalan kabupaten
- ▬ jalan kecamatan
- ▬ jalan desa
- ▬ jalan lain

Tidak diperdagangkan untuk umum

